

Katalog : 1205039.32

Statistisi Jawa Barat Ber-opini Konsentrasi Isu Sosial 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**



**Statistisi Jawa Barat
Ber-opini
Konsentrasi Isu Sosial
2020**

<https://ops.go.id>

Statistisi Jawa Barat Ber-Opini

Konsentrasi Isu Sosial

2020

ISBN : 978-602-5745-79-9

Nomor Publikasi : 32000.2158

Katalog : 1205039.32

Ukuran Buku : 14,8 x 21,0 cm

Jumlah Halaman : xii + 248 halaman

Naskah : BPS Provinsi Jawa Barat

Penyunting : BPS Provinsi Jawa Barat

Desain Sampul : BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar Foto Sampul : Humas BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan oleh : ©BPS Provinsi Jawa Barat

Dicetak oleh : BPS Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Statistisi Jawa Barat Ber-Opini

Konsentrasi Isu Sosial

2020

- Pengarah : Dyah Anugrah Kuswardani
- Penyiapan Naskah : Isti Larasati Widiastuty
Hari Afdani
Sidik Edi Sutopo
Asnafiya Asrof
- Desain Cover dan Tata Letak : Isti Larasati Widiastuty
- Kontributor/Penulis : Adong Hotma Megawati
Ani Saebani
Anik Triani
Arief Nurcahyo
Asep Hermansyah dan
Budi Setia Budi
Asriana Ariyanti
Dadan Rukmantara
Dadang Darmansyah
Dindin Maeludin
Endah Mahanani
Erlina Hardiyanti
Fitria Nur Diana
Heri Susanto
Husni Khamdan Fariz
Ida Siti Faridah

Isti Larasati Widiastuty
Muhamad Rikiansyah
Muhamad Sobari
Nano Suharno
Nevi Hendri
Perdy Irmawan Prayitno
Rahimin Encu Winarti
Rosser Ikhlas
Sarah Nurlaily
Singgah Satrio Prayogo
Siti Anisah
Susanti
Vira Wahyuningrum
Yayuf Faridah Ibrahim

Pengantar

Agenda perubahan Statistisi Jawa Barat ber-Opini merupakan upaya mendorong gerakan cinta data dari seluruh statistisi di BPS se-Provinsi Jawa Barat. Statistisi tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan penyedia data statistik. Namun statistisi memiliki peran lebih, yaitu menyajikan data yang dihasilkan agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.



Statistisi Jawa Barat ber-Opini Konsentrasi Isu Sosial 2020 merupakan publikasi kompilasi opini dari statistisi BPS se-Provinsi Jawa Barat edisi ke-5.

Pada publikasi ini tersaji berbagai buah pemikiran statistisi terkait isu utama Sensus Penduduk 2020, disamping kondisi sosial masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Semoga adanya publikasi ini semakin meningkatkan semangat statistisi untuk menulis. Harapannya, seluruh statistisi di BPS se-Provinsi Jawa Barat mampu mengomunikasikan data statistik dengan mudah dan kreatif.

Bandung, Desember 2021
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dyah' followed by a stylized flourish.

Dyah Anugrah Kuswardani

Daftar Isi

Sensus Penduduk 2020, Sensus Era Digital.....	1
<i>Susanti</i>	1
Jawa Barat dalam Kancan Nasional 2019	7
<i>Nevi Hendri</i>	7
Mitigasi Bencana Banjir di Awal Penghujan	12
<i>Dadan Rukmantara</i>	12
Menyongsong Pesta Demografi Indonesia 2020	16
<i>Dadang Darmansya</i>	16
Menuju Kota Bandung Bebas Asap Rokok	20
<i>Adong Hotma Megawati</i>	20
(Seharusnya) Masjid Adalah Lembaga Pelopor Pengentasan Kemiskinan.....	24
<i>Asep Hermansyah dan Budi Setia Budi</i>	24
Sensus Penduduk 2020, Merajut Asa Untuk Pembangunan Hakiki	38
<i>Arief Nurcahyo</i>	38
Lima hari menjelang Sensus Penduduk 2020.....	43
<i>Muhamad Rikiansyah</i>	43
Ada SPO di Februari – Maret 2020	47
<i>Dadan Rukmantara</i>	47
Manfaat Data Hasil Sensus Penduduk	50
<i>Nano Suharno</i>	50

Ayo Sukseskan Sensus Penduduk 2020.....	55
<i>Perdy Irmawan Prayitno</i>	55
Pendidikan yang Memerdekakan.....	60
<i>Isti Larasati Widiastuty</i>	60
Mengikis Kemiskinan Jawa Barat	65
<i>Ani Saebani</i>	65
Sensus Penduduk dan Era Digital.....	70
<i>Nano Suharno</i>	70
SP2020 dan Pentingnya Data.....	75
<i>Yayuf Faridah Ibrahim</i>	75
Sensus Penduduk 2020 : Sensus Penduduk Digital	81
<i>Rahimin Encu Winarti</i>	81
Partisipasi Sensus Penduduk <i>Online</i> untuk Perubahan Masa Depan.....	86
<i>Endah Mahanani</i>	86
Indonesia Emas, Generasi Emas	91
<i>Sarah Nurlaily</i>	91
<i>Stay At Home</i> , Sebagai Wujud Kepedulian	95
<i>Sarah Nurlaily</i>	95
Hari Kesehatan Sedunia dan Angka Kesakitan Cianjur	98
<i>Rosser Ikhlas</i>	98
Kado untuk Bumi Dimasa Pandemi	103
<i>Erlina Hardiyanti</i>	103
Hari Buruh di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i>	107

<i>Singah Satrio Prayogo</i>	107
WFH saat Pandemi, Mari Sensus Mandiri, Ditunggu hingga Akhir Mei	113
<i>Muhamad Sobari</i>	113
Kemiskinan Dalam Pandemi Corona	120
<i>Fitria Nur Diana</i>	120
Jika Rp. 3,6 T Keuntungan Mitra Kartu Prakerja Sebagian untuk Tes <i>Covid-19</i>	125
<i>Muhamad Sobari</i>	125
Perumahan Cianjur dalam Statistik	131
<i>Rosser Ikhlas</i>	131
Mengukir Bahagia untuk Lansia	135
<i>Husni Khamdan Fariz</i>	135
Korona, Fatwa Ulama dan Sensus Penduduk <i>Online</i>	139
<i>Muhamad Rikiansyah</i>	139
Bersama SP2020 #MencatatIndonesia dari Kita untuk Bangsa.....	144
<i>Erlina Hardiyanti</i>	144
Mudik, Riwayatmu Kini	149
<i>Muhamad Rikiansyah</i>	149
Minum Susu, Nutrisi untuk Bangsa	155
<i>Ida Siti Faridah</i>	155
Jangan Anggap “Merokok Membunuhmu” Hanya Slogan tanpa Data	159
<i>Muhamad Sobari</i>	159

Sudah Siapkah Kita Memasuki Era <i>New Normal</i>	166
<i>Muhamad Sobari</i>	166
IPM Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i>	173
<i>Ani Saebani</i>	173
Kesenjangan Pendidikan Nasional Masa Pandemi <i>Covid-19</i> menuju <i>New Normal</i>	179
<i>Asriana Ariyanti</i>	179
JKN, Jaring Pengaman Bukan ‘Sofa’ yang Nyaman	188
<i>Asriana Ariyanti</i>	188
Bonus Demografi Mau Dibawa Kemana Negara Kita	196
<i>Dindin Maeludin</i>	196
Tapera dan Rumah Layak Huni	199
<i>Dindin Maeludin</i>	199
Mau Cari Data, tapi Takut <i>Corona</i> ?.....	202
<i>Vira Wahyuningrum</i>	202
7 Provinsi dengan Capaian Indeks Demokrasi Kategori Baik.....	208
<i>Vira Wahyuningrum</i>	208
Jangan Berharap Indonesia Bisa Maju.....	214
<i>Sarah Nurlaily</i>	214
“Statistik” Indonesia	218
<i>Siti Anisah</i>	218

Menguak Perilaku Masyarakat di Era <i>New Normal</i>	223
<i>Siti Anisah</i>	223
Pahlawan Kesehatan	229
<i>Singgah Satrio Prayogo</i>	229
Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia	233
<i>Heri Susanto</i>	233
Ancaman "Lost Generation" di Tengah Pandemi	237
<i>Anik Triani</i>	237
Tingkat Pengangguran Jawa Barat di Tengah Pandemi <i>Covid-19</i>	241
<i>Heri Susanto</i>	241
Dua Sisi Dampak Revisi Cuti Bersama	245
<i>Heri Susanto</i>	245

Sensus Penduduk 2020, Sensus Era Digital

Susanti

Statistisi BPS Kota Bandung

“Dunia Dalam Genggaman”. Istilah yang tak asing terdengar di abad teknologi saat ini. Bagaimana tidak, dunia dibanjiri dan dimanjakan oleh melimpahnya informasi melalui sentuhan jari. Teknologi informasi digital sangat mempengaruhi pola hidup dan pola pikir masyarakat saat ini. Internet sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Saat ini gadget bukan lagi barang mewah. Banyak gadget berspesifikasi canggih dilengkapi berbagai fitur dan layanan disajikan dengan harga terjangkau. *Provider* internet pun berlomba-lomba menawarkan paket internet murah meriah dengan kecepatan 3G bahkan 4G. Akses internet dapat dilakukan di mana dan kapan saja, menarik minat masyarakat menggunakannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan persentase masyarakat yang mengakses internet. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 menjelaskan sebesar 50,92 persen masyarakat di perkotaan dan 26,56 persen di pedesaan yang berumur lima tahun ke atas mengakses internet selama tiga bulan terakhir. Pengguna aktif internet sebagian besar adalah generasi milenial.

Dari Statistik Telekomunikasi Indonesia, BPS menjelaskan tujuan penggunaan internet penggunaan internet didominasi penggunaan sosial media dan

mendapat informasi atau berita dengan persentase masing-masing sekitar 79,13 persen dan 65,97 persen. Sedangkan tujuan penggunaan internet lainnya untuk hiburan (45,07 persen), mengerjakan tugas sekolah (25,87 persen), mengirim atau menerima *email* (21,10 persen), pembelian atau penjualan barang dan jasa *Online* (10,82 persen), fasilitas finansial (5,08 persen), dan lainnya (12,84 persen).

Dalam Profil Generasi Milenial 2018, BPS menyebutkan bahwa generasi milenial mencapai 33,75 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini berarti sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi, dimana dari 67,02 persen penduduk usia produktif, sekitar 50,36 persennya adalah generasi milenial. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi.

Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Indonesia memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).

Bonus demografi tidak terlepas dari generasi milenial. Generasi milenial dengan kekuatan sebesar itu tentu saja memiliki peranan yang sangat besar pada era bonus demografi. Generasi ini yang akan mencerminkan gambaran bangsa Indonesia apakah menjadi bangsa yang

konsumentif atau produktif. Gambaran bangsa ini diantaranya dapat terpantau dari aktivitas sensus.

Sensus Penduduk

Tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan Sensus Penduduk. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sensus Penduduk yang ketujuh akan digelar di Indonesia pada tahun 2020.

Sesuai dengan rekomendasi PBB, Sensus Penduduk 2020 akan menggunakan metode kombinasi (*combine method*). Yaitu metode yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan mengombinasikannya dengan data registrasi penduduk sebagai data dasar. Data registrasi yang digunakan adalah data administrasi kependudukan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Tujuan Sensus Penduduk adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan. Outputnya nanti akan diperoleh jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk, dan data parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Metode pengumpulan datanya mengajak partisipasi masyarakat untuk mengisi kuesioner secara mandiri melalui *website* (sensus penduduk *Online*) yang

dikenal dengan istilah *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI). Kemudian tahapan selanjutnya pemutakhiran dengan wawancara langsung oleh petugas BPS menggunakan kertas kuesioner istilahnya *Pencil and Paper Interviewing* (PAPI) atau menggunakan *smartphone* istilahnya *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI).

Pada bulan Februari sampai Maret 2020, masyarakat diharapkan mengisi sensus *Online* secara mandiri. Melakukan pemutakhiran data kependudukan dan keluarganya secara *Online* melalui <https://sensus.bps.go.id>. Partisipasi langsung masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaannya. Dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Cukup menggunakan *gadget* yang terkoneksi jaringan *internet*. Karena dunia sudah dalam genggaman.

Selanjutnya, pada bulan Juli 2020 dilaksanakan pencacahan lengkap. Tahapannya melibatkan Ketua RT setempat. Ketua RT akan melakukan pemeriksaan daftar kependudukan dari hasil sensus *Online* dan data Dukcapil. Kemudian dilakukan verifikasi ke lapangan dan pencacahan lengkap oleh petugas menggunakan CAPI dan PAPI.

Data yang terkumpul sangat bermanfaat. Salah satu manfaat data hasil Sensus Penduduk adalah sebagai evaluasi pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia yang menjadi prioritas utama pada periode kedua tahun 2020-2024. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, salah satu fokus Pemerintah adalah meningkatkan SDM

berkualitas dan berdaya saing. Sehingga slogan “**SDM Unggul Indonesia Maju**” dapat terwujud.

Contoh data yang dikumpulkan adalah mengenai pendidikan. Informasi ini dimanfaatkan untuk membuat program-program di bidang pendidikan. Sebaran sekolah yang dibutuhkan, bagaimana meningkatkan partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah.

Dari rentang umur yang dikumpulkan dapat diketahui piramida penduduk Indonesia saat ini seperti apa. Persentase penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan rentang usia lainnya merupakan aset bangsa yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis.

Generasi milenial merupakan modal besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Generasi milenial diharapkan memiliki potensi dan kemampuan yang lebih unggul sebagai bekal penggerak roda pembangunan.

Indonesia menghadapi tantangan dalam pelaksanaan sensus seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini. Menyikapi tantangan tersebut, kaum milenial memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam pelaksanaan sensus penduduk secara *Online*. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 menuntut keaktifan dan kesediaan masyarakat dalam menyukseuskannya.

Perlu peningkatan kesadaran berbagai pihak akan pentingnya data yang dikumpulkan. Pembangunan tanpa data akan lebih mahal biayanya. Tentunya data yang baik bagi pembangunan adalah data berkualitas. Di era digital

saat ini, pencapaian data berkualitas perlu terus diupayakan.

Diharapkan generasi milenial yang dekat dengan teknologi *gadget* dan informasi, dapat menjadi pelopor pelaksanaan sensus *Online*. Menjadikannya sebagai tren dan populer di setiap aktivitasnya di media sosial. Dan meneruskan informasi mengenai Sensus Penduduk ini kepada keluarga, kerabat, lingkungan dan lapisan masyarakat lainnya.

Momen sepuluh tahun sekali ini jangan sampai terlewatkan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Generasi milenial, generasi harapan bangsa, mari berpartisipasi. Peran serta kita bangsa Indonesia akan memberikan kontribusi bagi pembangunan mendatang. Bersama kita tunjukkan peran dalam pembangunan, sekecil apapun. Mari kita sama-sama menyebar luaskan informasi dan manfaat Sensus Penduduk ini baik di keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosial.

Kita sukseskan Sensus Penduduk 2020. Menuju Indonesia maju, dengan SDM dan data berkualitas.

Jawa Barat dalam Kancah Nasional 2019

Nevi Hendri

Kepala BPS Kabupaten Ciamis

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada 2019 sebesar 268,07 jiwa. Sebanyak 49,32 juta jiwa atau 18,40% bertempat tinggal di Jawa Barat (Jabar). Jabar menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Adapun wilayah administrasinya meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, 627 kecamatan, serta 5.957 desa.

Potensi besar Jabar tersebut tentunya signifikan terhadap kemajuan bangsa. Pencapaian indikator pembangunan yang positif di Jabar akan mendongkrak indikator nasional. Begitu pula sebaliknya, rendahnya pencapaian indikator pembangunan Jabar berpotensi melemahkan indikator nasional. Oleh sebab itu, mengawali 2020, Jabar sebagai salah satu provinsi besar harus mampu menghadapi tantangan yang semakin besar pula. Beberapa tantangan yang menanti di antaranya masalah ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Ketenagakerjaan Jawa Barat

BPS mencatat bahwa angkatan kerja Jabar pada Agustus 2019 yaitu 23,80 juta orang. Sedangkan angkatan kerja nasional sebanyak 133,56 juta orang. Gambaran ini memperlihatkan terdapat 17,82% angkatan kerja berada di

Jabar. Penduduk dengan status bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 20,78 juta orang, bertambah menjadi 21,90 juta orang pada Agustus 2019. Hal tersebut menunjukkan adanya penambahan penyerapan tenaga kerja di Jabar sebanyak 1,12 juta orang selama Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2019.

Masih berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jabar, turun dari 8,17% (Agustus 2018) menjadi 7,99% (Agustus 2019) namun masih di atas TPT rata rata nasional (5,28%). Secara absolut, jumlah pengangguran di Jabar sebanyak 1,85 juta orang pada Agustus 2018 bertambah menjadi 1,90 juta orang pada Agustus 2019. Oleh sebab itu, pada 2020 Jabar harus mampu menyediakan sekurang kurangnya 2 juta-an lapangan kerja baru. Apabila dicermati menurut tingkat pendidikan, TPT terendah terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 4,26%. Sedangkan TPT tertinggi sebesar 14,53% pada jenjang pendidikan SMK. Adapun TPT pada jenjang pendidikan universitas sebesar 6,78 %.

Ditinjau dari struktur lapangan pekerjaan utama, perdagangan masih mendominasi di Jabar. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan sebanyak 22,24% pada Agustus 2018 naik menjadi 22,56% pada Agustus 2019. Sedangkan secara nasional (Agustus 2019), masih didominasi pertanian yaitu sebesar 27,33% dan perdagangan diurutan kedua yaitu 18,81%.

Selain itu, di Jabar terdapat peningkatan presentase penduduk bekerja pada industri pengolahan dari 20,93% pada Agustus 2018 menjadi 21,06% di Agustus 2019.

Demikian pula peningkatan terdapat pada penyediaan akomodasi dan makan minum dari 7,68% menjadi 8,4%. Kondisi sebaliknya terjadi penurunan serapan tenaga kerja pada pertanian. Kondisi Agustus 2018 pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 13,81% menurun menjadi 13,25% pada Agustus 2019.

Kemiskinan Jawa Barat

Kemiskinan menjadi masalah krusial yang dihadapi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hasil rilis BPS, Jabar pada Maret 2019 masih menghadapi 6,91% atau sebanyak 3,4 juta jiwa penduduk miskin. Namun persentasenya menurun dari maret 2018 (7,45%). Persentase penduduk miskin Jabar berada di bawah angka nasional (9,41%) atau sebanyak 25,14 juta orang. Adapun persentase kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Maret 2019, persentase penduduk miskin diperdesaan sebesar 9,79% (angka nasional sebesar 12,85 %) sedangkan di perkotaan sebesar 6,03% (angka nasional 6,69%).

Beras masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan Maret 2019. Di perkotaan sebesar 23,18%, sedangkan di perdesaan sebesar 29,68%. Adapun penyumbang terbesar kedua adalah rokok kretek filter sebesar 12,58% di perkotaan dan 10,10% di perdesaan. Posisi ketiga penyumbang terbesar adalah telur ayam ras sebesar 4,96% di perkotaan dan 4,94% di perdesaan.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan

keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan Jabar turun dari 1,134 pada September 2018 menjadi 1,095 pada Maret 2019. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan juga turun dari 0,265 menjadi 0,241 pada periode yang sama.

Perekonomian Jawa Barat

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar sebesar 5,14% (Y-on-Y) pada triwulan III-2019. Tumbuh di atas rata-rata LPE nasional (5,02%). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada triwulan ini mencapai Rp.544,56 triliun. Adapun struktur ekonominya didominasi lapangan usaha Industri pengolahan yaitu sebesar 41,42% dengan LPE 4,64%. Kontribusi terbesar kedua yaitu dari perdagangan sebesar 15,38% dan LPE-nya mampu tumbuh sebesar 7,76%. Distribusi terbesar ketiga adalah pertanian yaitu sebesar 8,91%, dengan LPE -1,52%.

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang triwulan III-2019 Jabar sebesar 2,72 % (Y-on-Y) terhadap triwulan III-2018. Pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional yang tumbuh sebesar 4,35%. Adapun pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan III-2019 Jabar sebesar 7,53 % (Y-o-Y) tumbuh di atas rata-rata nasional (6,19 %).

Perdagangan menjadi kontributor terbesar kedua dalam PDRB Jabar. Peranan ekspor menjadi salah satu komponen pendongkrak perdagangan di Jabar. BPS merilis nilai ekspor menurut provinsi asal barang, total ekspor Jabar periode Januari –November 2019 mencapai USD 27,71 milyar atau sebesar 18,09% ekspor nasional. Nilai ekspor Jabar ini, terbesar secara nasional disusul oleh Jawa Timur (11,16%) dan Riau (7,23%) dari total ekspor nasional sebesar USD 153,11 milyar.

Kiprah Jabar diharapkan terus semakin membaik di 2020. Keberhasilan pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di 2019 sangat berpengaruh positif terhadap indikator nasional. Oleh sebab itu, Visi Pemerintah Jabar “Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” yang bisa makin membumi. Selain mampu mensejahterakan warga Jabar juga turut andil dalam pembangunan nasional. Semoga.

Mitigasi Bencana Banjir di Awal Penghujan

Dadan Rukmantara

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Curah hujan tinggi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengawali tahun 2020. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan ini termasuk ekstrem dan tinggi jika dibandingkan dengan curah hujan yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Banjir yang dipicu oleh curah hujan yang tinggi sudah mulai terjadi di beberapa tempat. Sebagai contoh banjir yang terjadi di sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya.

Memang bencana alam adalah suatu fenomena yang susah diprediksi, hanya bisa diperhitungkan berdasarkan kejadian dalam waktu yang sangat dekat dengan menganalisis indikator-indikator bencana yang sudah terjadi sebelumnya, dan ini memerlukan langkah-langkah mitigasi bencana.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana harus mulai dijadikan prioritas dan program wajib dan rutin pemerintah di samping normalisasi, naturalisasi, atau revitalisasi guna mengembalikan kembali fungsi sungai dan juga kebijakan realisasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan modern.

Berdasarkan PP No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana.

Mitigasi bencana merupakan langkah yang sangat perlu dilakukan sebagai suatu titik tolak utama dari manajemen bencana.

Diperlukan empat hal penting dalam mitigasi bencana, antara lain dengan tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana serta perlunya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, juga tidak kalah penting dengan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Sebagaimana sudah banyak diketahui kondisi hutan-hutan di Indonesia keadaannya sudah banyak yang memperhatikan. Kondisi hutan yang gundul sebagai akibat dari pembalakan liar sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, hal ini juga yang menjadikan salah satu penyebab bencana longsor dan banjir terjadi.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan saat ini mencapai 124 juta hektare. Sejak 2010 sampai 2015, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi kehilangan

luas hutannya yang mencapai 684.000 hektare tiap tahunnya.

Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan. Indonesia yang sebelumnya dijuluki paru-paru dunia, sekarang bencana banjir banyak terjadi di beberapa daerah, perlu segera penanganan yang optimal mengenai upaya mitigasi bencana ini.

Tujuan dari strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya pada masa mendatang.

Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Tujuan-tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugian-kerugian sektor swasta sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan-tujuan ini mungkin mencakup dorongan bagi orang-orang untuk melindungi diri mereka sejauh mungkin.

Upaya Meningkatkan pengetahuan masyarakat (*public awareness*) dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman dan pengintegrasian program mitigasi dengan proses pembangunan adalah salah satu tujuan mitigasi bencana.

Marilah mulai dari diri sendiri untuk sadar lingkungan dan peduli terhadap lingkungan agar bisa meminimalisasi resiko terjadinya bencana utamanya bencana banjir, dengan sesuatu yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya akan menghasilkan suatu hasil yang maksimal jika dilakukan secara masive bersama-sama. Jangan melihat orang lain dan jangan jadi orang lain untuk memulai suatu kebaikan, syukur-syukur nanti merika mengikuti kita, walaupun tidak diikuti biarlah kebaikan kita dijadikan suatu amal soleh kebaikan buat diri kita sendiri.

Menyongsong Pesta Demografi Indonesia 2020

Dadang Darmansyah

Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Ciamis

Kegiatan besar di bidang demografi akan segera dilaksanakan di Tahun 2020. Kegiatan itu adalah Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk ini merupakan agenda sepuluh tahunan yang bertujuan menyediakan data jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia. Sensus Penduduk 2020 menggunakan dua cara. Cara pertama melalui Sensus Penduduk *Online* (SPO) yang akan dilaksanakan serentak mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Cara kedua melalui Sensus Penduduk Wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Sensus Penduduk kali ini tidak hanya akan menjadi sejarah bagi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara namun bagi Indonesia. Tentu saja karena Sensus Penduduk *Online* merupakan kali pertama sejak Tahun 1961 setelah Indonesia merdeka. Sebelumnya Sensus Penduduk hanya dilakukan dengan cara konvensional melalui kunjungan langsung oleh petugas sensus ke rumah-rumah penduduk.

Sensus Penduduk *Online* Tahun 2020 menggunakan metoda kombinasi (*combine method*). Penggunaan data adminduk dari Ditjen Dukcapil menjadikan sensus kali ini menjadi berbeda. Ditambah dengan hasil pendataan lapangan pada sensus penduduk wawancara yang akan dilaksanakan pada bulan Juli di

tahun yang sama. Masyarakat diminta untuk “mensensus” dirinya sendiri dengan mengisi data diri secara mandiri di link: <http://sensus.bps.go.id>. Pendataan mandiri atau dikenal dengan “*self enumeration*” merupakan rekomendasi PBB dan sudah diterapkan di banyak negara maju. Negara dengan tingkat kesejahteraan, pendidikan, teknologi serta “melek” statistik yang cukup tinggi memudahkan kegiatan sensus mandiri ini.

Kenapa harus SPO

Sensus Penduduk *Online* atau dikenal dengan SPO memberikan pilihan cara baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sensus penduduk. Tuntutan terhadap ketersediaan data kependudukan secara periodik dan *real time* hanya mampu terwujud jika pemutakhiran data penduduknya dilakukan secara mandiri oleh penduduk. SPO juga menjadi bagian dari upaya untuk membangun suatu budaya baru di tengah masyarakat akan pentingnya data dimulai dari informasi pribadinya. Sekaligus memberikan edukasi pemanfaatan teknologi kepada masyarakat di era digital. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk bertemu petugas sensus bisa menggunakan cara SPO ini. Kelompok masyarakat ini umumnya berada di wilayah urban dan kelompok menengah ke atas yang cenderung memiliki keterbatasan waktu luang. Kelompok penduduk ini dipastikan memiliki literasi teknologi yang lebih baik sehingga lebih memungkinkan untuk berpartisipasi dalam SPO.

Tantangan SPO

Tantangan terbesar dalam kegiatan SPO ini diantaranya *participant rate*. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPO ini sangat menentukan keberhasilan. Sebagai sesuatu yang baru, dibutuhkan *delivery* informasi kepada masyarakat yang efektif melalui berbagai media sosialisasi. Masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi juga terdorong untuk memberikan partisipasinya dalam SPO. Tantangan berikutnya adalah *public trust* dan *usability*. Kepercayaan publik terhadap keamanan data individu harus terjamin. Perangkat undang-undang terkait jaminan data individu harus dikuatkan. Masyarakat merasakan keamanan saat memberikan data individunya. Perangkat yang digunakan dalam SPO ini juga harus bersifat *Usability*. Masyarakat dibuat mudah untuk mengisi data dan berpartisipasi dalam SPO ini. Juga harus memenuhi syarat *reliability* (keandalan), *accessibility* (kemudahan), *availability* (ketersediaan) dan *security* (keamanan).

Multimode Data Collection

Pendekatan berbagai moda proses pengumpulan data dilakukan pada sensus penduduk 2020. Moda yang digunakan ada yang bersifat *digital assisted* (CAWI dan CAPI) dan *paper assisted* (PAPI). *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) sebagai moda pendataan mandiri dan pendataan oleh petugas menggunakan *Computer Assisted Personal Interview* (CAPI) serta PAPI (*Pencil and Paper Interview*). CAWI digunakan untuk mengakomodasi penduduk yang tidak bisa dilakukan pendataan secara langsung. Dengan moda ini penduduk dapat mengisi sendiri data yang diperlukan ke dalam website. CAPI

digunakan untuk mengurangi beban petugas membawa lembaran-lembaran kertas dokumen pendataan lapangan. Sedangkan PAPI masih digunakan untuk daerah yang tidak dapat menggunakan aplikasi CAWI dan CAPI. Berbagai moda pengumpulan data ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Diantaranya orientasi anggaran, efektivitas sensus, kondisi geografis, literasi teknologi dan sikap atau gaya hidup masyarakat.

Dukungan dan Legimitasi SPO

Untuk menguatkan dukungan dan legitimasi SPO ini dibutuhkan *awarness* kolektif dari semua pihak. Mengingat kepentingan dari hasil SPO memberikan dampak luas, bersifat nasional dan lintas sektoral. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Mulai dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan hingga ketua SLS/Satuan Lingkungan Setempat. Peran mereka dalam menyampaikan rangkaian kegiatan Sensus Penduduk 2020 dan mobilisasi serta himbauan partisipasi masyarakat dalam SPO sangat membantu keberhasilan.

Dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam memberikan data dan informasi kependudukan yang akurat. Data yang berkualitas menjadi pijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. Semoga pesta demografi Sensus Penduduk Tahun 2020 dapat berjalan sukses dan lancar menuju satu data kependudukan Indonesia.

Menuju Kota Bandung Bebas Asap Rokok

Adong Hotma Megawati
Statistisi BPS Kota Bandung

Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan, seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Kenikmatan rokok ternyata tak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Efek dari gaya hidup seperti ini memang tidak langsung terjadi, namun seiring berjalannya waktu, 4000 lebih zat kimia yang terkandung di dalamnya akan merusak dan membahayakan tubuh perokok aktif maupun pasif.

Salah satu penyebab karena nikotin memberi efek *feeling good* hingga perokok kecanduan dan sangat sulit berhenti. Laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) berjudul *The Tobacco Control Atlas, Asean Region* menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, yakni 65,19 juta orang. Angka tersebut setara 34 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 2016. Fenomena merokok, kini sudah sampai ke generasi muda, tak hanya laki-laki, melainkan juga perempuan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional bulan Maret tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa persentase penduduk Provinsi Jawa Barat usia 5 hingga 9 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir sebesar 0,05 persen dan persentase penduduk Provinsi

Jawa Barat usia 10 hingga 14 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir sebesar 0,43 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat terbelenggu dengan fenomena merokok anak di bawah umur dan remaja. Mereka adalah penerus masa depan yang perlu dipersiapkan dengan matang karena merupakan aset yang cemerlang bagi Provinsi Jawa Barat khususnya Bangsa Indonesia umumnya yang akan menghasilkan karya-karya besar di masa depan.

Merokok pada usia muda menunjukkan pola perilaku yang kurang teredukasi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keteladanan baik pada lingkungan keluarga dan sekolah. Kebiasaan merokok orang tua dan guru sudah dilihat oleh anak sejak usia dini hingga bersekolah tingkat dasar hingga menengah atas.

Pemahaman bahaya rokok harus terlebih dulu ditanamkan pada lingkungan keluarga kemudian dilanjutkan pada lingkungan sekolah dimana guru berperan aktif melakukan pendampingan. Media pun berperan dalam fenomena merokok ini. Iklan tentang rokok yang disiarkan di TV begitu masif menunjukkan satu jati diri tersendiri bagi perokok, bukan memunculkan bahaya rokoknya.

Tidak hanya anak usia dini dan remaja, kesadaran penduduk kota Bandung usia dewasa pun masih cenderung tidak peduli dengan pengaruh buruk yang dihasilkan dari rokok. Mereka seharusnya menjadi *role model* untuk generasi yang lebih muda. Tentu sangat sulit pada mereka yang sudah terbiasa merokok untuk berhenti, diperlukan niat yang kuat.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menyatakan bahwa persentase penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir sebesar 30,71 persen dengan rata-rata 70 batang rokok yang dihisap per minggu. Masih berdasarkan survei tersebut, persentase penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 31,72 persen lebih besar dari yang berpendidikan SMP ke atas sebesar 30,44 persen.

Untuk menghadapi fenomena merokok ini butuh dukungan dari semua kalangan. Kesadaran bahaya merokok harus sudah diterapkan sejak usia dini dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan dan bahaya dari kebiasaan merokok. Pemerintah resmi menaikkan harga rokok seiring kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Akibatnya, harga jual eceran (HJE) rokok resmi naik sebesar 35 persen mulai 1 Januari 2020. Kenaikan tarif cukai rokok dan HJE itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 Tahun 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau. Salah satu pertimbangan kenaikan cukai rokok ini adalah untuk mengurangi konsumsi.

Di Kota Bandung sendiri, sejak tahun 2017 melalui Peraturan Wali Kota Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), pemerintah kota Bandung telah menjalankan berbagai upaya untuk menciptakan

lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Yang termasuk KTR adalah fasilitas layanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Di wilayah KTR, setiap orang tidak boleh merokok, orang atau badan dilarang menjual atau membeli rokok, kecuali di tempat umum yang memang memiliki izin.

Sejalan dengan anjuran untuk tidak merokok atau berhenti merokok, pemerintah Kota Bandung juga melaksanakan kegiatan berupa konseling dan intervensi farmakologi bila perlu untuk mengupayakan agar seseorang berhenti merokok yang disebut dengan Klinik Berhenti Merokok (KBM) atau saat ini disebut Upaya Berhenti Merokok (UBM) yang ada di Balai Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Layanan yang diberikan adalah layanan kesehatan perorangan maupun layanan kesehatan masyarakat, mencakup promotif, preventif, kuratif atau rehabilitatif. Keberhasilan dalam membangun Kota Bandung Bebas Asap Rokok membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

(Seharusnya) Masjid Adalah Lembaga Pelopor Pengentasan Kemiskinan

Asep Hermansyah dan Budi Setia Budi

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan

Studi Tentang Rancangan Strategi Pemberdayaan Aktifitas Potensi Ekonomi Masjid, Sebagai Jalur Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kuningan

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar cenderung bebas seperti tidak berjalan dengan prinsip keadilan sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial baru di masyarakat dengan berbagai macam bentuknya, di antaranya kesenjangan antara orang kaya yang semakin kaya dan orang miskin yang semakin miskin. Menurut Ruslan, 2012 kesenjangan tersebut merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat.

Penurunan jumlah kemiskinan yang saat ini terjadi sepertinya belum dirasakan secara menyeluruh dan masih terjadi kesenjangan yang menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan secara aplikatif, sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang tergeser, terjepit, dan terpinggirkan (Agung Eko, 2013).

Kemiskinan menjelma menjadi sebuah permasalahan yang selalu hadir di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif.

Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya dengan segera dan berlaku menyeluruh, sebab jika tidak mampu diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian yang mengganggu pelaksanaan pembangunan bahkan bukan tidak mungkin mengarah pada hal anarkis yang justru akan merusak hasil pembangunan.

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kuningan

Dalam periode 2013-2018, tingkat kemiskinan penduduk di Kabupaten Kuningan secara umum mengalami penurunan dari 13,34% menjadi 12,22%. Demikian halnya dengan jumlah penduduk miskin juga semakin menurun dari 139,40 ribu jiwa menjadi 131,16 ribu jiwa. Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 1,73% dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,40% di tahun 2018.

Berdasarkan hasil Susenas karakteristik demografi rumah tangga miskin di Kabupaten Kuningan adalah 90,57% kepala rumah tangga miskin laki laki, rata-rata kepala rumah tangga berusia 50 tahun, rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 5 orang. Karakteristik sosial ekonomi: 92,10% berpendidikan tamat SMP ke bawah, 45,27% tidak bekerja, 75,34% pengeluaran rumah tangga untuk makanan. Karakteristik perumahan yaitu 80,13% memiliki tempat tinggal milik sendiri dengan lantai terluas bukan tanah 98,92%, dinding terluas tembok sebanyak 94,13%, atap terluas beton atau sirap sebanyak 96,97%, menggunakan jamban sendiri 92,68% dan

menggunakan sumber air layak sebesar 80,09%. (Leisa, 2019)

Apabila dilihat dari sisi jumlah pada tahun 2018 penduduk menurut agama dan kepercayaannya maka Kementerian Agama Kabupaten Kuningan mencatat 98,74 % penduduk Kabupaten Kuningan atau sejumlah 1.133.731 jiwa.

Dengan tidak sama sekali menggeneralisir bahwa kemiskinan adalah entitas dari agama tertentu (dalam hal ini Islam), justru tulisan ini dibuat sebagai pencerahan karena secara teori bahwa dalam pandangan Islam tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun Ahl al-Dzimme (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengawasi kemungkinan penyebab yang dapat menimbulkannya (Al Qardhawi, 2002).

Hal itu harus dilakukan dalam rangka kepentingan yang lebih besar yaitu menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat.

Artinya Islam adalah agama yang mengajarkan dan melarang pengikutnya (ummat) menjadi orang miskin dan menjadi beban bagi orang lain, bahkan dalam kutipan hadis lainnya terungkap juga bahwa “Manusia terbaik

adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya (bukan menjadi beban).”

Hal menarik lainnya adalah terdapat fenomena menarik di Kabupaten Kuningan bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan penerimaan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) di Kabupaten Kuningan meningkat sebesar 10,12 persen dari 16,381 milyar di tahun 2018 menjadi 18,039 milyar di tahun 2019. Sekitar delapan puluh persen (80 %) berasal dari penampungan ZIS jalur desa dimana pemerintahan dan masjid menjadi motor penggerak pengumpulan ZIS-nya.

Sementara fenomena lainnya adalah pengumpulan uang infak dari jamaah sholat jumat yang juga terhitung besar setiap pekan dan setiap masjidnya, walaupun tidak ada besaran pasti untuk menghitung jumlah dana tersebut akan tetapi bila di lihat dari 811 buah masjid yang mengadakan sholat jumat di Kabupaten Kuningan maka perkiraan jumlah dana besar yang akan dapat dikumpulkan setiap pekannya adalah merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk membangun ummat islam menjadi lebih memiliki kemampuan untuk bertahan sesulit apapun kondisi perekonomian yang menghadang.

Masjid sebagai Sarana Pemberdayaan Ummat

Masjid dapat menjadi sentral kekuatan masyarakat. Dimasa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral masyarakat Islam untuk berbagai kegiatan. Pada saat ini masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah/pembinaan iman/taqwa, sosial kemasyarakatan, peningkatan

pendidikan dan pembinaan SDM serta pengembangan ekonomi. Umumnya dari empat fungsi ini hanya yang pertama saja yang terlaksana sementara fungsi lainnya belum optimal (Sutarmadi, A, 2001)

Untuk mengoptimalkan fungsi tersebut perlu dilakukan identifikasi untuk meningkatkan kapasitas masjid dan pengurusnya agar mampu menjalankan fungsinya. Potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid sangat diperlukan sebagai motor penggerak, kondisi ini didasari dari fungsi masjid bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi juga dapat menjalankan fungsi sosial ekonomi, maka sudah barang tentu masjid yang memiliki ekonomi potensial dapat digerakkan menjadi ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Fenomena kemiskinan dapat dilokalisir menjadi persoalan kelembagaan. Dalam pandangan ekonomi kelembagaan, dimana kelembagaan ini dimengerti sebagai regulasi perilaku atau aturan yang secara umum diterima oleh anggota suatu kelompok sosial yang pelaksanaannya dapat diawasi secara internal (*self-policed*) maupun eksternal (*external authority*), (Rutherford;1994).

Lebih lanjut, (North;1994) menjelaskan bahwa kelembagaan adalah penciptaan rintangan bagi kemungkinan perilaku menyimpang manusia yang keberadaannya diatur dalam struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Aturan tersebut dapat termaktub dalam *informal constraints* (misalnya, sanksi, tabu, tradisi,

dan budaya) dan formal rules (misalnya, konstitusi, hukum, dan hak kepemilikan).

Timothy J. Yeager: 1999, menambahkan bahwa kelembagaan adalah aturan main (*rules of game*) yang dapat memapankan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kelembagaan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang selalu membayangi dalam setiap interaksi antar manusia melalui penciptaan pola perilaku yang jelas dan tegas. Singkatnya, kelembagaan dapat dimaknai sebagai pedoman yang digunakan antar pelaku (ekonomi) sehingga masing-masing pihak memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatannya.

Dari beberapa konsep tentang kelembagaan di atas maka sangatlah relevan menjadikan masjid sebagai lembaga yang selain bersifat kemasyarakatan (*horizontal*) juga memiliki dimensi ke Tuhanan (*vertical*) dalam hal pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Kemiskinan yang terjadi banyak di sebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, hal ini memberikan peluang pada kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan usaha meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil dengan memberdayakan ekonomi masyarakat salah satunya adalah berbasis masjid.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

Secara ekonomi, Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat

timpang. Hal ini terjadi karena basis ekonomi yang strategis hanya dimonopoli oleh segelintir orang, yaitu kalangan feodal tradisional dan masyarakat modern kapitalis dengan konsep ekonomi “ribawi”. Istilah pemberdayaan masyarakat mangacu pada kata *empowerment* yang berarti penguatan yang bermakna sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka. Maka pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah yang dapat memposisikan individu sebagai subyek bukan obyek (Setiana, L., 2007).

Suharto, E.,2005 menyatakan bahwa dalam pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi keputusan mereka.

DATA PROFIL MASJID

Seperti telah diungkap diatas bahwa secara potensial masjid memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk berperan dalam penyelesaian masalah kemiskinan secara kewilayahan (didesa masing-masing dimana masjid tersebut berada). Dapat diketahui secara umum pula bahwa masjid di Kabupaten Kuningan memiliki kepengurusan yang lengkap dan lebih terfokus pada kegiatan peribadatan atau ibadah ritual sedangkan potensi sosial ekonomi secara umum masih belum mendapatkan perhatian secara seksama untuk pengembangannya, ini dapat terlihat masih belum terisinya data profil masjid dari bidang simpan pinjam (BMT), konsultan hukum, dan Klinik kesehatan. Dengan kondisi demikian memberikan peluang untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas pemberdayaan masjid untuk kesejahteraan umat terutama di lingkungan sekitar masjid. Mengurai masalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga merupakan kewajiban dari Masjid sehingga tidak ada lagi jamaah/masyarakat yang enggan melakukan ibadah dikarenakan kekurangan/kemiskinan yang dialaminya.

Perlu diperhatikan pula oleh institusi yang melakukan pembinaan terhadap masjid agar potensi dan asset masjid dapat didata secara terartur dan berkala sehingga pengoptimalan potensi dan asset masjid dapat dibina dengan konsep yang sesuai dengan kewilayahan dan keunggulan masing-masing.

Pembinaan penggunaan asset dan potensi masjid menjadi lebih bernilai ekonomis bagi penduduk disekitarnya ini juga bagian dari penyeimbangan terhadap potensi masjid desa yang terkadang tidak merata menjadi lebih terdistribusi dengan baik diseluruh Kabupaten Kuningan.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid

Pemberdayaan ekonomi potensial menjadi ekonomi produktif berbasis masjid yang dapat diakses oleh umat khususnya fakir miskin yang memiliki keinginan dan kemauan berusaha mengembangkan potensi diri. Adapun konsep manajemen pengelolaan potensi masjid adalah sebagai berikut :

KEKUATAN (Strenghts)

- Posisi Strategis masjid mudah untuk di jangkau masyarakat;
- Infrastruktur masjid secara umum sudah memadai
- Aset ekonomi Potensial Masjid secara umum cukup memadai;
- Jamaah masjid cukup banyak;
- Ada Organisasi kepengurusan masjid sekaligus pengelola Baitul Maal.

KELEMAHAN (Weakness)

- Visi dan Misi serta pemahaman kepengurusan/organisasi masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat belum tertulis dengan jelas;

- Belum ada lembaga yang langsung menangani pemberdayaan umat Seperti lembaga keuangan mikro syariah/BMT;
- Belum ada tenaga terlatih dalam manajemen keuangan masjid;
- Belum ada kerjasama dengan lembaga keuangan/pemerintah.

PELUANG (Opertunities)

- Beberapa Masjid memiliki donatur tetap;
- Masjid memiliki Aset ekonomi potensial dari ZIS;
- Masjid memiliki asset infrastruktur yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi umat;
- Posisi strategis masjid mudah diakses jamaah.

STRATEGI Strenghts - Opertunities (SO)

- Kemudahan diakses oleh jamaah merupakan keunggulan yang dapat dikembangkan karena dengan fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang selalu dikunjungi umat memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi umat;
- Penerimaan ZIS dari masyarakat yang saat ini dikelola oleh pengurus / organisasi masjid bersifat baitul maal dan ditunjang donator tetap dapat merupakan modal dasar dalam pengembangan pemberdayaan ekgonomi umat berbasis masjid;
- Kepengurusan /organisasi masjid merupakan langkah awal dalam pembentukan lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti BMT.

STRATEGI Weaknes-Opertunities (WO)

- Perlunya pemahaman kepengurusan masjid dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan kader masjid untuk menambah wawasan dan kapasitas pengurus masjid;
- Perlunya dibentuk lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti BMT dengan memanfaatkan aset ekonomi potensial dan aset infrastruktur yang dimiliki masjid;
- Perlunya donator yang memiliki kepedulian pengembangan ekonomi umat serta melakukan kerjasama dengan instansi perbankan syariah dan lembaga pemerintah sebagai donatur untuk pemberdayaan ekonomi umat seperti BMT yang akan sangat mudah diakses oleh umat dengan melihat posisi strategis masjid.

ANCAMAN (Threats)

- Tidak ada bagi hasil untuk masjid yang dapat digunakan untuk operasional masjid dan pengelola dengan konsep syariah dalam pengelolaan ZIS dari umat melalui Baitul Maal;
- Adanya lembaga lain dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- Tidak ada ZIS dari donatur tetap yang tertatik dalam pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid;
- Tidak ada Lembaga keuangan syariah yang bekerjasama dengan masjid

STRATEGI Strengths-Threats (ST)

- Mengoptimalkan kepengurusan masjid untuk dapat membentuk lembaga pemberdayaan umat seperti BMT dengan menghimpun dana ZIS dari donatur dan lembaga keuangan syariah lainnya sehingga masjid memiliki peran ganda sebagai tempat ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat.

STRATEGI Weaknes-Threats (WT)

- Membentuk pemahaman pengurus masjid untuk mengoptimalkan dana potensial masjid dari ZIS untuk pemberdayaan ekonomi umat;
- Menyiapkan program kerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan peran serta masyarakat mampu untuk menjadi donatur ZIS sesuai syariah melalui lembaga pemberdayaan umat seperti BMT yang berbasis masjid.

Keseluruhan konsep SWOT pemberdayaan ekonomi potensial masjid ini dikutip dari Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan penulis Rozzana Erziaty; Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia erziatyrozzana@gmail.com |

Penutup

Semua penjelasan di atas terkait dengan pemberdayaan fungsi sosial masjid dan peluang

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Potensi besar yang dimiliki umat Islam secara mandiri sebenarnya cukup untuk membantu mengentaskan kemiskinan, karena bagi umat Islam hidup memberikan manfaat akan lebih baik dari pada menjadi hidup menjadi beban orang lain.

Mengutip perkataan dari KH. Abdullah Gymnastiyar bahwa mulailah dari yang kecil, mulai dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Leisa, RA Triana, "Kemiskinan di Kabupaten Kuningan 2013 s.d. 2018", BPS Kabupaten Kuningan hal. xiii.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 316.
- Purwana, Agung Eko. 2013. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Justitia Islamica*, Vol.10, No.1.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta Pustaka.
- Sutarmadi, A., 2001. *Visi, Misi dan Langkah Strategis. Pengurus Dewan Masjid Indonesia dan Pengelola Masjid*. Wacana Ilmu. Jakarta.
- Setiana, L., 2007. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. UIN Sunan Kalijaga, Press. Yogyakarta.

Suharto, E.,2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refika Aditama, Bandung.

Malcolm Rutherford, Institution in Economics: The Old and the New Institutionalism (USA: Cambridge University Press, 1994), hlm. 182.

Douglass C. North, "Economic Performance Through Time", The American Economic Review, Vol. 84, No. 3, 1994, hlm. 360.

Sensus Penduduk 2020, Merajut Asa Untuk Pembangunan Hakiki

Arief Nurcahyo
Statistisi BPS Kota Cirebon

“Data memang mahal, tetapi membangun tanpa data akan jauh lebih mahal.”

Ungkapan itu bukanlah kamuflase. Karena Saat ini data menjadi hal yang sangat penting sehingga Presiden Jokowi menyebut pada kesempatan dalam pidato kenegaraannya bahwa saat ini data lebih berharga dari emas dan minyak. Contoh yang paling sederhana adalah berapa mahalnya biaya pada operasional intelijen dalam mengumpulkan data untuk mengungkap suatu kasus. Barangkali Itu dalam ruang lingkup kecil. Bagaimana jika kasus tersebut menyangkut ruang lingkup yang besar terkait kemaslahatan dan pembangunan sebuah bangsa, seperti masalah penduduk.

Penduduk merupakan syarat pokok berdirinya sebuah bangsa/negara. Karenanya tidak bisa dipungkiri pentingnya arti penduduk itu sendiri. Penduduk menjadi potensi dasar dalam pembangunan. Penduduk besar yang dikelola dengan baik dan diisi oleh manusia yang berkualitas akan lebih mudah dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang. Namun sebaliknya, jika penduduk yang besar tanpa dikelola dengan baik dan diisi oleh manusia yang kurang berkualitas akan menjadi masalah besar bagi eksistensi sebuah negara.

Terkait hal tersebut diperlukan data kependudukan yang akurat yang bisa menyediakan data, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk untuk menuju satu data kependudukan. Membangun satu data kependudukan memang bukan pekerjaan sepele, harus melibatkan semua aspek dan *stakeholder* yang ada.

Seperti diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara yang memiliki penduduk ke-5 terbesar di dunia, akan melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2020 atau yang ke-7 sejak negara Indonesia itu berdiri. Hajat besar yang dilakukan 10 tahun sekali ini membutuhkan kerja keras dan perhatian serius guna menuju satu data kependudukan yang berkualitas.

Tantangan pun muncul, mulai dari proses pengumpulan datanya hingga kebijakan apa yang akan dilakukan ketika data itu sudah tersedia. Contoh tantangan yang paling kongkrit terkait penduduk Indonesia saat ini adalah tantangan biaya memelihara kesehatan, dimana orang dengan usia lanjut biasanya dihadapkan dengan banyak masalah kesehatan. Belum lagi tantangan demografi, lantaran Indonesia memiliki bonus demografi yang diisi angkatan muda. Tantangan demografi muda adalah pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Masalah tersebut menjadi lebih menantang dengan kemajuan teknologi yang cepat saat ini. Kemajuan industri 4.0, *artificial intelligence*, *robotic*, *crypto currency*, dan sebagainya akan mengubah banyak hal seperti jenis pekerjaan dan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Tantangan selanjutnya adalah soal kemiskinan, seperti diketahui bahwa 74 tahun sudah Indonesia menikmati Kemerdekaan, namun problem kemiskinan masih menjadi musuh bersama karena belum terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan sarana dasar kebutuhan esensial lainnya termasuk hak untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan publik serta proses pembangunan.

Data kemiskinan kita secara nasional menunjukkan angka-angka yang semakin memperlihatkan adanya kondisi yang semakin sulit. Mengutip sumber Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Namun angka tersebut lebih rendah 0,53 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk berpengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan pada September 2018.

Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah secara nasional menggariskan kebijakan umum dengan koridor *pro poor*, *pro growth* dan *pro-employed*. Rencana aksi untuk itu meliputi langkah langkah melalui (1) pengelolaan ekonomi makro, (2) pemenuhan hak-hak dasar warga, (3) perwujudan keadilan dan kesetaraan gender serta (4) percepatan pembangunan daerah.

Dalam kerangka itu, beberapa hal yang dapat dikaji adalah kesertaan Pemerintah Daerah dalam menangani kemiskinan, seperti koordinasi *stakeholders*, mengintegrasikan perencanaan, sinkronisasi pelaksanaan dan pengendalian secara sinergis, menjalin upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang sistematis,

berkesinambungan dan partisipasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat secara bergandeng tangan serta memfasilitasi pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Perlu dipertegas bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup hanya menjadi perdebatan. Persoalan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi juga tidak cukup hanya menjadi perdebatan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bekerja untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dalam upaya penyelesaiannya, perlu elaborasi pemikiran apakah dengan penyelesaian operasional atau konvensional misalnya melalui kebutuhan bahan pokok, ataupun dengan mengembangkan konsep-konsep baru dalam menangani kemiskinan tersebut.

Harapan besar kini di depan mata. Ketika *step* awal data kependudukan tersedia dengan akurat maka *step* selanjutnya adalah berkonsentrasi untuk mengembangkan upaya-upaya yang menyeluruh dan menjadikannya *crash* program dengan terus menerus melakukan penyempurnaan dalam program-program yang akan dijalankan.

Disisi lain dalam konteks negara, pemerintah saat ini berfokus pada bagaimana investasi di bidang SDM Indonesia dilakukan. Melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN), 20 persen dari total anggaran belanja adalah untuk fungsi pendidikan, dalam rangka meningkatkan SDM. Asumsi SDM yang tinggi berbanding terbalik dengan kemiskinan, misalnya. SDM yang tinggi

berbanding lurus dengan pelayanan, SDM yang tinggi berbanding lurus dengan pembangunan dan semisalnya. Namun rasanya jumlah anggaran bukanlah jawaban dari masalah baik pembangunan SDM, pelayanan maupun kemiskinan melainkan bagaimana anggaran tersebut diarahkan.

Oleh karena itu, di dalam desain yang disebut tantangan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, *human resource*, atau *human capital*, tidak hanya sekedar uang dan *budget* tapi lebih kepada konten dan *direction*. Dengan adanya basis satu data kependudukan yang mampu menjangkau dalam hal penyediaan data dasar kependudukan diharapkan menjadi asa dalam merajut pembangunan hakiki di Indonesia.

Lima hari menjelang Sensus Penduduk 2020

Muhamad Rikiansyah

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Lima hari lagi, 15 Februari 2020, hajatan besar sensus penduduk yang digelar 10 tahun sekali, akan kita mulai. Ini merupakan sensus penduduk ke-7 yang kita lakukan, sejak zaman kemerdekaan.

Bagi mereka yang bergiat dalam statistik kependudukan, tahun 2020 merupakan tahun istimewa. Selain Indonesia, sejumlah negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, juga akan menggelar pendataan penduduk alias “cacah jiwa”, di tahun *twin double digit* ini.

Pendataan penduduk merupakan kegiatan statistik dasar yang dilakukan semua negara. Melalui sensus penduduk, negara memiliki data mengenai jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia. Ini merupakan data dasar yang dibutuhkan bagi perencanaan pembangunan, baik di tingkat negara maupun di wilayah terkecil.

Dengan sensus penduduk, tersedia data kependudukan secara *de facto* dan *de jure*. Untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Presiden (Pilpres), misalnya, diperlukan data *de jure*. Artinya, secara hukum, data penduduk teregistrasi dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), di wilayah mana pun orang itu berada.

Sementara itu, untuk kepentingan perencanaan pembangunan wilayah, misalnya saja perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan, diperlukan data *de facto*, mengikuti “fakta” di mana penduduk itu tinggal pada saat pendataan.

Sensus penduduk juga menyediakan berbagai parameter demografi dan proyeksi penduduk hingga 50 tahun ke depan. Selain bermanfaat bagi perencanaan, hal ini penting bagi evaluasi pembangunan di berbagai bidang.

Apa yang membedakan Sensus Penduduk 2020 dengan sensus sebelumnya? Tahun ini kita memulai satu metode baru, yang disebut metode kombinasi (*combine method*). Ini merupakan gabungan dua metode sensus: pendataan berbasis registrasi kependudukan, dan pendataan konvensional wawancara “*door to door*”.

Metode kombinasi yang akan kita gelar mulai 15 Februari sampai 31 Maret 2020 ini, kita lakukan sesuai rekomendasi dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Metode pendataan berbasis registrasi memungkinkan semua warga negara ikut aktif dalam sensus. Caranya, dengan membuka laman <http://sensus.bps.go.id>, yang bisa diakses mulai 15 Februari. Dalam laman tersebut, masyarakat bisa mengisi data pribadi dan anggota keluarga, sesuai dengan Kartu Keluarga dan catatan administrasi resmi lain, seperti KTP dan Akta Nikah/Cerai.

Setelah login, pada profil masing-masing penduduk akan tampil data sesuai dengan catatan

registrasi penduduk yang pada Ditjen Dukcapil. Data ini tersedia berkat kolaborasi Kemendagri dan BPS.

Penggunaan metode kombinasi dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sudah menjangkau hampir semua lapisan masyarakat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS menunjukkan dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan penggunaan internet: 50,92 persen warga perkotaan dan 26,56 persen penduduk pedesaan berumur lima tahun ke atas, diketahui mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.

Data proyeksi penduduk 2019 BPS juga menunjukkan, 23,77 persen penduduk dari total populasi 268 juta jiwa, merupakan generasi milenial yang diyakini sudah “melek” internet.

Selain itu, sensus konvensional membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu pengolahan. Pergerakan (mobilitas) penduduk yang sangat cepat membuat pendataan *door to door* makin sulit menemui masyarakat secara langsung.

Selain itu, data registrasi kependudukan seiring adanya KTP elektronik dan Kartu Keluarga *Online*, sudah semakin baik. BPS perlu memanfaatkan kelebihan ini untuk efisiensi pelaksanaan sensus.

Metode kombinasi juga dipilih untuk menuju satu data kependudukan Indonesia. Saat ini, setidaknya ada dua data kependudukan yang kerap menjadi polemik. Yang pertama, data kependudukan hasil registrasi Ditjen Dukcapil, dan satu lagi data kependudukan menurut BPS hasil sensus dan proyeksi penduduk.

Harus diakui, dua versi data ini berbeda konsep dalam menentukan seseorang dianggap penduduk atau tidak. Akibatnya, data jumlah penduduk juga berlainan. Sebetulnya kedua data kependudukan ini tidak ada yang keliru, sepanjang keduanya sesuai dengan konsep saat pendataan.

Satu data kependudukan bukan berarti hanya akan ada satu data, melainkan bersepakat menggunakan data yang mana untuk kegiatan apa.

Mengingat pentingnya data kependudukan, masyarakat diharapkan berperan aktif ikut serta dalam kegiatan ini. Sensus Penduduk 2020 terdiri dari dua tahap yaitu Sensus Penduduk *Online* (SPO) yang akan digelar 15 Februari - 31 Maret 2020 dan bagi yang belum berpartisipasi pada SPO, nanti akan didatangi petugas sensus untuk di wawancara pada Juli 2020.

Ayo kita sukseskan Sensus Penduduk 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia. Setidaknya sekali dalam sepuluh tahun kita berkontribusi bagi negara. Setiap penduduk sangat berharga.

Ada SPO di Februari – Maret 2020

Dadan Rukmantara
Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Barangkali sebagian dari kita masih banyak yang belum mengetahui dengan apa yang dimaksud sensus penduduk *Online* (SPO). Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang SPO, ada baiknya kita mengikuti terlebih dahulu tulisan berikut ini.

Pada tahun 2020 ini Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan sebuah perhelatan besar yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahunan, yaitu Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Untuk diketahui, bahwa sensus penduduk tahun 2020 ini adalah yang ketujuh, dimana ada yang berbeda kali ini dalam kegiatannya jika dibanding dengan Sensus Penduduk pada sepuluh tahunan sebelumnya, ada metode baru yang digunakan sesuai dengan salah satu rekomendasi PBB yaitu metode “kombinasi” dimana BPS menggunakan data registrasi yang relevan dengan sensus yang kemudian akan dilengkapi dengan sampel survei pada saat pelaksanaan SP2020. Dalam hal data registrasi ini adalah data administrasi kependudukan dari Ditjen DUKCAPIL sebagai basis data dasar yang digunakannya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk menjadi langkah awal dalam mewujudkan “satu data kependudukan Indonesia” dengan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk Indonesia.

Ada 7 proses bisnis yang dilakukan dalam kegiatan SP2020 ini, mulai dari koordinasi dan konsolidasi, penyiapan basis data dasar, Sensus Penduduk *Online* (SPO), penyusunan daftar penduduk, pemeriksaan daftar penduduk bersama ketua/pengurus SLS, *ground chek/verifikasi* lapangan bersama pengurus SLS sampai dengan pencacahan lapangan.

Memasuki pertengahan bulan februari sampai dengan akhir maret, tepatnya dari 15 februari sampai dengan 31 Maret 2010, memasuki tahapan proses bisnis yang ketiga yaitu kegiatan Sensus Penduduk *Online* (SPO) 2020.

Pada tahapan Sensus Penduduk 2020 *Online* ini diharapkan masyarakat ikut membantu mensukseskan kegiatan SPO 2020 dengan dengan moda pengumpulan data CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*) melalui *gadget* nya masing-masing secara mandiri mencatatkan dirinya diLink <https://sensus.bps.go.id> dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dan selanjutnya akan ada evaluasi berkala Sensus Penduduk *Online*.

Ada beberapa keuntungan dari kegiatan Sensus Penduduk secara *Online* ini, diantaranya mengatasi responden yang tidak “tersentuh” oleh petugas sensus, membangun budaya baru di masyarakat terhadap arti pentingnya data, dimulai dari kepedulian terhadap data pribadinya.

Selain beberapa keuntungan diatas, SPO dilaksanakan berdasarkan di hampir semua Desa di Indonesia sudah tersedia infrastruktur jaringan internet

(sumber: Kemenkominfo dan Kemenkeu) untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses bisnis pengumpulan data disamping mengembangkan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi yang semakin baik.

Bagi masyarakat WNI & WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Seluruh wilayah Indonesia (termasuk Perwakilan RI yang ada di luar negeri/teritorial Indonesia beserta keluarga) yang belum atau tidak sempat melaksanakan pemutakhiran data mandiri Sensus Penduduk *Online* 2020 dengan alasan tertentu tetap akan dicatat pada kegiatan proses bisnis yang ke-7 Pencacahan Lapangan pada 1 sampai dengan 31 Juli 2020 nanti dimana petugas melakukan pencacahan penduduk 2020 secara “*door-to-door*” baik dengan menggunakan CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing* atau *gadget BYOD*) maupun PAPI (*Papper and Pencil Paper Interviewing*).

Satu data kependudukan sangat penting untuk perencanaan dan instrumen evaluasi pembangunan di semua bidang untuk memperkuat kebijakan yang direncanakan sampai dapat dilaksanakan oleh semua pihak.

Mari semua berpartisipasi dalam Sensus Penduduk *Online* dan bekerjasama dalam Sensus Penduduk Wawancara agar berhasil dan mencapai tujuan menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia”

Mari bersama #Mencatat Indonesi.

Manfaat Data Hasil Sensus Penduduk

Nano Suharno

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Persiden Joko Widodo melakukan pencaanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) di Istana Negara Jakarta tanggal 24 Januari 2020. Indonesia tidak sendiri dalam melaksanakan sensus penduduk di Tahun 2020. Ada sekitar 54 negara lainnya yang akan menyelenggarakan sensus penduduk pada periode 2015-2024.

Pemerintah melalui BPS memerlukan kegiatan SP2020 untuk melakukan perekaman langsung data penduduk, menyediakan data jumlah penduduk baik secara *de facto* maupun *de jure*. Juga menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk.

Berbeda dengan sensus penduduk sebelumnya yang menggunakan metoda konvensional. SP2020 menggunakan Metoda Kombinasi (*Combine Method*). BPS menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan Sensus.

SP2020 kali ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap Pertama adalah sensus penduduk secara *Online*. Pada tahap ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung mengisi daftar pertanyaan secara *Online*. Tahap kedua, adalah sensus penduduk wawancara Pada tahap ini, petugas sensus mendatangi masyarakat yang tidak partisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 *Online*.

Satu Data Kependudukan

SP2020 adalah jembatan menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, yaitu sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, Selain Mudah diakses data hasil SP2020 bisa dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu data Indonesia.

Ibarat barang tambang, data merupakan *asset* berharga yang membutuhkan proses yang tidak sederhana agar memiliki nilai (*value*). Dibutuhkan pengelolaan yang profesional, berintegritas dan amanah. Melibatkan sumber daya yang banyak untuk memetakannya menjadi sebuah informasi (*information*) dan pengetahuan (*knowledge*). Ditanam dalam perangkat-perangkat mesin yang cerdas sehingga menghasilkan wawasan (*insight*). Kemudian menjadi landasan pengambilan keputusan strategis (*wisdom*) yang memberikan dampak (*impact*). Salah satu data strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan adalah data penduduk.

Disamping itu, jaminan keamanan data individu juga akan mendukung kesuksesan pelaksanaan SP2020. Jaminan kerahasiaan data individu diatur dalam undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik pasal 21. Disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Juga dijamin melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Manfaat Data Sensus

Menurut Jokowi data merupakan jenis kekayaan yang baru yang merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan negara. Karena itu, data akurat sangat penting dalam menyusun perencanaan untuk membuat keputusan yang tepat dan juga mengeksekusi program yang tepat sasaran. Ungkapan “Siapa pun yang menguasai *big data* akan menjadi pemenang”. Hal tersebut menggambarkan betapa strategisnya data terutama memasuki era revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*.

Dalam pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, manfaat data kependudukan sangat terkait dengan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran pembangunan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum serta pencegahan kriminalitas. Bahkan nantinya hasil SP2020 ini akan sangat bermanfaat untuk membuat perencanaan di berbagai bidang tidak hanya bermanfaat untuk perencanaan masa kini namun juga proyeksi sampai 2050.

Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang menekankan kepada sistem digitalisasi menuju era *big data*. SP2020 memasuki babak baru dari sisi metodologi juga penggunaan perangkat teknologi pengumpulan data. Pada SP2020, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus *Online* dengan moda CAWI (*Computer*

Aided Web Interviewing). Dimana masyarakat diminta mengisi data diri secara mandiri melalui tautan di <https://sensus.bps.go.id>.

Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan fasilitas cek keberadaan melalui laman <https://sensus.bps.go.id/cek> yang dapat dimanfaatkan untuk memeriksa terlebih dahulu keberadaan seseorang di dalam database. Ini akan menentukan apakah yang bersangkutan dapat berpartisipasi di Sensus Penduduk *Online* atau tidak.

Disamping itu, BPS juga menggunakan moda CAPI (*Computer Aided Personal Interviewing*) untuk mewawancarai penduduk yang tidak mengisi sensus *Online*. Penggunaan perangkat ini mampu mempercepat proses pengolahan data. BPS sudah menggunakan moda CAPI pada beberapa penyelenggaraan kegiatan statistik lainnya.

Sensus penduduk *Online* sangat tergantung dari partisipasi aktif masyarakat untuk mengisi data diri secara mandiri. Sensus Penduduk *Online* akan dimulai pada 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Oleh sebab itu, perlu pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat data kependudukan.

BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sekaligus merupakan salah satu produsen data dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. BPS bertugas menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data.

Jokowi berharap seluruh pihak semua, kementerian, lembaga termasuk pemda dan seluruh *stakeholder* bisa ikut menyukseskan SP2020. Sebab menurutnya saat ini data merupakan hal yang paling penting dan berharga untuk melakukan perencanaan dan membuat kebijakan. Komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah dibangun dalam wadah Forum Satu Data Indonesia.

Oleh sebab itu, Sensus Penduduk *Online* 2020 merupakan *moment* bersejarah bagi Indonesia. Sensus penduduk 2020 akan mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia. Mari kita dukung sensus penduduk 2020 dengan cara mengisi data diri secara mandiri pada bulan Februari-Maret 2020, atau menerima kunjungan petugas sensus pada bulan Juli 2020.

Ayo Sukseskan Sensus Penduduk 2020

Perdy Irmawan Prayitno

Statistisi BPS Kota Depok

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menyelenggarakan sensus penduduk (SP) di seluruh wilayah Indonesia. SP 2020 merupakan yang ketujuh kalinya sejak kemerdekaan Indonesia setelah SP 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010.

SP 2020 memiliki perbedaan dengan SP sebelumnya. SP kali ini menggunakan metode kombinasi yang merupakan salah satu rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pelaksanaan sensus. Metode kombinasi adalah metode dengan pemanfaatan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil sebagai data dasar sensus, kemudian dilanjutkan dengan pendataan lengkap.

Metode kombinasi diharapkan menjadi jawaban atas kesimpangsiuran sejumlah data, terutama data kependudukan yang berbeda antar instansi pemerintah. Istilah *de facto* dan *de jure* yang selama ini menjadi "tameng" setiap instansi untuk mempertahankan datanya akan "diharmonisasikan". Harapan besar digantungkan pada SP 2020 untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi bukti keseriusan Presiden untuk "merapikan" data yang ada, sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara optimal.

Perbedaan lainnya terlihat pada waktu pelaksanaannya. Pelaksanaan SP 2020 terbagi menjadi dua

periode. Tanggal 15 Februari hingga 31 Maret untuk periode SP *Online* dan 1-31 Juli untuk periode SP Wawancara. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari keduanya?.

SP Online

SP *Online* merupakan sensus pertama di Indonesia. Sensus ini menawarkan metode pengisian secara mandiri (*self enumeration*) dengan sistem *Online*. Oleh karenanya, sensus ini diperkenalkan kepada publik dengan nama Sensus Penduduk *Online* (SP *Online*).

SP *Online* mengandalkan kemandirian masyarakat untuk meng-*update* data pribadi melalui alamat website "**sensus.bps.go.id**". Dimanapun dan kapanpun masyarakat dapat mengaksesnya, baik dengan menggunakan komputer maupun *smartphone*. Dengan berbagai kemudahan yang disediakan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan SP *Online* akan tinggi.

Faktor kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data menjadi tantangan tersendiri pada pelaksanaan SP *Online*. Upaya membangun kesadaran tersebut bukanlah perkara mudah. Mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa urusan data merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini BPS. Padahal masyarakat juga memegang peranan penting. Renungkan saja, jika masyarakat memberikan informasi atau data yang salah, maka data yang dihasilkan juga tentunya akan salah.

SP *Online* memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengisian data diri secara mandiri setidaknya dapat mengurangi kesalahan pengisian yang dilakukan oleh orang lain. Estimasi pengisian satu jiwa hanya memerlukan 2 menit untuk menjawab 22 pertanyaan yang terbagi dalam 4 kategori, yakni variabel individu, pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Pengisian dapat dilakukan oleh salah satu anggota keluarga untuk mengisi data seluruh anggota keluarga.

BPS melakukan terobosan ini pastinya bukan tanpa alasan. Satu dari sekian alasannya adalah kehadiran SP *Online* dapat menangani responden yang sulit "tersentuh" oleh petugas sensus. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi, terutama di daerah perkotaan terkadang menyulitkan petugas sensus untuk melakukan tugasnya. Ditambah lagi bermunculannya hunian berupa perumahan elit, apartemen, serta kawasan yang sulit ditembus oleh petugas sensus menjadi alasan kuat bagi BPS untuk menyediakan *self enumeration* berbasis *Online*.

Selain itu, tindak kejahatan yang mengatasnamakan petugas sensus dapat dihindari bahkan dihilangkan. Melihat manfaat yang langsung dirasakan, sebaiknya masyarakat tidak berpikir panjang lagi untuk berpartisipasi dalam SP *Online*.

Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk berpartisipasi pada SP *Online*. Sebut saja nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), hingga nomor akta nikah. Sisanya adalah pertanyaan yang akan sangat mudah dijawab oleh masyarakat, Seperti alamat, jenis kelamin, hingga pekerjaan. Pertanyaannya

apakah data pribadi yang diberikan akan terjamin kerahasiaannya?

Masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan data pribadi pada *SP Online*. Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh I Gede Suratha dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Satu Data Indonesia" (13/02/2020), menjamin keamanan data yang digunakan pada *SP 2020* dari gangguan siber karena menggandeng Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

Pada kesempatan yang sama, pihak BPS menambahkan bahwa infrastruktur dan sistem sensus sudah diuji dengan melibatkan sejumlah pihak. Salah satunya bekerjasama negara lain yang telah melaksanakan *SP Online*. BPS sangat percaya diri telah mengadopsi sistem yang andal dan telah memperbaiki yang dirasa lemah.

Selain memiliki manfaat langsung kepada masyarakat, keberhasilan *SP Online* tentunya memberi manfaat bagi pemerintah. Anggaran negara tentunya akan dihemat dan dapat dialihkan untuk kepentingan lainnya. Sudah saatnya sebagai warga negara yang baik, kita ikut berpartisipasi pada *SP Online*.

SP Wawancara

SP wawancara menjadi "penyempurna" dari *SP Online*. Bagi masyarakat yang belum atau tidak sempat berpartisipasi dalam *SP Online* akan didatangi oleh petugas. Pertanyaan yang diajukan sama dengan

pertanyaan yang ada pada website SP *Online*. Menerima petugas dan memberikan jawaban yang jujur dapat membantu program pemerintah dan diri sendiri.

Terkadang agenda besar ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Petugas "palsu" pun bermunculan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, waspada menjadi sangat penting. Kenali dan tanyakan kelengkapan petugas, seperti tanda pengenal hingga surat tugas, agar terhindar dari tindak kejahatan tersebut.

Selain membekali petugas sensus dengan kelengkapan standar, sebenarnya BPS sudah mengantisipasi hal tersebut, dengan merekrut petugas dari wilayah sekitar. Sehingga petugas sensus sudah familiar dengan masyarakat sekitar dan wilayah tugasnya. Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir akan kehadiran petugas sensus.

Disisi lain, begitu pentingnya SP 2020, membuat Presiden Jokowi memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus penduduk, baik SP *Online* maupun SP wawancara.

Semoga dengan kehadiran sosok Presiden, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyukseskan SP 2020, baik secara *Online* maupun wawancara. Keberhasilan mendapatkan data kependudukan yang berkualitas akan terwujud, sehingga program pemerintah ke depannya lebih tepat sasaran dan sesuai yang dibutuhkan.

Pendidikan yang Memerdekakan

Isti Larasati Widiastuty

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Indonesia masih berjuang untuk merdeka dari krisis *Covid-19*. *Covid-19* telah memorakporandakan seluruh sendi kehidupan bangsa. Upaya percepatan pemulihan tercermin dalam postur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2021 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo.

Postur APBN 2021 telah diumumkan Presiden Joko Widodo memiliki tema kebijakan fiskal “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Postur ini tentunya disusun berdasarkan kondisi 2020, di mana Indonesia masih mengalami tekanan akibat *Covid-19*. Total anggaran belanja negara yang dibutuhkan sebagai lokomotif kebangkitan dari krisis *Covid-19* mencapai Rp 2.747,5 triliun.

Walau bangsa ini masih berkuat untuk “sembuh” dari pandemi *Covid-19*, anggaran di bidang kesehatan hanya sekitar 6,2 persen. Namun, anggaran pendidikan tetap dipatok 20 persen. Seperlima anggaran belanja dialokasikan untuk penguatan pendidikan. Mengapa tinggi? Karena Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka kemajuan bangsa.

Maka penguatan pendidikan erat kaitannya dengan upaya mempercepat peningkatan kualitas SDM. Anggaran Pendidikan di 2021 fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

kemampuan adaptasi teknologi, dan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Kemerdekaan Pendidikan

Postur anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan anggaran penanganan kesehatan, semakin memperkuat tesis bahwa Pendidikan adalah pondasi dalam penguatan SDM. Tentunya hal ini juga tak lepas dari komitmen Indonesia dalam pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dimana target 4.1 memastikan bahwa pada 2030 semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Lebih dari satu dekade postur anggaran belanja pendidikan selalu dipatok 20 persen. Harapannya perhatian besar sisi anggaran terhadap sektor pendidikan akan memacu akselerasi peningkatan kualitas SDM bangsa Indonesia. Asa dari SDM berkualitas adalah imbasnya pada meningkatnya kualitas hidup manusia lainnya, baik dari sisi kesehatan, pekerjaan, maupun ekonomi masyarakat.

Faktanya, di tahun 2019 indeks pendidikan sebagai dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) baru mencapai 63,77. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas baru sampai 8,34 tahun. Harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas mencapai 12,95 tahun.

Angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun pun masih di posisi 72,36 persen. Artinya masih ada 27,64 persen penduduk usia SMA yang belum mengenyam pendidikan SMA. Walaupun capaian APS usia SD dan usia SMP lebih dari 95 persen pada 2019.

Memang disadari bahwa membangun kualitas SDM melalui pendidikan tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu proses panjang dan dukungan semua pihak.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menganggarkan 20 persen biaya pendidikan tentu dengan harapan. Ada asa untuk memacu perbaikan kualitas SDM di tengah bayang-bayang *Covid-19*.

Lagi-lagi *Covid-19* sedikit banyak telah mengubah “cara” pembelajaran di Indonesia saat ini. Pandemi *Covid-19* telah mengukir kisah nyata bagaimana guru, murid, dan orang tua perlu beradaptasi.

Semakin berat upaya yang harus dilakukan. Idealnya pendidikan bisa memacu peningkatan kualitas hidup manusia. Merdeka pendidikan tercermin dari kualitas pendidikan dari SDM yang kuat. Kuatnya kualitas pendidikan SDM pada akhirnya akan mampu menjadi daya ungkit bagi peningkatan dimensi lainnya.

Tantangan semakin besar dengan pandemi ini. Hanya dalam satu semester saja *Covid-19* telah meningkatkan jumlah penduduk miskin Indonesia. Banyak tenaga kerja yang “terpaksa” dirumahkan. Ekonomi seketika ambruk ke level minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Upaya apa yang bisa dilakukan? Saleh Abdullah dengan mengutip Ivan Illich pernah menjelaskan bahwa hakikat pembelajaran sebagai hasil dari partisipasi bersama dari suatu proses yang bagus dan tanpa hambatan.

Ya, partisipasi bersama perlu dikuatkan dalam kondisi saat ini. Pandemi *Covid-19* yang *entah* kapan mereda. Vaksin pun masih dalam tahap uji coba. Kiranya tepat mengembalikan kekuatan pendidikan Indonesia pada penguatan pemberdayaan masyarakat. Di tengah keberagaman fasilitas dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan bisa menjadi kekuatan.

Tengoklah bagaimana komunitas-komunitas pendidikan yang selama ini bergerilya memperjuangkan pendidikan. Bagaimana dulu Budi Oetomo berjuang mengusahakan perbaikan pendidikan dan pembelajaran. Lalu komunitas-komunitas Pendidikan yang memajukan pendidikan di pedalaman. Pun komunitas pendidikan yang menggerakkan Pendidikan di kelompok marjinal perkotaan.

Keberhasilan gerakan komunitas ini menjadi *best practice* yang bisa diadaptasi. Gerakan Kembali komunitas pendidikan hingga level terkecil wilayah. Upayakan media pembelajaran berbasis komunitas dengan mengedepankan penguatan keterampilan. Kiranya dengan pendekatan ini dan dukungan penuh dari *stakeholders* pengampu, pendidikan Indonesia secara perlahan bisa lebih menguatkan diri.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, guru, komunitas, maupun masyarakat perlu dikuatkan.

Berbagai pihak bersinergi membangun pendidikan Indonesia. Berjuang bersama meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka, perjuangan membangun pendidikan Indonesia masih panjang. Target terdekat, perlu upaya keras mencapai target *SDGs* pada 2030.

Tanamkan niat kuat untuk membangkitkan pendidikan Indonesia lebih cepat di masa pandemi. Dorong Bersama agar Pendidikan semakin berkualitas. Melalui pendidikan yang berkualitas, SDM Indonesia semakin sehat, maju, mapan, , masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan dan kelaparan. Ekonomi kembali tumbuh, dan Indonesia bisa kembali sejajar dengan negara berpendapatan menengah atas lainnya.

Mari terus berjuang. Bekerja sama agar pendidikan memerdekakan anak-anak bangsa dan Indonesia yang berkemajuan hadir dalam makna sesungguhnya. Terus berupaya agar postur anggaran yang dirancang mampu menciptakan pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan Indonesia.

Di tengah perjuangan melawan *Covid-19*, mari jadikan pendidikan sebagai instrumen yang memerdekakan.

Mengikis Kemiskinan Jawa Barat

Ani Saebani

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat kemiskinan Jawa Barat pada September 2019 sebesar 6,82 persen, berarti terjadi penurunan kembali persentase kemiskinan sebesar 0,09 poin persen dibandingkan posisi Maret 2019 sebesar 6,91 persen.

Berdasarkan jumlah, penduduk miskin pada September 2019 sebesar 3,38 juta orang, mengalami pengurangan mencapai 23,27 ribu orang dibandingkan pada posisi Maret 2019. Atau, selama satu tahun pada periode September 2018 - September 2019 penduduk miskin di Jawa Barat turun cukup signifikan mencapai 163,51 ribu orang.

Disparitas Pembangunan

Keberhasilan Jawa Barat menekan tingkat kemiskinan patut diapresiasi. Namun demikian, perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah mengenai disparitas pembangunan antarkota dan antarkabupaten. Hal ini tercermin sebagian kota dan kabupaten mempunyai tingkat kemiskinan sangat rendah, tetapi sebagian besar kota dan kabupaten tingkat kemiskinan dengan jumlah yang tinggi.

Berdasarkan rilis BPS hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Maret 2019) sampelnya mewakili tingkat kabupaten dan kota, kemiskinan Jawa Barat

periode Maret 2019 sebesar 6,91 persen. Kota Depok memiliki persentase kemiskinan terendah yaitu sebesar 2,07 persen disusul Kota Bandung sebesar 3,38 persen.

Di lain pihak, keberhasilan Kota Depok dan Kota Bandung dalam memberantas angka kemiskinan belum diikuti daerah tetangganya. Hal ini tercatat masih ada 15 kota/kabupaten yang mempunyai persentase kemiskinan lebih besar dari rata-rata kemiskinan induk provinsi Jawa Barat. Bahkan pada Maret 2019 terdapat 5 kota/kabupaten mempunyai persentase kemiskinan lebih besar dari tingkat kemiskinan Indonesia (9,41 persen).

Kota/kabupaten yang mempunyai persentase kemiskinan lebih besar dari rata-rata provinsi Jawa Barat dari yang paling besar adalah Kota Tasikmalaya (11,60 persen), Kabupaten Kuningan (11,41 persen), Kabupaten Indramayu (11,11 persen), Kabupaten Majalengka (10,06 persen) dan Kabupaten Cirebon (9,94 persen).

Selanjutnya Kabupaten Bandung Barat (9,38 persen), Kabupaten Cianjur dengan IPM terendah di Jawa Barat persentase kemiskinan sebesar 9,15 persen. Kabupaten Tasikmalaya (9,12 persen), Kabupaten Sumedang (9,05 persen), Kabupaten Garut (8,98 persen), Kota Cirebon (8,41 persen), Kabupaten Subang (8,12 persen), Kabupaten Pangandaran (7,71 persen), Kabupaten Purwakarta (7,48 persen), Kabupaten Karawang (7,39 persen).

Ekonomi Inklusif berkualitas

Dengan melihat disparitas angka kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat, perlu menekankan

pemerataan pembangunan yang mendukung pemberantasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat secara linier menghilangkan angka kemiskinan. Perlu adanya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pembangunan yang berpihak kepada penduduk miskin.

Seyogyanya hakikat dari pertumbuhan ekonomi sendiri harus dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Maka pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan semata tetapi harus beralih kepada pertumbuhan yang inklusif dan merata ke semua daerah.

Ekonomi berkualitas harus menuju kepada ekonomi berkelanjutan dan inklusif. *Asian Development Bank* (ADB) misalnya, menjelaskan pertumbuhan ekonomi inklusif di topang oleh 3 pilar yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan untuk menciptakan dan memperluas peluang ekonomi; perluasan akses untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan; dan jaring pengaman sosial untuk mencegah kemiskinan yang kronis.

Pembangunan yang mengejar hanya pada pertumbuhan semata adalah pembangunan ekonomi eksklusif, terkadang pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan. Kondisi ini seperti masih tingginya tingkat kemiskinan dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Strategi utama untuk merealisasikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif adalah penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan produktif serta menguntungkan. Kemudian untuk penduduk yang tidak mampu bekerja atau masyarakat yang mendapatkan sedikit manfaat dari hasil pembangunan harus dilindungi dengan jejaring pengamanan sosial yang efektif dan efisien.

Selanjutnya adanya peningkatan pelayanan publik dasar dan mudah di jangkau oleh lapisan masyarakat. Untuk sumber daya manusia (SDM), perlu adanya program pendidikan gratis dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Bahkan akses penduduk miskin terhadap pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian serius. Pemberian beasiswa dan program siswa miskin berprestasi untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi perlu diperhatikan pemerintah daerah dan bebas biaya.

Dalam implementasi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif yaitu dengan menitikberatkan kepada pembangunan ekonomi lokal setempat. Dengan adanya dukungan pemerintah, kemitraan dengan para pengusaha/perusahaan, serta masyarakat sipil setempat.

Dukungan penuh terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya sesuai sumber daya lokal setempat dengan dukungan baik modal, advokasi kebijakan serta pemasaran. Juga tak kalah penting membuka peluang sebesar-besarnya kepada para tenaga kerja milenial seperti lulusan SMA dan SMK untuk mengembangkan potensi lokal untuk dikemas menjadi

produk unggulan sehingga akan terjadi perputaran ekonomi di daerah.

Pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif merupakan ukuran pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai pertumbuhan yang berkualitas. Program kebijakan ekonomi berkelanjutan dan inklusif harus diimplementasikan dengan baik sehingga mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Jawa Barat juara lahir batin, tercermin dengan tingkat kemiskinan yang rendah bahkan mendekati *zero foverty* yang merupakan cita-cita dari pembangunan berkelanjutan bagi semua penduduk terlaksana dan sukses. Semoga Jabar berhasil mengikis kemiskinan.

Sensus Penduduk dan Era Digital

Nano Suharno

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Tulisan Ismatillah A. Nu'ad (Peneliti *Indonesian Institute for Social Research and Development*) di *Pikiran Rakyat*, 19 Februari 2020 halaman 14, diantaranya “BPS menggunakan metode sensus melalui *system Online*. Lembaga survei tertentu mempertanyakan metode *Online* ini karena menganggap masyarakat lebih senang didatangi petugas untuk disensus ketimbang harus mengisi data langsung melalui *system Online*. Lagi pula, belum sepenuhnya masyarakat kita sudah melek *Online*”.

Untuk lebih meluruskan sekaligus mengedukasi bersama ini disampaikan bahwa Sensus Penduduk (SP2020) menggunakan Metoda Kombinasi. BPS menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan Sensus.

SP2020 yang lengkap dilakukan dengan 2 tahap. **Tahap pertama** adalah sensus penduduk secara *Online* (SP *Online*). Pada tahap ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung mengisi daftar pertanyaan secara *Online*. **Tahap kedua** adalah sensus penduduk wawancara (SP Wawancara). Pada tahap ini, petugas sensus mendatangi masyarakat yang tidak partisipasi dalam SP2020-*Online*.

Seiring dengan era revolusi industri 4.0 yang menekankan kepada sistem digitalisasi menuju *era big data*. SP2020 memasuki babak baru dari sisi metodologi juga

penggunaan perangkat teknologi pengumpulan data. Pada SP2020, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus *Online* dengan moda CAWI (*Computer Aided Web Interviewing*). Dimana masyarakat diminta mengisi data diri secara mandiri melalui tautan sensus.bps.go.id.

Disamping itu, BPS juga menggunakan moda CAPI (*Computer Aided Personal Interviewing*) untuk mewawancarai penduduk yang tidak mengisi sensus *Online*. Baik SP *Online* maupun SP Wawancara hanya ada 22 pertanyaan yang disebut *short-form*. Penggunaan perangkat ini mampu mempercepat proses pengolahan data. BPS sudah menggunakan moda CAPI pada beberapa penyelenggaraan kegiatan statistik lainnya. Sementara yang karakteristiknya jauh lebih lengkap lagi, yaitu ada 82 pertanyaan (*long-form*) dipakai untuk SP2020 lanjutan pada 2021, tetapi hanya sampel.

Memang untuk SP *Online* sangat tergantung dari partisipasi aktif masyarakat untuk mengisi data diri secara mandiri. Presiden Jokowi berharap seluruh pihak, semua kementerian, lembaga termasuk pemda dan seluruh *stakeholder* bisa ikut menyukseskan SP2020. Sebab menurutnya saat ini data merupakan hal yang paling penting dan berharga untuk melakukan perencanaan dan membuat kebijakan. Oleh sebab itu, perlu pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat data kependudukan.

Peran Millennial

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, dari 49,32 juta penduduk Jawa Barat, sekitar 33 juta

adalah penduduk usia 15–64 tahun. Artinya sekitar 66 persen lebih penduduk Jawa Barat adalah “usia produktif” yang merupakan usia yang masih bisa aktif bekerja dan melakukan aktifitas produktif. Dimana hampir 35 persennya penduduk Jawa Barat merupakan penduduk muda yang berusia 15-34 tahun. Mereka merupakan penduduk yang lahir antara tahun 1980-an sampai 2000-an yang kemudian dikenal sebagai “Generasi Millennial” atau Generasi Y.

Adanya generasi millennial yang mendominasi penduduk di Jawa Barat ini, diharapkan menjadi faktor penting bagi kemajuan Jabar. Generasi millennial memiliki karakter tersendiri, dari mulai cara bekerja dan sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi masalah, dan tentunya diharapkan akan menghasilkan karya dengan cara yang berbeda.

Peran generasi millennial sangat strategis dalam mendukung dan mensukseskan SP2020. Generasi yang berkembang di era digital, *high technology*, dan tidak bisa lepas dalam kesehariannya dengan berbagai perangkat digital atau *platform Online*, akan menjadi “agen” dalam mensosialisasikan dan mensukseskan SP2020. Bahkan, mereka pun bisa menjadi “guru/tutorial” bagi para orangtua, nenek/kakek, kakak dan saudara lainnya yang gagap teknologi.

Kelompok sasaran utama SP *Online* adalah: ASN, Pelajar/Mahasiswa, Pejabat-publik, dan masyarakat melek digital lainnya. Dengan SP *Online*, masyarakat dapat mengisinya kapan dan dimana saja secara *Online*. Makanya BPS Jabar gencar melakukan sosialisasi dan ngisi

bareng (Ngibar) di dinas/instansi, sekolah/kampus, dan lain-lain. Apalagi Jabar memiliki program Desa digital, sapa warga, dan lain-lain.

Beberapa masyarakat yang antusias dalam mengisi SP *Online*, seperti Toman Sitompul, yang tergopoh-gopoh mendatangi Kantor BPS Provinsi Jabar. Singkat cerita, Toman yang sudah mengisi SP *Online* kebingungan bagaimana bisa mendapatkan tanda bukti bahwa sudah berpartisipasi. Petugas *Call-Center* menyampaikan bahwa jika sudah mengisi SP *Online* maka tidak akan didatangi lagi oleh petugas. Warga lainnya adalah Sareat, pensiunan, warga Melong RT 01/02 No. 59, Cimahi Selatan yang kasusnya hamper sama. Cerita diatas adalah beberapa kisah masyarakat yang antusias mengisi SP *Online*.

Manfaat Data Sensus

Menurut Jokowi data merupakan jenis kekayaan yang baru yang merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan negara. Karena itu, data akurat sangat penting dalam menyusun perencanaan untuk membuat keputusan yang tepat dan juga mengeksekusi program yang tepat sasaran. Ungkapan “Siapa pun yang menguasai *big data* akan menjadi pemenang”. Hal tersebut menggambarkan betapa strategisnya data dalam memasuki era revolusi industri 4.0.

Manfaat data kependudukan sangat terkait dengan pelayanan publik, perencanaan alokasi anggaran pembangunan, demokrasi, penegakan hukum serta pencegahan kriminalitas. Bahkannsangat bermanfaat

untuk membuat perencanaan di berbagai bidang baik perencanaan masa kini maupun proyeksi sampai 2050.

SP *Online* merupakan *moment* bersejarah dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan. Mari dukung SP2020 dengan cara mengisi SP *Online* pada Februari-Maret 2020, atau menerima kunjungan petugas pada Juli 2020. Secanggih apapun metode yang digunakan tidak akan bermanfaat jika data yang diperoleh tidak akurat. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan partisipasi semua agar SP2020 lancar dan sukses untuk kemajuan bangsa.

SP2020 dan Pentingnya Data

Yayuf Faridah Ibrahim

Fungsional Umum BPS Provinsi Jawa Barat

Kabinet Indonesia Maju berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pertama pada periode pemerintahan 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pembangunan SDM menjadi kunci pembangunan Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan dan kualitas pendidikan rakyat Indonesia. Mencetak SDM berkualitas harus dimulai dari *database* yang berkualitas sebagai peta jalan yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bangsa. Tingkat keberhasilan dari rencana-rencana tersebut sangat ditentukan oleh data yang valid. *If you fail to plan, you plan to fail*. Gagal dalam perencanaan negara besar Indonesia maka sama halnya dengan merencanakan kegagalan untuk kita semua.

Lalu darimana data-data yang digunakan untuk menyusun perencanaan program-program tersebut? SENSUS PENDUDUK jawabannya! Ya. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang akan menjadi hajatan besar Indonesia bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Data kependudukan merupakan hulu dari upaya peningkatan *human capital* dan produktivitas nasional maupun regional. Data sensus penduduk nantinya akan menggambarkan kualitas penduduk Indonesia ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari data yang

dihasilkan tersebut, berbagai program dan kebijakan pemerintah akan dibuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan barang tentu akan bermuara pada pembangunan SDM berkualitas.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan bahwa dunia kerja saat ini tidak hanya bergantung pada sektor yang sudah ada. Namun ke depannya semua akan mengarah pada *big data*. Dulu ada batu bara, pertambangan dan lain sebagainya. Sekarang *the world's most valuable resources* adalah data. Semua bergantung pada data. Sudah tidak relevan bahwa data adalah BPS (Badan Pusat Statistik), atau data hanya untuk pemerintah. Karena data sejatinya adalah untuk kita. Tidak berlebihan jika SP2020 adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Metode SP2020 telah bertransformasi menjadi metode kombinasi yang merupakan transisi dari sensus metode tradisional (1961 - 2010) dengan metode berbasis registrasi (2030). Menggunakan data administrasi kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai basis data dasar pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Sehingga dapat diperoleh informasi keberadaan penduduk baik secara *de facto* (berdasarkan tempat tinggal) maupun *de jure* (berdasarkan KTP). Upaya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sebagai implementasi dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juni 2019.

Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) moda, yaitu CAWI (*Computer Assisted Web Interviewing*), CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*), dan PAPI (*Pencil and Paper Interviewing*). Melalui CAWI (sensus penduduk *Online*) BPS telah memberikan wadah kepada kita untuk dapat berperan aktif secara langsung dalam menyelesaikan SP2020.

SP2020 menjadi sejarah sensus *Online* pertama di Indonesia. BPS menargetkan 22-23 persen penduduk Indonesia dapat berpartisipasi aktif untuk mengisi **Sensus Penduduk (SP) Online**. SP *Online* akan diadakan mulai tanggal **15 Februari sampai dengan 31 Maret 2020**. Rakyat Indonesia dinilai sudah siap untuk melakukan SP *Online*. Literasi masyarakat Indonesia terhadap teknologi informasi semakin baik. Sarana dan prasarana pendukung untuk mengakses internet pun sudah memadai, hampir semua desa di Indonesia sudah tersedia infrastruktur jaringan internet (Sumber: Kemenkominfo & Kemenkeu).

SP *Online* memiliki beberapa keuntungan dibanding sensus tradisional. SP *Online* melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses bisnis pengumpulan data, diharapkan dapat mengatasi responden yang tidak “tersentuh” oleh petugas sensus. Berbagai permasalahan terkait isu privasi yang melibatkan petugas sensus saat mendatangi rumah responden, tidak ada waktu ataupun tidak di tempat saat didatangi petugas sensus, diharapkan dapat diatasi dengan SP *Online* ini. SP *Online* diharapkan menjadi bagian dari proses edukasi masyarakat mengenai pentingnya teknologi. Yang tidak kalah penting adalah membangun budaya baru di masyarakat terhadap arti dan pentingnya data, serta

kepedulian terhadap data, dimulai dengan pengisian sensus secara mandiri.

SP *Online* memberi kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa mengisi datanya sendiri dimana saja dan kapan saja. Hanya dengan empat langkah mudah, SP *Online* dapat diisi oleh seluruh kalangan. Langkah pertama adalah dengan menyiapkan berkas/data yang akan diisikan (meliputi Nomor NIK dan KK, Nomor akta nikah bagi yang sudah menikah, dan alamat domisili hingga tingkat RT dan RW). Kedua, buka laman resmi (*website*) **sensus.bps.go.id** melalui aplikasi *browser* internet pada perangkat telpon genggam, tablet, laptop, atau komputer. Selanjutnya ikuti petunjuk yang ada dan mengisi keterangan kependudukan dan perumahan yang ditanyakan. Terakhir, mengunduh bukti telah berpartisipasi pada SP *Online* pada tampilan halaman terakhir. Sangat mudah, bukan?

Bagi masyarakat yang belum mengisi SP *Online* hingga 31 Maret 2020, maka BPS akan menurunkan 390 ribu petugas sensus ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan **Sensus Penduduk (SP) Wawancara** pada tanggal **1-31 Juli 2020**. Sensus Penduduk akan dilakukan kepada seluruh WNI & WNA yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia, tanpa terkecuali.

Seluruh data yang dikumpulkan oleh BPS dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang. Hal tersebut tertera dalam pasal 21 Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997 yang menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Data yang dihasilkan akan diolah dan disajikan secara agregat. Oleh karena itu,

masyarakat tidak perlu cemas untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Di sisi lain, Pasal 27 Undang-Undang Statistik No. 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik. Jadi, sudah kewajiban kita sebagai bagian dari warga Negara Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020.

Hasil SP2020 memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Perencanaan di segala bidang membutuhkan data penduduk sebagai data dasarnya, diantaranya adalah identifikasi kebutuhan dan kualitas perumahan, perencanaan politik dan keamanan, ketahanan sosial dan budaya, perencanaan jenis transportasi yang dibutuhkan, kebutuhan fasilitas komunikasi, dan masih banyak lagi. Berbagai program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, pemerataan pelayanan pendidikan yang berkualitas, serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Di bidang bisnis dan industri, perencanaan investasi, strategi marketing serta ekspansi produk memerlukan data kependudukan dengan berbagai karakteristiknya.

Kesuksesan SP2020 memerlukan keterlibatan seluruh warga Indonesia. Kesuksesan tersebut dimulai dengan kemauan dan kejujuran kita dalam memberikan data yang sebenar-benarnya. Mari kita mengisi SP *Online* 2020, meluangkan waktu beberapa menit untuk kemajuan Indonesia beberapa tahun ke depan. Jawaban kita adalah cerminan Indonesia. Jawaban kita menjadi dasar penentu program-program dan kebijakan pemerintah ke depan.

Yang hasilnya tentu akan kembali kepada kita, seluruh warga Indonesia.

<https://jabar.bps.go.id>

Sensus Penduduk 2020 : Sensus Penduduk Digital

Rahimin Encu Winarti

Statistisi BPS Kabupaten Majalengka

Siapa yang tidak mengenal *gadget (smartphone)* saat ini, dari mulai anak TK hingga abang becak, semua sibuk dengan *gadget*. Teknologi ini memang mengundang daya tarik yang luar biasa hingga kadang lupa waktu. Kesibukan dan mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan media komunikasi ini cukup banyak dijadikan alternatif, dari mulai belajar, bekerja, belanja hingga berselancar, semuanya cukup dari genggaman tangan.

Menurut Garini dalam Rohman (2017: 27), "*gadget* sebagai perangkat alat elektronik kecil yang memiliki banyak fungsi". *Gadget (smartphone)* memiliki banyak fungsi bagi penggunanya sehingga dinilai lebih memudahkan. Fungsi utama dari kehadiran *gadget* adalah agar memudahkan segala pekerjaan kita. Contohnya seperti kemudahan dalam hal berkomunikasi, mencari informasi atau bahkan aktivitas lainnya. Hal ini tentu saja jika teknologi tersebut digunakan dengan tepat.

Fenomena inilah yang dilirik Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk yang selama ini mengandalkan petugas lapangan untuk mendatangi rumah ke rumah dan mencatatnya dengan kuesioner sepertinya untuk saat ini akan kurang efektif, belum lagi biaya yang dibutuhkan cukup mahal. Untuk Amerika Serikat sendiri yang memiliki sejarah sensus yang cukup panjang yaitu 230 tahun, mulai tahun 2020 untuk

pertama kalinya *United States Census Bureau (USCB)* mendata penduduk secara daring (*Online*). Dimana selama ini mengandalkan pasukan besar petugas sensus yang berkeliling dari rumah ke rumah sambil membawa segepok dokumen yang harus diisi. Akibatnya Sensus Penduduk 2010 di Amerika Serikat menjadi yang termahal dalam sejarah Negara adidaya itu. Biayanya lebih dari US\$ 12 miliar, dan menghabiskan 17 juta peta kertas dan 50 juta lembar kertas untuk kuesioner (Gatra 9 Oktober 2019).

Dengan jumlah penduduk yang semakin besar tentunya dengan metode sensus tradisional memerlukan biaya yang sangat mahal, belum lagi perubahan komunitas yang sangat cepat. Tantangan lainnya adalah adanya Responden *Burden* karena kurang mengetahui ataupun merasakan manfaat langsung dari data yang akan dikumpulkan, sehingga masih sering ditemukan adanya responden yg "Jenuh", "Jengah", "Bosan" dan bahkan menolak. Ditambah dengan kesulitan dalam melakukan pencacahan secara langsung sebagai akibat dari meningkatnya mobilitas penduduk dan adanya kelompok yang sulit dijangkau. Tantangan inilah yang menjadikan Sensus Penduduk 2020 perlu mencari terobosan baru.

Dengan potensi yang kita miliki dari mulai kualitas data register (administrasi kependudukan) yang semakin baik, kemajuan teknologi yang sangat cepat, perbaikan infrastruktur telekomunikasi yang pesat ditambah dengan meningkatnya literasi penggunaan IT di masyarakat, maka sistem daring (*Online*) inilah cara untuk menghemat biaya sensus dengan mengurangi kebutuhan kertas dan petugas lapangan. Dengan hadirnya teknologi informasi ini diharapkan dapat menjembatani kondisi penduduk saat

ini yang memiliki mobilitas tinggi dan cenderung individualis.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus penduduk ke tujuh di Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 1961 dan merupakan sensus terbesar yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata seluruh penduduk Indonesia setiap 10 tahun sekali. Pada sensus penduduk 2020 terdapat perbedaan mendasar dari sensus tahun-tahun sebelumnya. Selama enam kali sensus penduduk sebelumnya yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan terakhir tahun 2010 maka selama itu proses yang dilakukan secara tradisional. Petugas melakukan pengumpulan data dari rumah ke rumah tanpa menggunakan data dasar. Sedangkan pada tahun 2020 menggunakan metode kombinasi yaitu memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Begitupun dalam pengumpulan data pada sensus penduduk sebelumnya hanya menggunakan kuesioner kertas saja. Dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak maka pengumpulan data dengan kertas membutuhkan biaya yang cukup mahal. Oleh sebab itu pada Sensus Penduduk 2020 menggunakan *multimode data collection* dalam pengumpulan data yang terbagi menjadi dua periode yaitu pertama sensus penduduk *Online* (15 Februari - 31 Maret 2020) dan periode kedua sensus penduduk wawancara (1-31 Juli 2020).

Sensus penduduk pada periode yang pertama dilakukan dengan sistem daring (*Online*). Pada periode ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengisi data kependudukan secara mandiri melalui situs *web*

sensus.bps.go.id mulai tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 yang dapat diakses melalui *Gadget/Smartphone/Tablet/Laptop/PC* yang terhubung internet.

Pada periode kedua yaitu bulan Juli 2020, petugas sensus akan mendatangi penduduk yang belum berpartisipasi dalam sensus *Online*. Walaupun didatangi petugas tetapi tetap memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan gadget petugas yang sudah dipasang aplikasi *CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)* yang dibangun BPS. Artinya tidak ada lagi kuesioner yang bertumpuk, dan waktu pengolahanpun semakin pendek sehingga hasilnya lebih cepat bisa diperoleh. Jadi baik periode pertama ataupun periode kedua semuanya memanfaatkan teknologi digital, kecuali wilayah tertentu di wilayah Indonesia Timur yang kondisi infrastruktur telekomunikasi belum memadai maka diakomodir dengan menggunakan kuesioner sehingga dengan berbagai macam moda pengumpulan data ini diharapkan tidak ada satupun alasan untuk tidak terlibat dalam Sensus Penduduk 2020.

Kenapa harus terlibat? Selain untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia, sensus penduduk juga digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Berapa dan dimana sekolah harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan atau penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan dimana rumah sakit harus dibangun? Sensus Penduduk akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan kita semua

berkontribusi di dalamnya. *Online* ataupun Wawancara Partikan Anda Tercatat.

<https://jabar.bps.go.id>

Partisipasi Sensus Penduduk *Online* untuk Perubahan Masa Depan

Endah Mahanani

Statistisi BPS Kabupaten Bogor

Tahun ini negara kita sedang mengadakan kegiatan besar yaitu Sensus Penduduk. Sensus Penduduk tahun 2020 ini merupakan sensus penduduk yang ke 7. Semenjak Indonesia merdeka, Sensus Penduduk sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali dimulai tahun 1961. Kemudian secara berkala dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, hingga terakhir dilaksanakan di tahun 2010. Lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas menyelenggarakan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS dalam menyelenggarakan Sensus Penduduk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta rekomendasi PBB mengenai Sensus Penduduk dan Perumahan Tahun 2020. Sensus Penduduk bertujuan menyediakan data mengenai jumlah penduduk, komposisi, distribusi dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan. Data-data yang dikumpulkan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang dan dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Sehingga diperlukan data yang akurat untuk bisa mengeksekusi program yang tepat sasaran.

Pada Sensus Penduduk 2020 ini, Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk dengan metode

baru yaitu metode kombinasi (*Combine Methods*). Metode kombinasi adalah metode pencacahan menggunakan data administrasi penduduk (*adminduk*) sebagai data dasar, dan juga melakukan wawancara *door to door*. BPS bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (*Dukcapil*), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk menyiapkan data dasar *adminduk* tersebut. Metode ini merupakan inovasi dari pemanfaatan teknologi saat ini, karena dari data *adminduk* tersebut akan dilakukan pendataan penduduk secara lengkap dengan memanfaatkan gadget. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini dilaksanakan 2 tahap, yaitu tahap Sensus Penduduk *Online* (*SP Online*) dan Sensus Penduduk Wawancara (*SP Wawancara*). *SP Online* memberikan keleluasaan bagi penduduk untuk melaksanakan sensus secara mandiri. *SP Online* ini sudah berjalan dari tanggal 15 Februari 2020 kemarin hingga nanti berakhir tanggal 31 Maret 2020. Bagaimana caranya? Pertama-tama agar pengisian *SP Online* dapat lancar, pastikan koneksi internet yang stabil dengan jaringan *LTE* atau *4G* terlebih dahulu, kemudian menggunakan *browser* terupdate seperti *Chrome*, *firefox* dan *Safari*, atau bisa juga menggunakan mode *private* (*Firefox* dan *Safari*) atau mode *incognito* (*Chrome*). Setelah itu baru masuk ke alamat link <https://sensus.bps.go.id> . Setelah berhasil masuk, ikuti instruksi yang ada, dan bisa lanjut untuk mengisi pertanyaan yang tersedia. Bagaimana dengan keamanan datanya? Data penduduk yang dikumpulkan akan dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang statistik. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data pribadinya ke kegiatan Sensus Penduduk ini. Setelah

dilaksanakannya SP *Online*, akan dilanjutkan dengan SP Wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 1-31 Juli 2020. Dalam SP Wawancara ini, BPS akan menerjunkan banyak petugas lapangan yang sudah terlatih untuk melakukan pencacahan lapangan yaitu mendatangi penduduk *door to door* untuk diwawancarai. Pada tahap pencacahan ini, petugas sensus akan mendata penduduk yang belum melakukan SP *Online*. Sebelum pencacahan lapangan dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan daftar penduduk di Ketua SLS (Ketua RT) terlebih dahulu bersama petugas sensus, dan kemudian dilakukan verifikasi lapangan.

Saat ini sebagian negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang diserang wabah Virus Corona atau dikenal dengan *Covid-19*. Virus *Covid-19* ini penyebarannya sangat mudah dan sangat cepat. Berbagai kebijakan sudah dikeluarkan oleh beberapa daerah untuk mencegah semakin luasnya penyebaran wabah *Covid-19* ini. Pemerintah Kabupaten Bogor juga telah mengeluarkan kebijakan untuk merumahkan siswa dan menghimbau untuk menghentikan kegiatan yang bersifat massal. KemenPAN-RB juga mengeluarkan kebijakan memerintahkan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan KemenPAN-RB untuk menetapkan mekanisme bekerja yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) kerja dari rumah. Dihadapkan dengan program pemerintah yang harus tetap berjalan salah satunya Sensus Penduduk ini, yang saat ini sedang berada pada tahap SP *Online*, jumlah partisipan SP *Online* di Kabupaten Bogor terlihat masih sedikit yaitu dibawah 20 persen. BPS Kabupaten Bogor sampai saat ini masih aktif

mensosialisasikan SP *Online*. Bahkan dengan adanya wabah *Covid-19* ini, dimana masyarakat banyak yang melakukan *social distancing* dengan mengisolir diri dalam rumah dan menghindari kontak fisik untuk mengurangi resiko tertular virus, masyarakat diberikan fasilitas keleluasaan untuk mengisikan sendiri data pribadinya, tanpa adanya rasa khawatir. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPS harus semakin massif, walaupun nanti masih akan ada SP Wawancara di Bulan Juli. Momen saat sebagian masyarakat mengisolir diri dalam rumah pasti diikuti dengan peningkatan kuantitas waktu mengakses internet di gawai masing-masing. Dan disini BPS bisa berperan proaktif melalui dunia maya untuk mengajak masyarakat mensukseskan SP *Online* secara optimal.

Sebagai wujud dukungan pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020, Kementerian PAN-RB juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PAN RB No 49/2020 yang mengajak seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan instansi masing-masing untuk berpartisipasi dalam Sensus Penduduk *Online*. Menurut data BPS, melalui publikasi Kabupaten Dalam Angka, jumlah ASN di Kabupaten Bogor ada sebanyak 16.539 orang. Dari sejumlah ASN yang dianggap melek teknologi tersebut diharapkan bisa mendongkrak persentase partisipan SP *Online*. Hal ini tentunya membutuhkan koordinasi intensif dengan setiap Kementerian/Lembaga sehingga nantinya akan sangat berpengaruh dalam suksesnya SP2020. Perlu adanya keterlibatan dari semua pihak dalam pelaksanaan SP2020 ini. Pentingnya pelaksanaan SP *Online* ini selain dapat dilakukan kapan saja secara mandiri secara *Online*, juga dapat sebagai

sarana pembelajaran masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi yang semakin baik. Selain itu, melalui SP *Online* ini juga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti penting data, dimulai dari data pribadinya. Mari berpartisipasi untuk perubahan masa depan.

<https://jabar.bps.go.id>

Indonesia Emas, Generasi Emas

Sarah Nurlaily

Statistisi BPS Kabupaten Bogor

Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah perjuangan panjang dan penuh pengorbanan melawan penindasan penjajah bangsa lain. Pada tahun 2020, umur Indonesia sudah mencapai 75 tahun. Perjuangan tidak lagi melawan penjajah tetapi perjuangan di dalam negara Indonesia sendiri. Melawan radikalisme, terorisme, inteloransi, perbuatan yang dapat merusak generasi penerus bangsa seperti narkoba, penyebaran hoaks, dan lain-lain.

Para generasi penerus bangsa yang mempunyai semangat yang membara, tidak harus lagi berjuang dengan mengangkat senjata seperti dahulu, tetapi mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dapat memilah informasi, selalu belajar dan berinovasi untuk kemajuan bangsa.

Pada tahun 2045 mendatang, Indonesia akan mencapai usia 1 abad. Tersisa 25 tahun lagi dari sekarang. Pada tahun tersebut, Indonesia akan memasuki generasi emas, dimana terjadi bonus demografi dengan struktur populasi 70 persen berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), sedangkan 30 persen lainnya berada pada kelompok usia non produktif (usia lebih dari 64 dan di bawah usia 15 tahun). Berbagai rencana dan kebijakan yang matang perlu disiapkan agar bonus demografi tersebut dapat menjadi peluang Indonesia untuk lebih maju, bukan sebagai beban negara.

Fokus utama menyongsong Indonesia emas adalah pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Bagaimana menjadikan SDM yang lebih berkualitas tetapi mempunyai moral dan etika yang baik. Dengan nilai-nilai keagamaan, tidak ada lagi peribahasa pintar tapi keblinger. Indonesia bukan negara yang sekuler, tetapi semua lini kehidupan diseimbangkan dengan nilai-nilai keagamaan.

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama penentu generasi emas. Pendidikan dapat membuat seseorang untuk berfikir luas, membedakan baik atau buruk berikut resiko yang ditanggung, rasa ingin berkembang dan memperbaiki kualitas hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, penduduk yang berusia 7 tahun, memiliki harapan untuk mengikuti Pendidikan selama 12,95 tahun atau setara Pendidikan SMA sederajat. Ketersediaan sarana Pendidikan sampai ke tingkat Perguruan Tinggi (PT) beserta tenaga pengajar perlu ditambah dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudahan atau akses menuju sarana pendidikan juga perlu diperhatikan. Sedangkan pemerataan pendidikan menjadi hal yang masih sulit diwujudkan. Sarana pendidikan biasanya terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Seharusnya Pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua daerah di Indonesia. Diharapkan kedepannya tidak ada daerah yang tertinggal, dengan pendidikan seseorang dapat memajukan daerahnya sendiri. Hal yang tak kalah pentingnya adalah penguasaan teknologi dan penciptaan teknologi baru. Dengan hadirnya teknologi, semua menjadi efektif dan efisien dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu,

diperlukan pendidikan berbasis dan berorientasi teknologi.

Penentu generasi emas selanjutnya adalah Kesehatan. Seperti pepatah yang mengatakan *Mensana In Corpore Sano* yang artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, begitu pula sebaliknya, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jiwa dan raga merupakan hal yang saling berkaitan.

Salah satu indikator tingkat kesehatan adalah angka harapan hidup. Berdasarkan data BPS, bayi yang lahir pada tahun 2019, memiliki harapan untuk dapat bertahan hidup hingga 71,34 tahun. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan, diperlukan sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang memadai. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan akan kesehatan juga meningkat.

Dunia kesehatan sedang diuji, pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan kehadiran *virus corona*. Virus ini menyebar dengan mudah dan cepat di banyak negara. Pembatasan ruang gerak manusia dan *social distance* menyebabkan kemunduran pada berbagai sektor ekonomi. Indonesia dituntut siap menghadapi situasi ini. Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis yang menjadi lini terdepannya. Di masa yang akan datang, bukan tidak mungkin Indonesia dihadapkan pada situasi yang sesulit ini. Oleh karena itu Indonesia jangan sampai tertinggal pada pengetahuan dan teknologi yang lebih maju guna meningkatkan taraf hidup sehat.

Generasi emas berikutnya harus mampu menjadi generasi *entrepreneur*. Tidak hanya menjadi generasi konsumen tetapi menjadi produsen yang berdaya saing global. Perdagangan yang semakin bebas, memudahkan masuknya barang-barang dari luar negeri dengan kualitas yang lebih baik tetapi dengan harga yang lebih murah. Kedepan, generasi emas harus mampu bersaing menjadi produsen yang berteknologi sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik dengan biaya produksi yang lebih murah. Oleh karena itu dapat mengurangi ketergantungan dengan negara lain.

Semua kebijakan yang diambil didasarkan pada tujuan meningkatkan kemamuran dan taraf hidup masyarakat guna menuju Indonesia maju dan berkeadaban.

Stay At Home, Sebagai Wujud Kepedulian

Sarah Nurlaily

Statistisi BPS Kabupaten Bogor

Wabah virus *corona* telah menjadi pandemi dunia. Apa yang bisa kita lakukan guna memutus rantai penyebaran virus ini? Jawabannya adalah *just stay at home* atau tetap tinggal di rumah. Suatu langkah kecil tapi berarti besar. Kita juga bisa membantu petugas medis sebagai lini terdepan dalam mengobati pasien yang sudah terpapar virus. Ringankan beban mereka dengan tinggal di rumah saja. Tidak perlu keluar rumah bila tidak ada yang *urgent*. Jangan menganggap sepele virus ini, tetapi jangan pula menjadi panik. Pilih informasi yang kita terima dari sumber yang terpercaya dan seimbangkan dengan informasi positif sekaligus menyenangkan guna meningkatkan kesehatan jiwa kita. Jangan lupa kesehatan jiwa juga turut menyumbang tingkat imunitas tubuh. Informasi yang tersebar melalui media sosial, grup *WhatsApp*, televisi (tv), semua yang dibahas, tak lain tak bukan adalah mengenai virus ini. Sebagian orang dapat tetap tenang dan melakukan langkah antisipasi, tetapi sebagian orang lagi dapat merasa takut dan cemas berlebihan. Bila perasaan tersebut telah timbul, maka jauhkan *handphone* dari genggamannya, pindahkan saluran tv ke acara yang menyenangkan atau dengan beristirahat. *Relax* dan ketenangan hati sangat diperlukan saat kondisi seperti ini.

Kegiatan di rumah dapat diisi dengan aktivitas yang menyenangkan seperti menonton film, drama Korea,

bermain bersama keluarga, bersih-bersih rumah, memasak, melakukan hobi, bekerja di rumah (*work from home*), belajar di rumah, dan lain-lain. Tidak hanya berdiam diri dan akhirnya merasa bosan.

Kita perlu belajar dari negara lain yang lebih dahulu terjangkit virus ini, seperti Korea Selatan. Masyarakat disana memiliki disiplin yang tinggi dan aktif memerangi korona. Saat terdapat larangan untuk keluar rumah, mereka patuhi. Jalan-jalan, tempat perbelanjaan, taman, tempat hiburan, fasilitas umum sepi, selalu menjaga kebersihan, dan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan hingga 15.000 tes per hari sehingga dapat memutus rantai penyebaran korona dengan sangat signifikan.

Himbauan *stay at home* juga didukung oleh para pelaku usaha, diantaranya dengan penutupan beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta seperti Plaza Indonesia, Summarecon Mall, Senayan City. Begitu pula dengan daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor ikut menutup pusat perbelanjaan mall sampai dua minggu kedepan. Namun pada beberapa mall, supermarket dan gerai farmasi tetap buka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Alternatif lain yang bisa dilakukan selain pemberlakuan *stay at home*, adalah *lockdown*. Dari sisi ekonomi, *stay at home* merupakan langkah yang lebih baik daripada *lockdown*, karena hanya membatasi pergerakan manusia dan tidak menutup keluar masuk pada suatu kawasan. Namun langkah *stay at home* bukannya tanpa resiko. Beberapa pekerjaan yang sangat berpengaruh dari

langkah ini diantaranya supir angkutan umum, transportasi *Online*, pengusaha restoran, rumah makan, penjaja makanan, hotel, *event organizer*. Omset pekerjaan ini dapat turun secara signifikan. Sedangkan dari sisi kesehatan, langkah *lockdown* merupakan cara terbaik untuk memutus rantai penyebaran, baik *lockdown* pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi dan negara. Pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang sebelum melakukan *lockdown*. Mitigasi resiko dengan solusi-solusinya. Sehingga tetap dapat terjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Patuhi *stay at home* untuk meminimalisir kebijakan *lockdown*. Negara yang telah melakukan *lockdown* seperti China, Filipina, Iran, Italia, Malaysia dan Spanyol. Saat suatu negara merupakan negara kaya dengan ekonomi yang stabil tidak sebesar pengaruhnya dibandingkan negara dengan penduduk yang sangat besar dan berpenghasilan tidak merata.

Pencegahan penyebaran virus korona dapat berhasil dengan dukungan aktif semua lapisan masyarakat. Semoga virus ini cepat menghilang dari muka bumi.

Hari Kesehatan Sedunia dan Angka Kesakitan Cianjur

Rosser Ikhlas

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Ditengah mewabahnya Pandemi Virus *Corona* (*Covid-19*) yang sedang melanda dunia, 7 April 2020 yang lalu merupakan peringatan Hari kesehatan sedunia (*World Health Day*). Peringatan hari tersebut juga dilakukan untuk menandai didirikannya organisasi kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1948. WHO selalu mengangkat tema-tema tertentu setiap tahunnya dalam peringatan Hari Kesehatan Sedunia yang sesuai dengan tujuan organisasi WHO, yakni untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat di seluruh dunia. Hari Kesehatan Sedunia tahun ini mengusung tema "*Support Nurses and Midwives*", didedikasikan untuk mengapresiasi kerja-kerja tenaga medis, khususnya perawat dan bidan. Perawat dan bidan merupakan garda terdepan *Covid-19* dan rela menempatkan kesehatan mereka sendiri dalam resiko untuk melindungi masyarakat luas.

Situasi ini mengingatkan masyarakat dunia betapa sangat pentingnya untuk menjaga kesehatan, penyebaran penularan virus yang sangat cepat menyerang negara maju, negara berkembang, kota besar, kota penyangga ibukota, hingga bisa saja sampai pelosok desa. Seringkali penyebab utama dari kondisi kesehatan yang buruk adalah penyakit akibat bakteri/virus, kurang istirahat, pola makan yang buruk, kurang menjaga kebersihan dan

lain – lain. Padahal kita paham dan tahu akan manfaat dari hidup sehat. Tubuh akan lebih kebal terhadap serangan penyakit dan lebih mudah dalam menjalani aktivitas. Dengan kondisi kesehatan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pun akan menjadi lebih maksimal dan memberi hasil yang lebih baik. Kesehatan yang baik juga dapat membuat hidup menjadi lebih bahagia. Bahkan dalam ajaran islam, kita diajarkan untuk tidak hanya menjaga kesehatan jasmani/fisik saja. Tetapi juga menjaga kesehatan rohaniah dengan menjaga keseimbangan hubungan spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta yang diwujudkan melalui aktivitas manusia dalam memenuhi semua perintah Allah SWT.

Dalam melihat tingkat kesehatan masyarakat secara umum, salah satunya dapat menggunakan Indikator Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum, yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan

berarti semakin rendah derajat kesehatan dari penduduk pada wilayah tersebut.

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung Angka Kesakitan menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS merupakan salah satu survei yang mengumpulkan informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada maret 2019 total jumlah sampel nasional SUSENAS adalah sebanyak 320.000 rumah tangga, sehingga memungkinkan estimasi hingga level kabupaten/kota. Sementara jumlah sampel SUSENAS Maret 2019 untuk Kabupaten Cianjur adalah sebesar 1.000 rumah tangga yang tersebar di kecamatan-kecamatan wilayah pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Angka Kesakitan Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 adalah sebesar **15,14%**, turun sekitar 3 poin dibandingkan tahun 2018 lalu **18,15%** (*Sumber: Pub. Stat Kesra BPS*). Penurunan angka kesakitan ini dapat diinterpretasikan sebagai suatu keadaan yang semakin membaik di Kabupaten Cianjur, berarti ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dimana persentase penduduk Kabupaten Cianjur yang mengalami keluhan kesahatan terindikasi menurun. Upaya-upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas

Kesehatan, dan *Stakeholder* terkait dalam menyiapkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, serta mengedukasi masyarakat tentang kesehatan perlu kita apresiasi dan terus kita dukung. Penurunan angka kesakitan tahun lalu perlu disikapi dengan peningkatan upaya-upaya *extra* yang optimal, karena di tahun 2020 ini ada situasi luar biasa kasus Pandemi Virus *Corona* (*Covid-19*) yang tentu akan mempengaruhi Angka Kesakitan 2020 nanti apabila tidak tertangani dengan baik.

Terhadap isu tersebut semua pihak bisa ikut berperan aktif dalam membantu pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat, yakni dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga agar tidak terkena dampak penyebaran Virus *Corona* yang sangat cepat penularannya. Sebisa mungkin optimalkan kegiatan dan aktivitas di rumah saja dan selalu membudayakan gaya hidup bersih. Seperti himbauan yang terus digaungkan baik WHO, pemerintah pusat maupun daerah tentang *Work From Home* (WFH), *School From Home* (SFH), cuci tangan sehat, mengurangi interaksi fisik yang dapat mengakibatkan penyebaran Virus *Covid-19*, dan sebagainya. Dalam masa pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah, penggunaan internet/*Online* dalam kehidupan sehari-hari menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya seperti: bekerja, belajar, belanja, rapat, silaturahmi keluarga, dan lain-lain.

Untuk pelayanan publik pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah banyak yang memaksimalkan

layanan secara *Online*, sehingga mengurangi resiko penularan *Covid-19* di masyarakat. Pada kegiatan Sensus 10 tahun sekali, BPS memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi #MencatatIndonesia pada **Sensus Penduduk Online** dengan mengakses situs resmi pemerintah <https://sensus.bps.go.id> yang diperpanjang hingga 29 Mei 2020 nanti. Mari bantu pemerintah dengan tetap sehat, tetap di rumah, dan pastikan anda penduduk Indonesia.

Kado untuk Bumi Dimasa Pandemi

Erlina Hardiyanti

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Hari bumi yang kita peringati setiap tanggal 22 April setiap tahunnya kini terasa berbeda. Mengapa? Karena hari bumi kali ini diperingati ditengah pandemi *Covid-19*. Data dari *Worldometers* per tanggal 28 April 2020 jam 03:14 GMT, jumlah kasus positif *Covid-19* yang terjadi di dunia menembus angka 3 juta pasien, dengan total kematian 211.609 dan kesembuhan 922.397. Data dari *Covid19.go.id*, di Indonesia jumlah pasien positif *Covid-19* dari menembus angka 9.000 pasien. Total pasien sembuh 12,65%, sedangkan kematian yang terjadi sebesar 8,41%. Jumlah tersebut tersebar di 288 kabupaten/kota pada 34 propinsi.

Adanya pandemi *Covid-19* memaksa para penduduk bumi untuk mengurangi segala aktivitas di luar rumah. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah pun dilakukan di rumah saja. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Dengan dilakukannya segala aktivitas dari rumah saja, tentu sangat membantu bumi mengurangi tingkat polusi dan emisi global yang terjadi karena banyak aktivitas produksi dari berbagai industri yang dihentikan selama pandemi *Covid-19*. Selain itu, juga disebabkan oleh penurunan penggunaan kendaraan baik pribadi maupun umum.

Kita bisa memberi kado lebih untuk bumi tercinta dengan tetap di rumah saja. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah belajar menerapkan *Zero Waste Lifestyle*

dalam kehidupan sehari-hari. Dari buku “Menuju Rumah Minim Sampah” karya DK Wardani dijelaskan bahwa *Zero Waste* adalah gaya hidup positif yang meminimalkan penggunaan bahan yang mencemari lingkungan dan menolak pemakaian bahan sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari.

Memulai *Zero Waste Lifestyle*, berarti kita ditantang untuk mengevaluasi gaya hidup yang selama ini kita jalani. Melihat yang kita konsumsi memberikan dampak yang bagaimana untuk lingkungan, positif atau sebaliknya. Bea Johnson dari *Zero Waste Home* mengenalkan pada dunia tentang 5R, yaitu *Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot* (Menolak, Mengurangi, Menggunakan Kembali, Daur Ulang, Membusukkan).

Di Indonesia, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyebutkan bahwa jumlah timbulan sampah secara nasional sebesar 175.000 ton per hari atau setara 64 juta ton per tahun. Asumsinya bahwa setiap orang menghasilkan sampah per hari sebesar 0,7 kg. Jenis sampah yang paling dominan adalah sampah sisa makanan dan sisa tumbuhan (sampah organik) sebesar 50%, sampah plastik sebesar 15%, sampah kertas sebesar 10% dan sisanya adalah logam, karet, kain, kaca, dan lain-lain. Sampah-sampah tersebut bersumber dari 48% rumah tangga, 24% pasar tradisional, 9% kawasan komersial, dan sisanya dari fasilitas publik, sekolah, kantor, jalan, dan sebagainya.

Selama kita menjalani segala aktivitas di rumah, mungkin kita bisa evaluasi diri bagaimana kita mengelola sampah selama ini. Sampah sisa sayur dan buah yang kita

hasilkan bisa diolah untuk dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Pupuk yang kita hasilkan ini, bisa kita gunakan untuk menyuburkan berbagai tanaman disekitar kita. Tentunya ini bisa menjadi kado untuk bumi kita karena dengan tanaman yang subur dan menghijau akan memberikan oksigen dan udara yang bersih bagi bumi.

Sampah-sampah plastik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga juga bisa kita daur ulang. Botol plastik bekas minum bisa kita sulap menjadi berbagai macam barang dengan fungsi baru. Misal kita jadikan pot, selain itu botol bisa kita jadikan pajangan dengan cara dilukis, kita buat vas bunga, atau yang lainnya.

Selain *Zero Waste Lifestyle*, kita juga bisa melakukan penghematan air. Hal ini juga merupakan kado untuk bumi kita. Menghemat air, berarti kita gunakan air saat diperlukan saja sehingga cadangan air di bumi kita akan terjaga. Selain itu juga akan mengurangi aliran air kotor ke hilir.

Kado lainnya adalah dengan menghemat penggunaan listrik. Selama kita melakukan aktivitas di rumah saja saat pandemi *Covid-19* ini, kita harus memperhatikan penggunaan listrik sehari-hari. Jangan sampai penggunaan listrik kita menjebol dompet. Menghemat listrik bisa menjaga bumi kita, karena listrik yang kita gunakan masih berasal dari batu bara. Seperti kita ketahui, batu bara adalah salah satu sumber energi yang tidak terbarukan sehingga jumlahnya semakin lama semakin menipis. Menghemat listrik bisa dari hal sederhana misalnya mencabut *charger gadget* jika kita *gadget* kita sudah penuh baterainya. Karena membiarkan

charger gadget tetap menggantung pada sumber listrik akan membuang listrik secara sia-sia. Bayangkan saja jika 269,6 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2020 hasil proyeksi penduduk dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang melakukan hal ini. Berapa banyak listrik yang terbuang percuma. Selain itu, penghematan yang bisa kita lakukan adalah mematikan lampu jika penerangan dari matahari dirasa sudah cukup dan menggunakan peralatan listrik yang hemat energy. Jadi, mari bersama-sama kita berikan kado terindah untuk bumi meski tetap di rumah saja.

Hari Buruh di Tengah Pandemi *Covid-19*

Singgah Satrio Prayogo

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Setiap tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Tak terkecuali di Indonesia, setiap tanggal ini selalu disambut dengan berbagai macam agenda yang diselenggarakan oleh buruh, aksi dan menyampaikan tuntutan-tuntutan selalu menjadi agenda yang tak terlewatkan. Aksi ini selalu dilakukan sebagai pertanda bahwa ada persoalan besar yang dihadapi oleh buruh. Penindasan yang masih mewarnai kehidupan buruh menjadi alasan utama aksi turun ke jalan masih terus dilakukan, kehendak dan tuntutan hidup layak masih terus didengungkan. Perjuangan untuk mencapai hidup sejahtera tak pernah ditinggalkan.

Berbicara soal buruh hingga detik ini masih menjadi isu hangat serta seksi untuk diperbincangkan. Seolah menjadi objek kajian yang tak akan pernah selesai untuk dianalisis, ditelanjangi dan dikuliti sepanjang masa. Di satu sisi, buruh juga sering menjadi objek jualan partai politik karena ia adalah sumber devisa perekonomian nasional. Di sisi lain, nasib mereka sama sekali luput dari perhatian pemerintah.

Jika kita tela'ah lebih dalam lagi, kaum buruh, sesungguhnya memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan devisa untuk negara. Mereka adalah penggerak ekonomi negara, disamping sebagai pelaku primer dalam membangun peradaban bangsa. Dengan jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar diseluruh

pelosok negeri ini, kaum buruh pula merupakan kekuatan utama dalam menentukan wajah masyarakat Indonesia secara umum.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode tahun Agustus 2015 – Agustus 2019 jumlah penduduk yang bekerja terus mengalami kenaikan, dari 114,82 juta orang ditahun Agustus 2015 hingga mencapai 126,51 juta orang di Agustus 2019. Apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2018, jumlah penduduk bekerja bertambah 2,50 juta orang atau naik 2,02 persen. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja pada Agustus tahun 2019 sebanyak 133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang di banding Agustus 2018. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 67,49 persen, meningkat 0,23 persen dibandingkan Agustus 2018. Dengan meningkatnya TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja yang juga meningkat.

Seperti agenda tahun sebelumnya, tepatnya setiap tanggal 1 Mei biasanya akan tampak buruh turun ke jalan guna menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka yang belum juga dirasakan adil. Akan tetapi, untuk saat ini keadaan tersebut kemungkinan tidak akan terlihat, mengingat ada nya musibah pandemi *Covid-19* yang menyerang hampir seluruh dunia. Pemerintah sudah menginstruksikan untuk melarang setiap buruh turun ke jalan seperti yang mereka biasa lakukan tahun sebelumnya, karena dikhawatirkan akan berdampak meluasnya penyebaran virus *corona*. Apalagi beberapa wilayah sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) sehingga akan membuat buruh mendapatkan surat teguran apabila melanggar aturan tersebut.

Dampak dari pandemi *Covid-19* atau biasa disebut virus *corona* ini mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK mulai menerpa Indonesia. Secara rinci, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja yang dirilis Sabtu, 11 April lalu, jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan, di sektor formal yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Sedangkan sektor informal yang dirumahkan sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap harinya bila masa pandemi *Covid-19* tersebut belum dinyatakan berakhir.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia sedang memiliki trend yang sangat baik, karena dari periode Agustus 2015 sampai Agustus 2019 mengalami penurunan tiap tahunnya. TPT itu sendiri merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tercatat TPT pada Agustus tahun 2015 sebesar 6,18 persen turun hingga 5,28 persen di tahun 2019. Ini artinya apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut hingga beberapa bulan kedepan dan tidak adanya solusi dari pemerintah, maka angka pengangguran akan meningkat secara signifikan, kemungkinan terburuk angka kriminalitas juga ikut meningkat.

Buruh dan Kesejahteraannya

Kesejahteraan buruh merupakan kebutuhan mendasar (*basic need*) yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama atau di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kenyamanan dan ketentraman dengan beragam fasilitas yang disediakan oleh pemilik modal merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diterima buruh. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan buruh indikatornya adalah upah minimum regional (UMR) baik provinsi atau kabupaten/kota.

Pada bulan oktober tahun 2019 melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan, menyebutkan untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2020 menjadi 8,51 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut didasarkan pada data inflasi nasional yang didapatkan mencapai 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen di tahun 2019.

Kenaikan upah tersebut seakan tidak berarti seiring kedatangan pandemi *Covid-19*, para buruh malah mendapatkan pemutusan hubungan kerja alias PHK dari tempat mereka bekerja. Melihat kejadian tersebut, jalan terjal untuk menggapai kesejahteraan bagi para buruh di masa pandemi tersebut tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Idealnya buruh, pemilik modal dan negara bersatu, berdiskusi, mencari solusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh.

Dalam hal ini, buruh tentu ingin meningkatkan taraf kehidupannya ke situasi yang lebih nyaman bukan malah mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari

tempat mereka bekerja. Negara juga mempunyai peranan penting untuk membangkitkan kembali perekonomian yang menurun, serta memikirkan solusi penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Sedangkan untuk pengusaha atau pemilik modal ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari hasil usahanya.

Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu betul-betul mempersiapkan strategi yang tepat dalam rangka mengantisipasi banyaknya pekerja yang mengalami PHK terkait dengan pandemi *Covid-19* yang telah melanda banyak daerah di Tanah Air. Saat ini sudah tampak bantuan-bantuan baik untuk tenaga medis, maupun masyarakat umum yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Bahkan pada awal bulan April, Presiden Joko Widodo berupaya menyelamatkan nasib pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan program Kartu Prakerja. Diharapkan dengan adanya kartu prakerja selain mendapatkan dana bantuan sosial, pekerja juga tetap mengikuti pelatihan secara *Online* untuk peningkatan kualitas pekerja, dan sesuai dengan tujuan awal pemerintah pengguna kartu tersebut.

Dalam semangat *May Day* tahun ini harus menjadikan pemahaman bersama, bahwa begitu banyak persoalan rakyat Indonesia apalagi adanya pandemi *Covid-19*. Tidak hanya bagi buruh, melainkan seluruh rakyat Indonesia harus memahami situasi yang demikian rumit agar terbangun dan tertanam perspektif akan pentingnya kerja pembangunan, perluasan, dan persatuan. Sehingga hal ini dapat menyatukan seluruh gerakan rakyat, dengan menjangkau seluruh sektor yang

ada. Persatuan dari sektor-sektor perjuangan rakyat inilah yang sejatinya memiliki kedudukan dan peranan penting dalam perjuangan, dan akan segera memberikan kemenangan setahap demi setahap bagi rakyat Indonesia menjadi makmur dan sejahtera.

<https://jabar.bps.go.id>

WFH saat Pandemi, Mari Sensus Mandiri, Ditunggu hingga Akhir Mei

Muhamad Sobari

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Sampai dengan hari Jumat, 1 Mei 2020 pukul 23.50 *dashboard* kasus Covid-19 pada *website Covid19.go.id* terkonfirmasi positif di Indonesia menembus angka 10.551 orang, Provinsi DKI mencapai angka 4.175 orang dan di Provinsi Jawa Barat menyentuh angka 1.012 rang. Kasus positif mengalami peningkatan signifikan dari pertama kali ditemukan kasus positif di Indonesia yang juga menjadi kasus positif pertama di Jawa Barat yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus positif di Kota Depok.

Sebagai tanggapan terhadap pandemi ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang merupakan epicentrum seperti wilayah Jabodetabek, wilayah Bandung Raya, Tegal, Surabaya, Sidoarjo Gresik dan kota-kota lain diluar Pulau Jawa. Mayoritas baru kota dan kabupaten yang ada di Pulau Jawa yang diberlakukan PSBB karena memang kasus positif di pulau Jawa mencapai 70% kasus positif yang ada di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga menganjurkan untuk bekerja, sekolah dan beribadah di rumah, melarang masyarakat untuk melakukan mudik dari wilayah epicentrum keluar dari wilayahnya. Bagi yang terpaksa harus keluar dari rumah pemerintah juga menyarankan

untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, tidak menyentuh area wajah jika masih belum mencuci tangan, dan membiasakan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Presiden Jokowi pun optimis wabah *Covid-19* akan mereda pada bulan Juli jika masyarakatnya disiplin, disiplin terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah, hal tersebut disampaikan dalam program Mata Najwa yang tayang pada 22 April malam.

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin baik dalam perkara yang ia sukai atau ia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat” (disebutkan dalam shahih Bukhari dan Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit Radhiyallahu ‘Anhu)

Bagi masyarakat yang sangat terdampak ekonominya akibat wabah *Covid-19* pemerintah khususnya Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan 9 pintu bantuan. Bantuan tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), Kartu Sembako yang disalurkan Kemensos, Kartu Prakerja yang disalurkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Bantuan dari Dana Desa yang disalurkan Kementerian Desa (Kemendes), Bantuan Sosial Presiden bagi masyarakat Jabodetabek yang disalurkan Kemensos, Bantuan Langsung Tunai yang disalurkan Kemensos, Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) yang disalurkan Pemprov Jabar, Bantuan Sosial Kabupaten/Kota Jawa Barat yang disalurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemkot), dan bantuan nasi bungkus yang disalurkan Pemkab/Pemkot. Sembilan pintu bantuan tersebut memiliki jadwal penyaluran yang berbeda-beda dan bagi masyarakat yang

sudah menerima bantuan dari satu pintu tidak akan mendapatkan bantuan dari pintu yang lain.

Kemudian bagi masyarakat Jawa Barat yang tidak terlalu terdampak ekonominya akibat wabah *Covid-19*, membantu masyarakat yang terdampak di lingkungannya secara materi akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena merupakan amal sholeh yang dilipatgandakan pahalanya pada bulan Ramadhan. Bantuan non materi pun bisa dilakukan dengan cara membantu melaporkan kepada Pemprov Jabar melalui aplikasi pikobar jika ada yang belum mendapatkan bantuan di lingkungannya. Namun, jika lama-kelamaan yang tadinya tidak terlalu terdampak menjadi terdampak tidak perlu langsung mengharapkan bantuan pemerintah melalui bantuan social (bansos), seperti yang disarankan oleh Aa Gym, untuk menggunakan tabungan dan *asset* terlebih dahulu untuk keperluan sehari-hari dan tidak bersandar kepada makhluk karena bisa membuat kotor hati dan sakit hati.

Selain itu hal yang dapat dilakukan saat *Work From Home* (WFH) bagi masyarakat yang tidak terdampak ekonominya saat wabah *Covid-19* adalah dengan mendukung program pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu". Salah satu program pemerintah saat ini adalah Sensus Penduduk *Online*. Sensus Penduduk (SP) merupakan pengumpulan data seluruh penduduk yang berada dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk bayi yang baru lahir tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan adalah jumlah, persebaran, jenis kelamin, umur, jumlah tenaga kerja serta perumahan.

SP dilakukan sepuluh tahun sekali, Pada tahun 2020 BPS menggunakan metode kombinasi yaitu memanfaatkan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data dasar. SP2020 terdiri dari 7 tahapan yaitu, Koordinasi dan Konsolidasi, Penyiapan Basis Data Kependudukan, Pendataan Mandiri atau SP *Online*, Penyusunan Daftar Penduduk, Pemeriksaan Daftar Penduduk, Verifikasi/Pengecekan Lapangan, dan Pencacahan Lapangan atau SP Wawancara.

Akibat wabah *Covid-19* demi kesehatan dan keselamatan bersama SP *Online* yang semula dijadwalkan 15 Februari - 31 Maret 2020 kini diperpanjang hingga 29 Mei 2020 dan SP Wawancara yang semula dijadwalkan pada bulan Juli 2020 akan diundur ke bulan September 2020 dengan harapan pada bulan tersebut wabah ini telah berakhir dan keadaan sudah kembali normal sehingga petugas sensus yang mendata dari rumah ke rumah akan diterima oleh masyarakat tanpa kekhawatiran. Walaupun sedang WFH masyarakat tetap bisa berkontribusi terhadap program pemerintah yaitu dengan cara mengisi data keluarga secara mandiri di rumah melalui tautan sensus.bps.go.id dengan menggunakan berbagai perangkat komunikasi seperti *personal computer*, *smartphone*, *laptop*, ataupun *tablet* yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam melakukan pengisiannya masyarakat hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk setiap anggota keluarga. Dokumen yang perlu disiapkan adalah Kartu Keluarga (KK), dokumen pernikahan, dokumen

perceraian dan surat keterangan kematian. Cara pengisian data pada SP *Online* adalah sebagai berikut :

1. Masuk ke laman sensus.bps.go.id jika mengalami kendala gunakan metode *incognito*/mode penyamaran dan coba lagi dengan *browser* yang terupdate;
2. Masukkan NIK dan nomor KK;
3. Isikan kode yang muncul pada *captcha* kemudian klik cek keberadaan;
4. Jika tidak ditemukan maka masyarakat tidak perlu khawatir karena masih bisa berpartisipasi pada SP Wawancara;
5. Jika memiliki pertanyaan terkait SP2020 ada link yang akan diarahkan ke laman sensus.bps.go.id/sp2020/faq/ dan pada menu kontak kami masyarakat bisa menggunakan layanan *chat* interaktif;
6. Apabila baru pertama kali akses buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang diinginkan, setelah itu klik buat *password*. Masukkan kata sandi yang telah dibuat, lalu klik masuk;
7. Baca panduan awal mengenai pengisian sensus, lalu klik mulai mengisi. Ikuti petunjuk dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan sebenar-benarnya;
8. Pada halaman pertama masyarakat diminta mengisi alamat keluarga saat ini dan keterangan tempat tinggal;
9. Setelah itu, diminta menambahkan anggota keluarga baru jika tidak muncul dalam daftar nama anggota keluarga;

10. Kemudian diminta mengisikan data keluarga satu per satu dimulai dari kepala keluarga, pasangan, anak dan anggota keluarga lainnya. Pastikan semua pertanyaan terisi tidak ada yang terlewat;
11. Apabila pada ringkasan pengisian sensus status data sudah *update* untuk seluruh anggota keluarga, klik kirim;
12. Unduh bukti pengisian, jika mengalami kendala bisa kirim NIK dan No. KK melalui *email* ke sp2020@bps.go.id atau melalui layanan *chat* interaktif;
13. Selain layanan *chat* interaktif dan email SP2020 terdapat juga *WhatsApp* call di nomor 0811 851 98 01 s.d 0811 851 98 20 yang bisa dihubungi pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Partisipasi masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat yang sedang WFH ditengah wabah *Covid-19* untuk mengisi SP *Online* merupakan bentuk dukungan yang nyata dari masyarakat terhadap program pemerintah. Terimakasih kepada 6,7 juta warga Jawa Barat atau sebesar 14,86% dari perkiraan total penduduk Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam SP *Online* per tanggal 13 April 2020.

Masa depan Indonesia berada ditangan seluruh penduduknya. Siapapun itu dari Sabang sampai Merauke dapat menentukan masa depan Indonesia karena seluruhnya akan terlibat langsung dalam kegiatan SP2020. Berapa jumlah dan dimana daerah yang harus dibangun sekolah, daerah mana yang harus dibangun fasilitas perumahan, berapa jumlah dan dimana daerah yang harus dibangun rumah sakit, semua pertanyaan tersebut dan masih banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan demi Indonesia yang lebih baik bisa dijawab dengan menggunakan data yang dihasilkan oleh SP2020. Pastikan kita, keluarga kita dan orang-orang disekitar kita berpartisipasi dalam SP2020. Pastikan kita semua tercatat, karena Sensus Penduduk 2020 adalah milik, dari dan untuk seluruh Penduduk Indonesia.

<https://jabar.bps.go.id>

Kemiskinan Dalam Pandemi Corona

Fitria Nur Diana

Statistisi BPS Kabupaten Bekasi

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana kehidupannya selalu bergantung pada peran manusia lain, termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya pandemi virus Corona membawa perubahan besar pada tatanan hubungan antar manusia. Kebijakan #dirumahaja, *social* atau *physical distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan dalam rangka memutus mata rantai virus ini sekaligus meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Kebijakan tersebut diambil tentunya setelah memperhitungkan semua kemungkinan dan *opportunity cost* yang ada. Dalam ekonomi, *opportunity cost* adalah biaya yang muncul akibat memilih sebuah opsi terbaik dari beberapa opsi yang ada. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi virus Corona ini dibayar dengan banyak hal, salah satunya dengan melemahnya laju roda ekonomi.

Pembatasan sosial dan aktifitas produksi yang signifikan di beberapa sektor ekonomi menyebabkan turunnya produktivitas, dan ini akan berdampak *linier* atas pendapatan masyarakat. Hal ini dapat menurunkan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia triwulan I-2020 tumbuh hanya sebesar 2,97 persen (*y-on-y*), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen. Bahkan jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen ($q-to-q$).

Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial dalam rangka pencegahan penyebaran virus *Corona* dalam waktu yang lama tentunya akan berpengaruh negatif pada kestabilan perekonomian rakyat, terutama bagi rumah tangga miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Rumah tangga miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga hampir miskin memiliki pengeluaran per kapita per bulan sebesar garis kemiskinan hingga di bawah 1,2 kali garis kemiskinan. Sedangkan rumah tangga rentan miskin memiliki pengeluaran per kapita per bulan sebesar 1,2 kali garis kemiskinan hingga di bawah 1,6 kali garis kemiskinan.

Pada September 2019, BPS merilis angka kemiskinan sebesar 24,79 juta jiwa atau 9,22 persen dari jumlah penduduk. Sebenarnya angka tersebut menunjukkan tren yang cukup baik, yaitu menurun jika dibandingkan Maret 2019 yang sebanyak 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Ini juga masih lebih baik jika dibandingkan September 2018 yang sebanyak 25,67 juta jiwa atau 9,66 persen. Jika dikonversikan dalam bentuk rumah tangga menurut status kemiskinannya, terdapat 5,41 juta rumah tangga miskin (7,4 persen), 4,63 juta rumah tangga hampir miskin (6,4 persen) dan 11,22 juta rumah tangga rentan miskin (15,5 persen). Pandemi *Corona* berpeluang besar menggoyahkan kondisi ekonomi rumah tangga rentan miskin dan hampir miskin untuk jatuh dalam kategori rumah tangga miskin, sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin.

Hal tersebut diindikasikan oleh beberapa hal, salah satunya dapat dilihat dari pelemahan daya beli masyarakat seiring dengan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dicerminkan dari pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 2,84 persen, melambat dibandingkan dengan triwulan IV-2019 yang sebesar 5,04 persen. Kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki kontribusi tertinggi, yaitu hingga 58,14 persen atas produk domestik bruto.

Melemahnya daya beli masyarakat juga tergambar dari fenomena tren inflasi pada April 2020 yang tidak seperti biasanya. Pada awal Mei 2020, BPS merilis angka inflasi April 2020 hanya sebesar 0,08 persen, bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi Maret 2020 yang sebesar 0,10 persen. Umumnya, angka inflasi menjelang Bulan Ramadhan selalu menunjukkan tren meningkat. Pergerakan inflasi yang melambat ini juga diduga dipengaruhi oleh turunnya daya beli masyarakat yang berakibat pada rendahnya konsumsi. Faktor lain yang dapat melatarbelakangi fenomena ini adalah penurunan permintaan barang dan jasa akibat kebijakan PSBB dan terjaganya pasokan pangan sehingga harga tetap stabil.

Penurunan daya beli masyarakat ini salah satunya didorong oleh adaptasi dunia usaha, mulai dari bentuk penyesuaian upah kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat lesunya kegiatan ekonomi nasional. Data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa hingga 16 April 2020, ada sekitar 229.789 orang pekerja di sektor formal yang di-PHK, dan 1.270.367 orang pekerja

lainnya dirumahkan. Akibatnya, total pekerja di sektor formal yang terdampak pandemik *Corona* ada sekitar 1.500.156 orang dari 83.546 perusahaan. Sementara itu, di sektor informal ada sekitar 443.760 orang pekerja yang dirumahkan dan di-PHK dari 30.794 perusahaan.

Pemerintah menyadari konsekuensi dari kebijakan yang diambilnya. Untuk itu, beberapa langkah strategis berusaha diambil dalam rangka memberikan perlindungan sosial karena dampak pandemik *Corona*. Pemerintah menjabarkan program-program perlindungan sosial yang secara khusus dijalankan tersebut antara lain adalah program keluarga harapan (PKH), program sembako, program subsidi listrik, program kartu pra kerja, bantuan sosial sembako, dan bantuan sosial tunai. Jumlah rumah tangga yang menjadi target total semua program perlindungan sosial ini sebanyak 40 persen rumah tangga dengan status kemiskinan terendah, atau sekitar 27 juta rumah tangga di Indonesia. Data rumah tangga penerima program diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Selain itu, terdapat pula data Non DTKS yang digunakan, yaitu data pelanggan listrik untuk program subsidi listrik dan data dari usulan daerah untuk bantuan sosial tunai di luar Jabodetabek dan bantuan khusus DKI Jakarta.

Program-program perlindungan sosial ini merupakan jaring pengaman sosial yang bertujuan untuk menyokong daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat pandemik *Corona*. Keberadaan jaring pengaman sosial tersebut juga bertujuan menjaga pasokan pangan dan kestabilan harga. Semua bantuan yang diberikan pada intinya bermaksud membantu rumah

tangga miskin, hampir miskin dan rentan miskin untuk menjaga kestabilan perekonomiannya, sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang signifikan di Indonesia. Untuk itu, maka bantuan yang diberikan harus tepat sasaran, sehingga dapat bermanfaat bagi rumah tangga yang sangat membutuhkan. Data rujukan target bantuan idealnya harus terus dimutakhirkan agar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data tersebut perlu dipadupadankan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) *ter-update* dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk memastikan bahwa penduduk tersebut memang ada (bukan nama ganda, sudah meninggal, atau data fiktif). Sinergi antara pemerintah dan masyarakat pun sangat diperlukan agar tujuan pemberian bantuan sosial ke masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat yang memang membutuhkan dapat terselamatkan.

Di sisi lain, pemberian bantuan sosial sebagai dampak pandemik *Corona* ini tentunya memiliki implikasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Besarnya dana yang dibutuhkan memaksa beberapa program pembangunan lain untuk “dihemat”, ditunda, atau bahkan dihentikan. Hal ini tentunya juga bukan hal yang baik bagi masyarakat. Untuk itu, selain *do'a* tentunya usaha bersama perlu terus dilaksanakan agar pandemik *Corona* di Indonesia dapat cepat berlalu. Bersabarlah untuk tetap #dirumahaja dan selalu menjaga kesehatan demi kesejahteraan Indonesia.

Jika Rp. 3,6 T Keuntungan Mitra Kartu Prakerja Sebagian untuk Tes Covid-19

Muhamad Sobari

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Sampai tanggal 11 Mei 2020 berdasarkan data dari Covid19.go.id tercatat ada 14.265 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, 2.881 diantaranya atau 20,19 persen telah dinyatakan sembuh. Menurut data *Worldometer* tingkat pulih Indonesia lebih tinggi dari negara Amerika Serikat yaitu 18,71 persen, Filipina 18,03 persen, Rusia 17,98 persen, bahkan Singapura yang hanya 11,42 persen dari total kasus terkonfirmasi positifnya. Jika dibandingkan dengan 10 negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia tergolong masih rendah, di Pakistan ada 30 Ribu kasus, di Mexico ada 35 Ribu kasus, di Brazil ada 163 Ribu kasus dan di Rusia ada 221 Ribu kasus padahal jumlah penduduk Indonesia lebih besar dibandingkan negara-negara tersebut.

Jika di rata-rata per satu juta penduduk hanya 52 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia, angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina 101, Malaysia 208, Brazil 769, Russia 1.517, dan Amerika Serikat 4.140 orang per satu juta penduduknya. Sampai disini kita seharusnya bangga dengan kebijakan-kebijakan seperti memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah-wilayah yang merupakan *epicentrum*, menganjurkan untuk bekerja, sekolah dan beribadah di

rumah, menyarankan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, tidak menyentuh area wajah jika masih belum mencuci tangan, membiasakan cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, serta melarang masyarakat untuk melakukan mudik dari wilayah *epicentrum* keluar dari wilayahnya mampu mencegah penyebaran *Covid-19*, ternyata cukup mencegah penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Namun ada hal yang sangat memprihatinkan dibalik keberhasilan tersebut, ternyata baru dilakukan 161.351 tes *Covid-19* di Indonesia. Jika di rata-rata per satu juta penduduk hanya 590 penduduk yang dites di Indonesia, jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam yang mencapai angka 36.340, Singapura 30.016, Malaysia 8.395 dan Thailand di angka 3.264. Jika dibandingkan dengan Brunei, Singapura, Malaysia dan Thailand masih bisa dibilang wajar kalau angka Indonesia lebih rendah karena memang penduduk Indonesia jauh lebih besar dan berdasarkan data dari *World Bank* pun, (Produk Domestik Bruto) PDB per kapita Tahun 2018 Indonesia memang lebih rendah dibandingkan empat negara tersebut. Namun, ternyata dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai angka 2.681, Filipina 1.580 bahkan Kamboja dengan 843 dites per satu juta penduduk angka Indonesia masih lebih rendah, padahal PDB per kapita Indonesia lebih besar dari tiga negara tersebut.

Hal tersebut menimbulkan persepsi masyarakat kasus terkonfirmasi positif *Covid-19* di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan negara lain disebabkan karena penduduk yang dites pun masih rendah, padahal

sudah dua bulan sejak kasus positif pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dikhawatirkan tidak akan ada manfaatnya dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* jika data mengenai kasus yang terkonfirmasi positif masih belum menggambarkan kondisi riil di Indonesia. Seperti halnya suatu survei yang mengambil sampel dari populasi, tentu semakin besar jumlah sampel maka hasil survei akan semakin menggambarkan keadaan secara keseluruhan suatu populasi.

Sebenarnya kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang sangat terdampak penghasilannya akibat wabah *Covid-19* melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunas (BLT) dari Dana Desa, Bantuan Sosial (Bansos) Presiden bagi masyarakat Jabodetabek, BLT Kemensos, Bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Bansos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) dinilai sangat membantu masyarakat yang membutuhkan walaupun pada praktiknya terdapat kesalahpahaman dari para Kepala Desa di Jawa Barat mengenai bantuan dari Pemprov yang tidak sesuai dengan data yang mereka ajukan, padahal jika memang masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Pemprov, masyarakat tersebut bisa dibantu dengan BLT Dana Desa sesuai dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020.

Namun ada pula kebijakan pemerintah yang dinilai kurang membantu masyarakat yang sangat terdampak penghasilannya akibat wabah *Covid-19*, yaitu Kartu Prakerja yang disalurkan Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dan *Project Management Office* (PMO). Kebijakan ini dinilai janggal karena pelaksana Kartu Prakerja seharusnya Kementerian Tenaga Kerja bukan Kementerian perekonomian. Kebijakan ini dinilai dipaksakan untuk terlaksana saat negara Indonesia sedang berjuang menghadapi wabah *Covid-19*. Karena kebijakan ini sebenarnya program presiden Jokowi untuk membantu masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan keterampilan yang direncanakan dimulai Januari 2020 namun harus diundur sampai akhirnya program ini dilaksanakan bulan April saat wabah *Covid-19* melanda Indonesia. Sehingga yang semula dianggarkan 10 T Rupiah menjadi 20 T Rupiah dikarenakan program ini “banting setir” yang semula hanya untuk masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi ditambahkan dengan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat wabah *Covid-19*.

Pemerintah melalui Kartu Prakerja mengalokasikan dana 20 Triliun Rupiah dengan rincian biaya pelatihan 5,6 Triliun Rupiah dan dana insentif bagi peserta 13,45 Triliun Rupiah untuk penerima sebanyak 5,6 Juta orang, dana survei 840 Miliar Rupiah untuk lembaga pelatihan serta dana PMO 100 Juta Rupiah. Saat ini sudah dibuka 3 gelombang pendaftaran dimana gelombang 3 telah ditutup pada Kamis 30 April 2020, rencananya pendaftaran Kartu Prakerja dibuka setiap minggu sampai dengan minggu ke 4 Bulan November 2020 akan ada lebih dari 30 gelombang dimana setiap minggunya menerima 164 ribu pelamar. Bagi penulis 13,45 Triliun Rupiah untuk insentif peserta selama 4 bulan tidak menjadi masalah, karena ini sama halnya dengan BLT kepada para

masayarakat yang belum bekerja dan juga masyarakat yang terkena PHK akibat wabah *Covid-19*, namun yang menjadi masalah adalah 5,6 T Rupiah untuk pelatihan, karena bagi penulis pelatihan bukanlah sesuatu yang mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini.

Indef memperkirakan jika dibagi rata delapan mitra Kartu Prakerja yang menyelenggarakan pelatihan akan memperoleh masing-masing sekitar 700 Miliar Rupiah kemudian dikurangi pengeluaran masing-masing mitra bisa mencapai 243 Miliar Rupiah, artinya keuntungan bersih masing-masing mitra bisa 457 Miliar Rupiah. Jika saja masing-masing mitra rela mengurangi keuntungan 125 Miliar Rupiah maka akan tersedia 1 Triliun Rupiah yang bisa dipakai untuk memperbanyak tes *Covid-19* bagi penduduk Indonesia, minimal angka tes per satu juta penduduk tidak jauh dengan angka Thailand jika tidak mampu menyamai Singapura karena memang PDB per kapita Indonesia jauh dari Singapura dan tidak jauh dari Thailand.

Terlaksananya program Kartu Prakerja ditengah wabah *Covid-19* memang terlihat dipaksakan, mumpung masih 3 gelombang, masih belum terlambat bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan Kartu Prakerja khususnya alokasi dana 5,6 Triliun untuk pelatihan, penulis pribadi menilai satu juta rupiah untuk pelatihan secara *Online* masih terlalu mahal apalagi jika video pelatihannya ternyata mirip dengan yang ada di *channel* gratisan. Tidak ada istilah terlanjur direncanakan atau terlanjur dianggarkan, Badan Pusat Statistik (BPS) saja mau tidak mau membatalkan Sensus Penduduk Tatap Muka/SP Wawancara dikarenakan harus efisiensi

anggaran sebesar 3,28 Triliun Rupiah akibat wabah *Covid-19* sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, masa iya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan PMO tidak mau.

<https://jabar.bps.go.id>

Perumahan Cianjur dalam Statistik

Rosser Ikhlas

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Tetap di rumah, *stay at home*, himbauan ini sering kita dengar beberapa waktu terakhir. Bahkan dalam menyambut lebaran pun masyarakat dihimbau untuk tidak mudik dan tetap di rumah. Secara nasional 31,4% rumah tangga di Indonesia pada 2019 masih menempati rumah dengan luas lantai dibawah 50 m². Lalu bagaimana dengan kondisi perumahan di Kabupaten Cianjur dalam statistik?

Setiap tahun jumlah penduduk kian terus meningkat, kebutuhan masyarakat akan perumahan tentu turut meningkat. Belum lagi kehidupan sosial budaya masyarakat Cianjur yang cenderung tidak memilih merantau ke daerah luar Cianjur, atau dengan kata lain tingkat urbanisasi penduduknya rendah. Ditambah pertumbuhan industri yang terus berkembang sehingga dimungkinkan kedepannya buruh-buruh pabrik yang berasal dari daerah semakin banyak yang butuh tempat untuk menetap di sekitar pabrik tempatnya bekerja. Fenomena-fenomena tersebut memberikan sinyal bahwasanya permintaan serta kebutuhan perumahan yang layak huni akan semakin meningkat.

Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi sebuah keluarga untuk tempat berteduh dan bernaung bersama. Keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar ini ditunjukkan melalui Program Satu Juta Rumah (PSR) yang sudah sejak beberapa tahun yang lalu dijalankan

pemerintah. Hal ini mendorong masyarakat yang berkemampuan rendah untuk bisa memiliki rumah sederhana yang layak huni. Bahkan pemerintah juga memberikan subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP), yakni dengan subsidi selisih bunga maupun bantuan uang muka. Program PSR yang awalnya dijadwalkan untuk periode tahun 2015-2019, kembali dilanjutkan pemerintah di tahun 2020 ini. Pertumbuhan pembangunan perumahan begitu terasa di Kabupaten Cianjur dalam lima tahun kebelakang. Banyak lahan yang sebelumnya merupakan lahan tidak produktif, kebun, bahkan sawah berubah menjadi kompleks-kompleks perumahan yang padat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 82,49% bangunan rumah yang ditempati di Kabupaten Cianjur adalah berstatus kepemilikan milik sendiri (*Sumber: Statistik Kesra 2019*). Dalam proses kepemilikan rumah tersebut bisa saja didapatkan melalui pembelian maupun warisan keluarga. Sedangkan sisanya merupakan rumah yang ditempati berstatus kepemilikan sewa, kontrak, rumah dinas, atau lainnya. Melihat pada pertumbuhan industri yang terus berkembang di sisi timur Kabupaten Cianjur seperti Kecamatan Sukaluyu dan Ciranjang, memungkinkan akan meningkatnya rumah kontrakan/kos yang disewakan untuk buruh pabrik yang tersebar di wilayah tersebut.

Keberadaan sebuah rumah tentu tidak cukup hanya teduh dan bisa bernaung, tentu harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung kehidupan yang layak, baik berupa sumber air, sumber penerangan hingga fasilitas untuk buang air besar (BAB). Berdasarkan data Podes 2018

ada sejumlah 221 Desa di Kabupaten Cianjur dari 360 Desa/Kelurahan yang tersebar menggunakan sumur sebagai sumber air minum utama sebagian besar keluarganya, selebihnya menggunakan ledeng, air isi ulang, maupun air kemasan bermerk. Sumur yang merupakan air tanah sudah sepatutnya didukung dengan sanitasi lingkungan yang baik. Salah satunya yaitu dengan pengelolaan limbah rumahtangga agar air tanah yang dijadikan sumber air minum tadi tidak menjadi tercemar. Bagaimana fasilitas buang air besar rumah tangga di Kabupaten Cianjur melalui data statistik?

Terkait fasilitas buang air besar (BAB) secara persentase ada sebanyak 70,04% rumahtangga di Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar/jamban milik sendiri, sisanya menggunakan jamban bersama, umum, dan lainnya. Apabila dilihat dari jenis kloset yang digunakan sebesar 87,42% rumahtangga telah menggunakan jenis leher angsa, yang sudah lebih higienis dibanding cemplung, cubluk, dsb.

Listrik juga merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, PLN sebagai perusahaan negara terus berupaya memaksimalkan pelayanannya bagi masyarakat. Seluruh perumahan baru sudah dilengkapi sumber air dan sumber penerangan/listrik karena merupakan kebutuhan dasar pada saat ini. Kabupaten Cianjur berlokasi di Jawa Barat yang memiliki geografis perbukitan ternyata untuk sumber penerangan sudah sebanyak 99,59% rumahtangga yang menggunakan Listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Pengguna listrik PLN yang dimaksud adalah baik yang memiliki meteran

sendiri maupun yang menumpang pada bangunan lain yang memiliki meteran, atau dikenal dengan istilah *nyolok* dalam bahasa lokal.

Sudah sepatutnya pemerintah dan pengembang berjalan selaras dalam menyediakan bangunan rumah yang humanis bagi masyarakat. Harus diperkuat dengan regulasi yang jelas dan tepat guna, agar pertumbuhan perumahan/pemukiman penduduk tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Kabupaten Cianjur harus memiliki tata kota yang terstruktur dan ramah lingkungan, sehingga jangan sampai lahan-lahan sawah produktif berubah menjadi permukiman penduduk. Permukiman penduduk harus diatur dengan standar layak huni dan juga agar tidak berlokasi pada wilayah rawan bencana maupun berlokasi dekat Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET). Bencana memang tidak bisa dihindari, namun dengan perencanaan tata kota yang tepat tentu resiko korban jiwa bisa kita hindari. Pihak pengembang pun harus bisa menahan diri, tidak hanya untuk meraup keuntungan semata namun juga berupaya menyediakan bangunan rumah yang humanis dan ramah lingkungan.

Tahun ini pemerintah pusat sedang mengumpulkan data kependudukan dan perumahan melalui Sensus Penduduk 2020. Pada kegiatan Sensus 10 tahun sekali tersebut, BPS memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi #MencatatIndonesia pada Sensus Penduduk *Online* dengan mengakses situs resmi pemerintah <https://sensus.bps.go.id> yang akan berakhir pada 29 Mei 2020 nanti. Mari bantu pemerintah dengan tetap di rumah, dan pastikan anda tercatat.

Mengukir Bahagia untuk Lansia

Husni Khamdan Fariz

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Hari Lanjut Usia Nasional (Hari Lansia) merupakan salah satu hari penting di Indonesia. Hari Lansia diperingati setiap tanggal 29 Mei sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Secara resmi pencanangan Hari Lanjut Usia Nasional ditetapkan di Semarang pada 29 Mei 1996. Pencanangan Hari Lansia dilakukan oleh Presiden Soeharto, untuk menghormati jasa Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat yang diusia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, jumlah lansia di Indonesia mencapai 25,64 juta orang atau sekitar 9,60 persen jumlah penduduk. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi bertransisi menuju ke arah penuaan penduduk. Hal ini karena persentase penduduk berusia diatas 60 tahun diatas 7 persen dari keseluruhan penduduk dan akan menjadi negara dengan struktur penduduk tua (*ageing population*) jika sudah berada lebih dari 10 persen.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 mengatur Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mereka para lansia berhak mendapatkan pelayanan keagamaan, pelayanan

kesehatan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Berdasarkan UU ini, penduduk lansia dibagi menjadi dua, yaitu lansia potensial dan tidak potensial. Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa, sedangkan Lansia Tidak Potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Dari data Statistik Penduduk Lanjut Usia Tahun 2019, sebanyak 84,29 persen lansia di Indonesia yang masih bekerja merupakan pekerja informal. Perlu perhatian khusus untuk mereka para lansia pekerja sektor informal karena kebanyakan diantaranya kurang memiliki perlindungan sosial, dasar hukum pekerjaan, ataupun imbalan kerja yang layak. Selain itu, dari seluruh lansia yang bekerja, 74,15 persen memiliki risiko tinggi mengalami kerentanan ekonomi karena tidak memiliki kesempatan kerja yang cukup, perlindungan sosial yang tidak memadai, tidak terpenuhinya hak-hak di tempat kerjanya, serta tidak memiliki kesempatan mengekspresikan pendapat mengenai pekerjaan yang mereka lakukan.

Di Indonesia, berdasarkan *update* data yang dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* per tanggal 20 Mei 2020, sebanyak 43,7 persen kasus kematian pasien *Covid-19* dialami orang berumur di atas 60 tahun. Kelompok usia yang tergolong lansia ini mengalami dampak paling berat dari infeksi virus *Corona*. Penyebab

utamanya adalah sistem imun pada lansia sudah menurun sehingga tidak bisa bekerja maksimal seperti saat masih muda. Disamping itu, banyak lansia yang mempunyai penyakit penyerta seperti jantung, diabetes, asma, kanker, dan lain sebagainya. Salah satu himbauan dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Corona adalah agar masyarakat tetap di rumah saja. Melakukan segala aktifitas dari rumah, dan tidak bepergian jika tidak *urgent*.

Di masa pandemi *Covid-19* yang belum pasti kapan akan berakhir menjadikan kesempatan besar bagi kita untuk memaksimalkan bakti kepada orang tua. Apalagi jika orang tua kita tergolong lansia tidak potensial yang sangat membutuhkan orang lain. Orang tua, ibu dan ayah merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, menjaga, dan merawat serta menjadi madrasah pertama bagi kita. Sejarah mencatat banyak orang hebat yang terlahir dari seorang ibu yang hebat juga. Kita tidak akan menjadi hebat tanpa ada sentuhan darinya. Maka tidak berlebihan jika ada ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan ayah adalah orang yang telah menafkahi, membimbing dan memberi contoh dalam keluarga serta menjadi kepala sekolah dari madrasah pertama kita. Orang tua sejatinya tidak pernah meminta balas jasa kepada kita, anak-anaknya. Jika diminta balas jasanya maka kita tidak akan pernah mampu untuk membalas budi orang tua karena begitu besar jasanya. Disebutkan bahwa satu tarikan nafas saat melahirkan sungguh sulit dibalas anak apalagi ditambah jasa yang lainnya.

Sudah menjadi kewajiban kita untuk memuliakan orang tua, merawat mereka dihari senjanya dengan kelembutan dan penuh kasih sayang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Tidak sedikit dari kita yang tinggal jauh dari orang tua, tak mungkin untuk kita merawat mereka dan berinteraksi secara langsung. Meskipun begitu, kita masih bisa berbakti kepada mereka dengan cara lain. Mereka akan bahagia ketika kita sering menghubungi dan menanyakan keadaan mereka. Selain itu, kita juga bisa memenuhi kebutuhan mereka atau sekadar memberi hadiah yang disenanginya. Yang lebih utama adalah selalu mendo'akan kebaikan untuk mereka. Jika orang tua sudah tiada, akan sulit bagi kita membalas budi baik mereka. Selamat Hari Lansia Nasional Tahun 2020, mari kita ukir bahagia di wajah mereka.

Korona, Fatwa Ulama dan Sensus Penduduk Online

Muhamad Rikiansyah

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Di antara prinsip-prinsip *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* adalah wajibnya taat kepada pemimpin kaum Muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Karena mentaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri di antara kalian." [An-Nisaa: 59].

Saat sekarang ramai wabah korona, anjuran pemerintah untuk "*work from home*", "*school from home*", "*stay at home*"..bahkan shalat fardhu berjamaah saja dianjurkan di rumah. Alhamdulillah masyarakat patuh dan taat walau ada juga yg karena satu dan lain hal tidak bisa sepenuhnya patuh. Tentu saja bukan tanpa alasan mereka tetap harus menjalankan tugas diluar rumah. Selama mereka mematuhi protokol/aturan dari pemerintah untuk menjaga keamanan dari virus mudah-mudahan mereka tetap menjadi bagian masyarakat yang patuh terhadap pemimpin. Wabah korona sudah sangat menyita waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit bahkan ratusan nyawa melayang di Indonesia. Bahkan ribuan orang terdampak, baik itu yang positif korona, pasien dalam perawatan ataupun orang dalam pengawasan di seluruh wilayah Indonesia.

Tanpa mengabaikan usaha dari pemerintah dan masyarakat bahkan tenaga medis yang bertaruh nyawa menangani virus ini. Mari sejenak membahas salah satu perhelatan yang sebetulnya sedang dilaksanakan oleh pemerintah melalui salah satu instansinya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). BPS sedang melaksanakan Sensus Penduduk 2020 yang tahun ini merupakan Sensus Penduduk ke-7 sejak jaman kemerdekaan. Ada hal baru dalam Sensus Penduduk kali ini yaitu digunakannya metode kombinasi. Yaitu melakukan sensus dengan dua metode. Yang pertama menggunakan database kependudukan (*registered based*) dari Dirjen Dukcapil. Yang kedua sensus secara wawancara (*traditional methode*). Dua metode ini dilaksanakan secara berkesinambungan. Sensus dengan database kependudukan diawali dengan Sensus Penduduk Online (SP Online) 15 Februari – 29 Mei 2020. Pada SP Online masyarakat diminta mengisi secara mandiri data diri dan keluarga melalui laman *sensus.bps.go.id*. Laman ini bisa diakses melalui *smartphone* atau juga komputer yang tentu saja harus terkoneksi dengan internet.

Baru berjalan 3 pekan pelaksanaan SP Online terkendala masuknya wabah korona di Indonesia. Tentu saja pemerintah dan masyarakat teralihkan terhadap wabah yang oleh *World Health Organization (WHO)* dinyatakan sebagai Pandemi ini. Di satu sisi menjadi kendala ketika pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) harus gencar mensosialisasikan tentang SP Online kepada masyarakat. Ketika semua perhatian tertuju kepada wabah korona. Tapi di sisi lain bisa dijadikan peluang untuk sosialisasi, menjadi sebuah kampanye untuk

mendukung salah satu kegiatan pemerintah. Bukan berarti tidak peduli terhadap wabah korona tapi setiap kita harus berperan dalam keadaan sesulit apapun dengan kontribusi terbaik.

Pertengahan Maret sampai akhir April ini Pemerintah "merumahkan" atau dengan istilah saat ini "*Work Frome Home*" sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), diikuti dengan sekolah-sekolah dan kampus yang ikut "merumahkan" siswa dan mahasiswanya. Bahkan banyak perusahaan swasta pun ikut libur karena mematuhi anjuran pemerintah untuk "*Stay at Home*" dan "*Social Distancing*" demi mencegah penyebaran wabah *corona*.

Yang paling menarik adalah anjuran untuk beribadah di rumah bagi semua umat beragama. Khususnya bagi umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang anjuran beribadah di rumah khususnya bagi daerah yang disinyalir resiko sebaran wabah nya tinggi. Masjid-masjid bertahap tutup, tidak ada shalat fardhu berjamaah bahkan shalat jumat disarankan untuk diganti shalat dzuhur 4 rakaat di rumah. Walaupun terjadi pro kontra dimana-mana tapi masyarakat lebih banyak patuh terhadap anjuran pemerintah dan fatwa dari MUI ini.

Ini fenomema menarik yang terjadi di era modern saat ini. Ketika masyarakat menggunakan landasan dalil kitab suci nya untuk mentaati pemerintah. Karena dengan begitu kita bisa melihat bagaimana agama itu bisa sejalan dengan aturan pemerintah. Tanpa ada ancaman apapun, masyarakat patuh dengan apa yang disampaikan oleh

pemerintah. Ketaatan terhadap *Ulil Amri* dalam hal ini adalah pemerintah bisa juga diterapkan dalam perhelatan Sensus Penduduk 2020 yang merupakan amanat Undang-Undang No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sebagaimana kita ketahui data kependudukan menjadi data dasar perencanaan pembangunan bagi sebuah negara. Mengingat pembangunan sebuah negara tentu saja dilakukan untuk penduduk di dalamnya. Sensus Penduduk ini nantinya akan menghasilkan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Juga akan tersedianya parameter demografi dan proyeksi penduduk untuk keperluan indikator *SDG's*.

Jika masyarakat dapat secara sukarela mengikuti anjuran pemerintah untuk "*Work Frome Home*", "*School Frome Home*" atau "*Stay at Home*", maka seharusnya masyarakat juga bisa mengikuti ajakan untuk "*Census From Home*". Ketika masyarakat diharuskan diam di rumah maka ada satu aktifitas yang tidak perlu waktu lama tapi bermanfaat bagi negara untuk jangka waktu 10 sampai 25 tahun kedepan. Bahkan aktifitas ini cukup diwakili oleh satu orang saja untuk satu keluarga. Bagi masyarakat yang mempunyai gawai dan terkoneksi internet maka dapat mengikuti Sensus Penduduk *Online* ini. Hanya diperlukan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) sudah cukup untuk masuk ke laman yang sudah disediakan yaitu *sensus.bps.go.id*. Tidak perlu waktu lama, untuk pengisian satu keluarga hanya perlu waktu 10-15 menit saja dengan syarat jika koneksi internet lancar. Mengapa koneksi internet harus lancar? Karena *SP Online* mengakses *server* yang memuat *database* penduduk Indonesia dari Dukcapil

per Juni 2019. Sehingga perlu jaringan dan koneksi yang sangat bagus agar dalam pengisian data tidak terkendala.

Lalu bagaimana dengan penduduk yang tidak memiliki gawai ataupun sulit akses internet? Bagi masyarakat yang tidak terjangkau akses internet dan menemui kesulitan teknis dalam pengisian *SP Online* maka akan di kunjungi pada waktu nya nanti dengan menggunakan mekanisme lain. Maka dari itu bagi masyarakat yang secara koneksi internet tidak memiliki masalah, sudah sepatutnya dapat berpartisipasi dalam *SP Online*. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi mandiri dalam *SP Online* maka tugas pemerintah akan semakin mudah.

Saat ini *SP Online* segera berakhir dengan angka lebih dari 47 juta penduduk yang mencatatkan dirinya pada *sensus.bps.go.id*. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal sunnah mentaati pemerintah sesuai ayat Quran diatas. Dan tentu saja bisa menjadi amal kebaikan yaitu memudahkan banyak pihak khususnya pemerintah dalam merencanakan pembangunan dan kebijakan yang tepat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bersama SP2020 #MencatatIndonesia dari Kita untuk Bangsa

Erlina Hardiyanti

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Sensus penduduk atau cacah jiwa merupakan pendataan penduduk secara menyeluruh yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk dilakukan pertama kali tahun 1961. Tahun 2020 ini, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan perhelatan sensus penduduk yang ke-7.

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju “Satu Data Kependudukan Indonesia”. Selain itu menyediakan parameter demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi), dan mendukung untuk penyusunan proyeksi penduduk serta karakteristik penduduk lainnya.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa data kependudukan yang tersedia sangat beragam dari berbagai sumber. Semua produsen data mengklaim bahwa data penduduk produk mereka adalah yang terbaik dan paling benar. Oleh karena itu, kehadiran SP2020 dengan nuansa baru diharapkan mampu menjadi pengurai benang merah dari permasalahan yang ada. SP2020 bisa mewujudkan “Satu Data Kependudukan Indonesia” yang menjadi pemersatu sumber data kependudukan yang ada di Indonesia dan menjadi rujukan semua pihak. Ini tentunya menjadi hal yang sangat penting, mengingat data

kependudukan dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan diberbagai bidang.

Tahun 2020 ini cukup berbeda dalam pelaksanaan sensus penduduk. Babak baru dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia telah dimulai. Hal ini karena, sensus penduduk dilaksanakan dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap pertama adalah sensus penduduk *Online*, dan tahap kedua adalah sensus penduduk wawancara. Tahun ini untuk pertama kalinya, pelaksanaan sensus penduduk dilaksanakan secara *Online*, berbeda dengan sensus-sensus yang telah dilaksanakan sebelumnya yang hanya dilakukan dengan wawancara saja.

BPS menggunakan metode kombinasi dalam sensus ini yaitu dengan menggunakan basis data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai data dasar dalam pelaksanaan sensus penduduk *Online*. Basis data yang dipakai disini kondisi dibawah tanggal 1 Juli 2019.

Sensus penduduk *Online* berlangsung hingga tanggal 29 Mei 2020 jam 23.59. Awalnya pelaksanaan sensus penduduk *Online* hanya dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020, namun dengan adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia bahkan hampir seluruh penjuru dunia maka dilakukan perpanjangan pelaksanaan sensus penduduk *Online*. Perpanjangan ini merupakan bentuk penyesuaian dengan keadaan saat ini, dimana pemerintah sedang berusaha keras untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*

dengan meminta masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah. Hal ini juga sesuai dengan imbauan pemerintah dan *World Health Organization* (WHO) terkait pencegahan penyebaran *Covid-19* melalui *physical distancing*. Hal ini juga dilaksanakan berdasarkan SK Kepala BNPB No.13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia, yang dilakukan selama 91 hari terhitung dari 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Sedangkan untuk sensus penduduk dengan bertatap muka akan dilaksanakan pada bulan September 2020 dimana semula dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

Sampai tanggal 31 Maret 2020, masyarakat yang telah berpartisipasi dalam sensus penduduk *Online* sebanyak 32,4 juta atau sekitar 12,5 persen . Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari peran serta banyak pihak yang aktif menggaungkan SP2020 hingga ke pelosok Indonesia. Peran para kepala daerah beserta jajarannya dari lapisan teratas hingga terbawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pelaksanaan sensus penduduk *Online*. Kementrian/lembaga dan dinas serta instansi pemerintah maupun swasta lainnya pun turut andil dalam menggerakkan para pegawainya dan seluruh massanya untuk berpartisipasi aktif dalam sensus penduduk *Online*. Tak kalah penting, peran para mitra/relawan yang dengan ikhlas berjuang mensosialisasikan SP2020 ke berbagai kalangan masyarakat juga menjadi salah satu daya ungkit pencapaian sensus penduduk secara *Online*.

Harapan dengan dilakukan perpanjangan ini, semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam sensus penduduk *Online*. Sensus ini bisa diakses melalui laman *sensus.bps.go.id*. Siapkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Akta/Buku Nikah/Cerai bagi yang berstatus menikah atau cerai.

Sensus ini bisa dilakukan dimanapun, bisa dilakukan sambil duduk santai, berdiri ataupun rebahan pilih saja posisi ternyaman dalam pengisian, tentunya dengan catatan terkoneksi dengan internet baik melalui *personal computer, laptop, tablet* maupun *smartphone*. Di Indonesia, berdasarkan data BPS ada sebanyak 39,90 persen penduduk 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2018, dimana pengguna internet lebih banyak penduduk laki-laki yaitu sebanyak 42,31 persen. Informasi yang diisikan pada laman *sensus.bps.go.id* dijamin kerahasiannya oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Jadi, jangan ragu atau takut untuk melakukan sensus penduduk secara *Online*.

Untuk penduduk yang tidak bisa melakukan sensus penduduk secara *Online*, baik karena tidak ada dalam basis data maupun tidak memiliki media untuk melaksanakannya maka akan dilakukan pendataan secara manual dibulan September 2020.

Sensus penduduk sejatinya bukan hanya tanggungjawab para insan BPS saja, namun menjadi tanggungjawab setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Kenapa? Karena setiap penduduk wajib tercatat

dengan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan keadaan. Hal ini akan menghasilkan data yang berkualitas sebagai penentu arah kebijakan pembangunan. Sudah barang tentu dengan data yang berkualitas akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.

Mari bersama menjadi pelaku sejarah untuk Indonesia bukan hanya menjadi penonton atau pendengar saja. Karena sensus penduduk akan ada lagi di tahun 2030 nanti. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Berikan bakti kita untuk bangsa. Mari bersama kita #MencatatIndonesia.

Mudik, Riwayatmu Kini

Muhamad Rikiansyah

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

“Setelah berpuasa satu bulan lamanya. Berzakat Fitrah menurut perintah agama. Kini kita ber Lebaran ber bahagia. Mari kita ber Lebaran bersuka gembira.”

Siapa yang ingat lirik lagu ini? Ini adalah lagu yang melegenda sejak tahun 50-an. Jika Idul Fitri akan tiba maka lagu ini akan menjadi hits dimana-mana.

Idul Fitri atau Lebaran adalah momen yang sangat membahagiakan bagi umat Islam di seluruh dunia. Indonesia adalah negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Di Indonesia, Lebaran menjadi hari raya keagamaan yang bahkan umat beragama lain pun ikut merayakan dan menikmatinya. Karena saat Lebaran pemerintah menetapkan beberapa hari cuti bersama. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam bisa merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halamannya.

Bicara kampung halaman, maka kita akan akrab dengan istilah mudik. Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, mudik berasal dari kata udik yang berarti kampung. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan mudik dengan “ke udik” atau “pulang ke kampung halaman”. Istilah Mudik Lebaran baru berkembang sekitar tahun 1970-an. Saat itu Jakarta sebagai ibukota Indonesia menjadi kota yang berkembang dengan pesat. Semua penduduk dari daerah tentu saja

mendambakan bisa mengadu nasib di Jakarta. Lebih dari 80 persen kaum urban datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Ketika Lebaran tiba biasanya ada libur panjang yang dapat dimanfaatkan untuk pekerja dari daerah untuk pulang kampung.

Walau kemarin sempat terjadi antara kontroversi terkait perbedaan istilah mudik dan pulang kampung. Tapi intinya kembali ke kampung halaman saat merayakan Lebaran sudah menjadi keharusan bagi masyarakat.

Tantangan Pemudik

Mudik bukan suatu perkara mudah. Mudik memerlukan waktu, biaya bahkan tenaga ekstra. Kita simak beberapa tahun ke belakang, jalan tol yang seharusnya bebas hambatan justru malah terjadi kemacetan yang sangat parah. Bahkan tak heran sampai ada korban jiwa akibat kelelahan di perjalanan. Mudik pasti menggunakan moda transportasi. Segala macam moda transportasi digunakan oleh pemudik sesuai kemampuan biaya dan jarak tempuh.

Satu lagi tantangan mudik adalah mahalnya biaya angkutan. Lebaran identik dengan libur panjang. Setiap libur panjang menjadi peluang bagi pengusaha angkutan untuk meraih keuntungan lebih dari biasanya. Pemudik adalah sebuah potensi besar yang menggiurkan. Apalagi pemudik Lebaran biasanya berperilaku lebih konsumtif, karena mereka mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari kantor atau perusahaannya.

Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah penumpang Kereta Api pada Juni 2019 mencapai 8,4 juta penumpang di Pulau Jawa saja. Sementara jumlah penumpang angkutan udara Juni 2019 sebanyak 7,1 juta orang. Artinya dari dua moda transportasi ini saja pemudik 2019 sudah melibatkan lebih dari 15 juta orang. Dan ini belum termasuk ratusan ribu kendaraan yang meninggalkan Jakarta saat arus mudik. Sehingga mudik dipastikan melibatkan puluhan juta orang di Indonesia.

Mudik bukan hal mudah dan murah. Setiap orang atau keluarga rata-rata tidak hanya membawa diri saat mudik. Tapi akan membawa buah tangan untuk keluarga, atau mungkin dalam bentuk uang untuk dibagikan di kampung halaman. Bahkan demi gengsi ada yang sengaja mengkredit mobil baru atau cukup dengan rental mobil. Belum lagi biaya transportasi yang akan mengalami kenaikan saat mudik tiba mau tidak mau harus ditebus dengan tidak murah.

Mudik Yang Tertahan

Tahun ini tradisi mudik sepertinya akan lenyap. Tidak akan ada jalanan macet sampai berhari-hari. Tidak ada penumpukan penumpang di stasiun, bandara dan terminal. Tidak ada pergerakan massa dalam jumlah besar.

Pandemi *Covid-19* telah membuat perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan kita. Kita yang terbiasa bercengkrama dan berkumpul, tiba-tiba harus berusaha menjauh satu sama lain. Bahkan kita dipaksa diam di rumah saja jika tidak ada keperluan mendesak. Mudik yang biasanya melibatkan jutaan orang tentu saja menjadi

potensi penularan virus *Covid-19*. Mengingat orang yang positif terjangkit virus ini bisa sama sekali tanpa gejala. Sehingga dia bisa menjadi *carrier* dan tanpa sadar menularkan ke orang lain. Maka bukan tanpa alasan Pemerintah mengeluarkan larangan mudik khususnya dari dan ke wilayah yang sudah menjadi zona merah. Dan wilayah saat ini yang menjadi *epicentrum Covid-19* adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi ini *notabene* penyumbang pemudik terbesar ke seluruh Indonesia. Dapat dibayangkan jika mudik tahun ini diijinkan maka dikhawatirkan akan terjadi ledakan orang yang terjangkit virus *Covid-19*.

Larangan mudik ditetapkan sejak 24 April hingga 31 Mei 2020. Ini diimplementasikan dengan beberapa aturan diantara Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang melarang mudik untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Aturan dari ini kemudian dilanjutkan dengan penutupan operasional beberapa bandara diantaranya Bandara Soekarno-Hatta yang menutup penerbangan penumpang sejak 26 April hingga 1 Juni 2020. Kemudian PT. Kereta Api juga membatalkan seluruh kereta mudik dan memfasilitasi calon pemudik untuk menukarkan tiket yang sudah dibeli jauh-jauh hari. Di transportasi darat tentu saja tidak mudah bagi pemudik untuk nekat berangkat. Selain menutup operasional bus berjadwal dari kota-kota besar, pemerintah juga melakukan razia di perbatasan antar kota. Pemerintah Daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengadakan *check point* dan razia di titik perbatasan antara kota. Menghalau setiap orang yang berniat mudik dan menyuruh kembali ke rumah. Sehingga

pemudik dengan kendaraan pribadi pun semakin tidak leluasa untuk tetap nekat berangkat ke kampung halaman.

Memang larangan mudik kali ini terkesan kejam. Tapi jika diamati secara seksama memang ini demi kebaikan kita bersama. Bayangkan jika kita tidak sadar membawa virus dan menulari orang terdekat kita di kampung halaman.

Ideal nya memang Pemerintah melakukan *rapid test* bagi setiap pemudik untuk memastikan pemudik bisa pulang ke kampung halaman. Tapi ini tidak mungkin dilakukan mengingat biaya yang cukup mahal untuk satu alat tes. Sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah menahan sementara waktu keinginan mudik. Toh Pemerintah berjanji akan mengganti waktu libur di akhir tahun nanti jika wabah ini selesai.

Mudik memang membawa banyak cerita. Secara nilai ekonomi mudik membawa keuntungan tersendiri. Masyarakat cenderung membelanjakan uangnya secara ekstra menjelang hingga sesudah hari raya Idulfitri. Jika diasumsikan seluruh THR dan gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri dibelanjakan, maka ada 20 triliun rupiah tambahan konsumsi yang masuk ke komponen *Produk Domestik Bruto (PDB)*.

Mari kita menahan diri untuk tidak mudik saat Lebaran kali ini. Tidak mudik. Tidak Mengapa. Tapi jangan lepas silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Dan kalau ada rejeki kirimkan lah uang kepada keluarga untuk sekedar berbagi. Tapi jika pas-pasan mari kita semua berdoa agar wabah ini segera usai dan kita

diberikan rejeki untuk bisa mudik saat akhir tahun dengan nyaman dan aman. *Aamin ya robbal'alamiin.*

<https://jabar.bps.go.id>

Minum Susu, Nutrisi untuk Bangsa

Ida Siti Faridah

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Tidak banyak yang mengetahui jika setiap tanggal 1 Juni merupakan Hari Susu Sedunia (*World Milk Day*) yang diperingati sejak tahun 2001 dan dibentuk oleh *The Food Agriculture Organization (FAO)* dengan tujuan untuk memusatkan perhatian terhadap susu dan menyebarkan kegiatan yang berhubungan dengan susu dan industri susu. Hal ini tidak lain karena susu telah menjadi salah satu asupan tambahan penting di seluruh dunia.

Indonesia sendiri baru ikut serta dalam memperingati Hari Susu Dunia pada tahun 2009. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2182/KPTS/PD.420/5/2009, tanggal 1 Juni juga ditetapkan sebagai Hari Susu Nusantara (HSN) di Indonesia. Hal ini ditetapkan karena melihat konsumsi susu masyarakat Indonesia sangat rendah jika dibandingkan dengan negara - negara di ASEAN.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, konsumsi susu masyarakat Indonesia 16,5 liter per kapita per tahun. Dibandingkan dengan negara - negara tetangga, angka ini masih sangatlah rendah. Brunei Darussalam mencapai 129,1 liter sedangkan Malaysia mencapai 50,9 liter.

Sebetulnya, konsumen susu di Indonesia sudah tidak terbatas dikalangan anak dan balita saja tetapi susu juga sudah banyak dikonsumsi oleh desawa dan lansia. Karena jenis susu sendiri sudah beragam dan dengan semakin

berkembangnya zaman produk-produk olahan susu semakin bervariasi.

Untuk masyarakat kalangan menengah kebawah, susu yang dikonsumsi tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Sebagian besar masyarakat ini lebih memilih produk susu yang lebih terjangkau harganya dan bisa bertahan lama seperti susu kental manis dan susu bubuk. Disamping itu daya tahan susu murni sangat pendek sehingga mudah kadaluarsa. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 70% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah susu kental manis yang mencapai angka 9,31 liter per kapita per tahun, kemudian susu cair pabrikan (UHT) dan susu bubuk yang mencapai angka 2,23 liter per kapita per tahun.

Di Pulau Jawa, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan adanya kenaikan produksi rata-rata 3,34% pada periode 2014 - 2018 dan peningkatan produksi susu di luar Pulau Jawa rata-rata sebesar 7,23% pada periode 1980 - 2018. Dari data ini, Pulau Jawa masih merupakan wilayah terbesar dalam jumlah produksi susu.

Namun pada kenyataannya jumlah populasi sapi perah dan produksi susu belum dapat memenuhi kebutuhan susu secara nasional. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Direktur pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfiani, M. Si pada salah satu media *Online* bahwa produksi susu di tanah air hanya mampu memenuhi 20% kebutuhan masyarakat.

Selama ini, yang menjadi penyebab rendahnya konsumsi susu segar di Indonesia adalah pasokan susu

yang memang kurang. Hal ini terjadi karena kondisi peternakan sapi perah yang masih minim pengelolaan yang belum bisa dilaksanakan dalam skala besar, kurangnya lahan untuk pengembangbiakan dan belum meratanya produksi susu sapi di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat yang sama di kalangan peternak juga dihadapkan dengan rendahnya kemampuan peternak dalam budidaya terutama menyangkut mutu dan kesehatan ternak. Paling mendasar dirasakan peternak adalah sulitnya mendapatkan pakan hijau untuk ternak. Sementara harga jual bahan baku pakan konsentrat juga relatif tinggi.

Berdasarkan data Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), sebanyak 77% kebutuhan susu segar industri pengolahan susu (IPS) dipasok dari produksi peternakan rakyat. Sementara sisanya merupakan produksi perusahaan-perusahaan besar dengan kepemilikan jumlah sapi perah sebanyak 10% dari total populasi yang tercatat. Meski jumlah sapi perah peternakan rakyat lebih banyak, USDA juga mencatat produktivitas sapi perah di peternakan rakyat hanya berkisar 10-11 liter/ekor/hari dengan jarak beranak lebih panjang dibanding sapi perah yang dikembangkan perusahaan besar. Sementara produktivitas sapi perah yang dikelola perusahaan besar tercatat mencapai 20 liter/ekor/hari dengan jarak beranak 13 sampai 14 bulan.

Sejumlah strategi sudah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produksi susu dalam negeri. Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Ir. Sugiono, M.P pernah mengemukakan bahwa

upaya peningkatan produksi susu nasional tidak bisa dipisahkan dengan kerja sama yang aktif baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Dalam hal jalinan kerja sama pihaknya mendorong kemitraan antara IPS dan koperasi peternakan dalam menyerap bahan baku susu segar di tanah air.

Susu sendiri merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Susu berperan sebagai asupan penting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan khususnya anak-anak. Banyak nutrisi yang terkandung di dalam secangkir susu diantaranya kalori, protein, lemak, kalsium, Vitamin D, Kalium, fosfor, selenium, vitamin A, magnesium, dan B12.

Mengingat pentingnya peranan susu dalam memenuhi kecukupan gizi harian, mari kita bergerak bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi susu untuk kecerdasan dan memperbaiki gizi anak bangsa serta menjaga vitalitas dimasa tua. Dengan ini diharapkan angka per kapita konsumsi susu di Indonesia bisa meningkat dan secara bertahap bisa membantu usaha peternakan sapi perah rakyat serta menaikkan lagi produksi untuk memenuhi kebutuhan susu masyarakat dan menekan jumlah impor susu.

Jangan Anggap “Merokok Membunuhmu” Hanya Slogan tanpa Data

Muhamad Sobari

Statistisi BPS Kabupaten Tasikmalaya

Tingkat konsumsi produk tanaman tembakau atau rokok masyarakat Indonesia sangat tinggi, berdasarkan data *Tobaccoatlas.org* pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dengan tingkat konsumsi rokok 1.675 batang rokok per kapita per tahun. Filipina 1.132, Vietnam 1.049, Singapura 851 dan negara dengan tingkat konsumsi rokok paling rendah di Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam dengan 9 batang per kapita per tahun. Bahkan jumlah perokok Indonesia menempati posisi ke 3 di dunia dengan jumlah perokok 53,7 juta orang, India 104,3 juta orang, dan Tiongkok 250,3 juta orang. Walaupun demikian, tingkat konsumsi rokok India lebih rendah dari Indonesia yaitu 89 batang per kapita per tahun.

Tingkat konsumsi rokok Tiongkok 2.043 batang rokok per kapita per tahun menjadikannya negara dengan konsumsi rokok tertinggi di dunia yang mengkonsumsi 41,9 persen rokok yang beredar di dunia, Indonesia 5,6 persen, Rusia 5,0 persen, Amerika Serikat 4,7 persen dan Jepang yang mengkonsumsi 3,1 persen rokok yang beredar di dunia. Walaupun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tiongkok tergolong tinggi, IPM Rusia, Amerika Serikat dan Jepang tergolong sangat tinggi sedangkan Indonesia masih tergolong menengah. Dengan demikian, dibandingkan negara-negara dengan

IPM menengah seperti Mesir, Bangladesh, India, Filipina dan Vietnam, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi rokok tertinggi.

IPM dibentuk oleh empat indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Berdasarkan data dari *United Nations Development Programme* (UNDP) hanya indikator rata-rata lama sekolah Indonesia yang lebih baik dari Tiongkok, indikator lain Indonesia masih dibawah Tiongkok dan seluruh indikator IPM Indonesia masih dibawah Rusia, Amerika Serikat dan Jepang.

Bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah ketergantungan terhadap rokok yang mengandung zat adiktif nikotin diperkuat dengan data hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang merokok tembakau setiap hari selama sebulan terakhir pada bulan Maret tahun 2019 adalah 20,71 persen dan merokok tidak setiap hari 1,80 persen. Berdasarkan data hasil Susenas pula diketahui pengeluaran untuk tembakau dan sirih per kapita per tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2018 terus meningkat. Pada tahun 2013 pengeluaran untuk tembakau dan sirih per kapita per tahun mencapai Rp. 527 ribu, Tahun 2014 Rp. 589 ribu dan terus meningkat sehingga pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 48,96 persen. Bahkan rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar kedua setelah beras terhadap garis kemiskinan September 2019 di perkotaan sebesar 11,17 persen dan di perdesaan sebesar 10,37 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rokok telah menjadi kebutuhan dasar di Indonesia karena penghitungan kemiskinan BPS mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar makanan termasuk didalamnya rokok yang diwakili 52 jenis komoditi dan kebutuhan dasar bukan makanan yang diwakili 51 jenis komoditi (perkotaan) / 47 jenis komoditi (perdesaan). Kontribusi rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan dari September 2015 sampai September 2019 mengalami peningkatan, pada September 2015 kontribusi di perkotaan masih 8,08 persen dan di perdesaan masih 7,68 persen.

Kebiasaan atau bisa dibilang kebutuhan dasar merokok pada masyarakat Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan. Pada umumnya penyakit yang terkait dengan tembakau memerlukan waktu 15-20 Tahun setelah perilaku merokok dimulai. Penyakit yang disebabkan karena konsumsi tembakau adalah kanker paru bronkus dan trakea, penyakit stroke, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung Koroner, kanker mulut dan tenggorokan, kanker esofagus, kanker lambung, kanker hati, kanker pankreas, kanker mulut rahim, kanker ovarium, kanker kandung kemih dan bayi berat lahir rendah yang diakibatkan ibu terpapar asap rokok. Namun, yang memiliki potensi mendapatkan penyakit-penyakit tersebut tidak hanya perokok aktif, perokok pasif yang terpapar asap rokok secara langsung pun memiliki potensi karena asap rokok yang terhirup mengandung senyawa kimia berbahaya seperti sianida, tar, arsenik dan benzene.

Berdasarkan data Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, total kasus penyakit

terkait tembakau pada tahun 2013 adalah 962 ribu dengan jumlah kematian sebesar 240 ribu atau sebesar 25 persen. Penyakit penyebab kematian terbesar adalah Stroke sebesar 18,70 persen, bayi berat lahir rendah 14,40 persen, serta penyakit kanker paru, bronkus dan trakea sebesar 12,01 persen. Dan berdasarkan data hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) kasus kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia menduduki peringkat pertama dengan 558 ribu kematian setiap tahunnya dari jumlah kasus tersebut yang disebabkan oleh penggunaan tembakau 147 ribu kasus atau sebesar 26 persen.

Angka kematian bayi berat lahir rendah akibat ibu terpapar asap rokok di Indonesia masih tinggi hal tersebut akan berpengaruh terhadap angka harapan hidup saat lahir karena merupakan komponen utamanya. Semakin menurunnya angka harapan hidup saat lahir pada akhirnya akan menurunkan IPM Indonesia.

Menurut *Tobaccoatlas.org* kebijakan terbaik untuk melindungi publik dari asap rokok adalah dengan menjadikan semua tempat umum seutuhnya bebas asap rokok. Namun, berdasarkan data dari *Tobaccoatlas.org* pemerintah Indonesia baru bisa seutuhnya menjadikan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, universitas, angkutan umum bebas asap rokok dan menyediakan dana penegakan hukum bebas asap rokok. Sedangkan untuk fasilitas pemerintahan, tempat kerja, restoran, pub dan bar, dan tempat umum dalam ruangan lainnya belum seutuhnya bebas asap rokok. Pemerintah Indonesia pun belum menaikkan bea cukai menjadi minimum 70 persen sesuai dengan patokan dari WHO

karena baru 49,45 persen dari harga eceran. Pemerintah Indonesia sudah memberikan peringatan tentang bahaya bagi perokok pada kemasan produk berupa gambar dan sudah memberikan peringatan tentang bahaya rokok bagi seluruh penduduk melalui berbagai media. Namun, pemerintah Indonesia belum seutuhnya menegakkan larangan segala bentuk iklan baik secara langsung maupun tidak langsung, larangan iklan tidak langsung baru 40 persen saja.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang diperingati setiap tanggal 31 Mei bertujuan untuk mengajak para perokok agar tidak merokok selama 24 jam untuk mengingat dampak buruk rokok terhadap kesehatan. Pada tahun ini HTTS diperingati ditengah wabah *Covid-19* yang seharusnya lebih menyadarkan para perokok untuk berhenti merokok demi kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang-orang yang berada didekatnya. Berdasarkan data dari *Covid19.go.id* kasus positif *Covid-19* yang meninggal sampai tanggal 30 Mei 2020 pukul 10:16 adalah 1.520 orang dengan kondisi penyerta hipertensi sebesar 20,2 persen, diabetes melitus 15,7 persen, penyakit jantung 10 persen, penyakit ginjal 4,3 persen, penyakit paru obstruktif kronis 3,8 persen, gangguan pernafasan lain 2,8 persen, kanker 1,1 persen, asma 0,7 persen, gangguan imun 0,7 persen, penyakit hati 0,3 persen dan TBC sebesar 0,3 persen. Dari beberapa kondisi penyerta tersebut terdapat penyakit-penyakit yang besar kemungkinannya muncul akibat pasien sebagai perokok aktif atau pasif seperti penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis, gangguan pernafasan, kanker, asma dan TBC.

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia segera menandatangani Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (*Framework Convention on Tobacco Control - FCTC*). Konvensi ini dibuka sejak Juni 2003 di Jenewa, Swiss dan sampai saat ini sudah ada 182 negara yang tergabung, yang baru-baru ini bergabung adalah negara Andorra pada tanggal 11 Mei 2020. FCTC ini meliputi peningkatan bea cukai tembakau, pelarangan iklan rokok, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang komprehensif, peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, membantu masyarakat yang ingin berhenti merokok dan pendidikan masyarakat.

Walaupun penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2019 mencapai Rp. 164,8 Triliun melebihi target yang ditetapkan dalam APBN yaitu Rp.158,8 Triliun, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemerintah Indonesia tidak segera meratifikasi FCTC, karena akan membawa bangsa Indonesia kepada kehancuran akibat berbagai penyakit yang ditimbulkannya karena jumlah perokok di Indonesia ada 53,7 juta orang yang menghabiskan hampir 90 Miliar batang rokok dalam setahun, jika tidak dikendalikan angka ini akan terus bertambah. Masyarakat Indonesia pun seharusnya sadar akan bahaya merokok bagi kesehatan dirinya sendiri dan kesehatan orang-orang terdekatnya, jangan anggap “Merokok Membunuhmu” hanyalah sebuah slogan semata yang tidak ada fakta dan datanya. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang masih dibawah garis kemiskinan, mengutip paparan kepala BPS terdahulu, Suryamin, ketika seseorang yang dikatakan dibawah garis kemiskinan mengkonsumsi rokok, ada

kemungkinan ia menjadi diatas garis kemiskinan apabila mengalihkan pengeluaran untuk rokok menjadi pengeluaran untuk komoditi makanan yang mengandung kalori.

<https://jabar.bps.go.id>

Sudah Siapkah Kita Memasuki Era *New Normal*

Muhamad Sobari
Statistisi BPS Kota Depok

Berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2020 suatu daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan masyarakatnya untuk sekolah, bekerja dan beribadah dirumah dan juga membatasi setiap kegiatan di tempat / fasilitas umum. Setiap Kepala Daerah dapat mengajukan PSBB dan akan disetujui oleh Menteri Kesehatan jika memenuhi persyaratan seperti jumlah kasus *Covid-19* yang meningkat secara signifikan, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Sehingga setiap daerah periode waktu dalam menerapkan PSBB akan berbeda-beda.

Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB dari 11 April - 4 Juni 2020, Bogor Depok dan Bekasi 15 April - 4 Juni 2020, Bandung Raya 22 April - 12 Juni kecuali Bandung Barat dan Sumedang sampai 4 Juni 2020, Indramayu, Karawang, Subang dan Kabupaten Sukabumi 6 Mei - 12 Juni 2020 sedangkan Kota Sukabumi dan Kota/Kabupaten lain di Jawa Barat menerapkan PSBB dari 6 Mei - 4 Juni 2020.

Berdasarkan data *Google Mobility Index* di laman *Covid-19.bps.go.id*, sejak diterapkannya *Work From Home* (WFH) pada tanggal 17 Maret 2020 secara nasional terjadi tren peningkatan aktivitas masyarakat di rumah sekitar 9,5 persen setiap harinya dan terjadi tren penurunan aktivitas

masyarakat di tempat kerja sekitar 16,5 persen setiap harinya selama periode Februari s.d April 2020.

Berdasarkan data tersebut pula kebijakan PSBB di Provinsi DKI Jakarta berhasil menekan mobilitas masyarakat ke tempat umum seperti di tempat kerja mobilitas menurun 73 persen, mobilitas di tempat perdagangan retail dan rekreasi menurun 70 persen, mobilitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari menurun 46 persen, mobilitas di taman menurun 61 persen dan mobilitas di tempat transit (stasiun dan terminal) menurun 79 persen.

Beberapa minggu yang lalu, khususnya ketika peringatan hari bumi tanggal 22 April, cukup banyak artikel yang menyatakan pandemi memberikan waktu istirahat untuk bumi seperti berkurangnya tingkat polusi udara di Tiongkok dan Italia, berkurangnya gelombang seismik dari aktivitas memberikan efek jembatan gedung dan jalan berumur lebih panjang, Gunung Himalaya yang bisa dilihat dari India untuk pertama kalinya dan air di kanal-kanal Venesia yang sebelumnya bau dan kotor kini jernih.

Bagaimana dengan di Indonesia, berdasarkan data *Air Quality Index* di laman *Covid-19.bps.go.id* Kawasan Bogor mengalami peningkatan kualitas udara sebesar 44,9 persen selama periode Januari s.d April 2020, Kawasan Surabaya meningkat 39,2 persen, Kawasan Bekasi meningkat 13,8 persen, Kawasan Semarang meningkat 6,7 persen dan Kawasan Depok Meningkatkan 3,1 persen. Namun, ternyata tidak semua kawasan mengalami hal yang sama. Kawasan Tangerang Selatan malah mengalami

penurunan kualitas udara sebesar 42,9 persen, Kawasan Tangerang menurun 13,2 persen, Kawasan Bandung menurun 28,5 persen dan Kawasan Jakarta mengalami penurunan kualitas udara sebesar 12,7 persen selama periode Januari sampai dengan April 2020.

Menurut *Greenpeace* hal tersebut disebabkan sumber emisi tidak hanya berasal dari transportasi dan aktivitas masyarakat saja namun ada sumber tidak bergerak lain yang masih luput dari perhatian publik seperti aktivitas industri, cuaca, arah angin, kepadatan populasi serta intensitas matahari. Kemungkinan yang menurunkan kualitas udara di beberapa kawasan adalah masih beroperasinya 10 usaha selama PSBB terutama sektor energi, konstruksi, industri strategis dan industri vital nasional.

Selain itu kebijakan penerapan PSBB menurunkan jumlah penerbangan di Jakarta. Berdasarkan publikasi di laman *Covid-19.bps.go.id* selama periode 15 Maret - 30 April 2020 jumlah penerbangan per hari keberangkatan domestik dari Jakarta mengalami penurunan sebesar 69 persen sedangkan kedatangan domestik menurun 67,3 persen. Jumlah penerbangan internasional per hari pun mengalami penurunan, yaitu sebesar 70,4 persen untuk keberangkatan dan 69 persen untuk kedatangan.

Menurunnya mobilitas di tempat perdagangan retail dan rekreasi di Jakarta kemungkinan terjadi juga di daerah lain yang menerapkan PSBB. Dikarenakan diterapkannya PSBB masyarakat lebih memilih berbelanja *Online* daripada berbelanja di tempat perdagangan *retail/mall*. Berdasarkan publikasi di laman *Covid-19.bps.go.id*

penjualan *Online* di beberapa *marketplace* pada bulan Maret meningkat 3,2 kali lipat penjualan Januari dan pada bulan April meningkat 4,8 kali lipat penjualan Januari.

Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan diterapkannya PSBB dengan tujuan memutus rantai penyebaran *Covid-19* sudah mampu menekan tingkat mobilitas masyarakat. Dengan akan berakhirnya PSBB dan akan mulai berlakunya *New Normal* menimbulkan pertanyaan di masyarakat sudahkah PSBB memutus rantai penyebaran *Covid-19* atau baru sekedar menurunkan tingkat mobilitas masyarakat?

Berdasarkan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/328/2020 *New Normal* atau normal baru adalah suatu kondisi yang membolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan beradaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan *Covid-19*. Normal baru dilakukan karena masyarakat perlu beraktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, perekonomian harus terus berjalan dan menghindari bertambahnya jumlah PHK selama vaksin *Covid-19* belum ditemukan. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak lagi menggunakan istilah Normal Baru untuk menghindari masyarakat berpikir kembali hidup normal dengan bebas tetapi mengenalkan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru di 30 bidang kegiatan di Jawa Barat (AKB30).

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan ada tiga syarat yang harus dipenuhi jika PSBB akan dilonggarkan menuju *new normal* yaitu sistem kesehatan, jumlah tes dan tingkat penularan. *World Health Organization* (WHO) mensyaratkan negara atau daerah

boleh melonggarkan PSBB jika memiliki perbandingan jumlah kasus *Covid-19* tidak melebihi 60 persen infrastruktur kesehatan yang ada. Kemudian jumlah tes minimal 1 orang per 1.000 penduduk per minggu sejak kasus pertama kali ditemukan yaitu 2 Maret 2020. Dan tingkat penularan dibawah 1 selama 14 hari berturut-turut.

Berdasarkan data *Covid19.go.id* sampai tanggal 4 Juni 2020 pukul 07:02 kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sudah mencapai 28.233. Dan berdasarkan publikasi profil kesehatan Indonesia yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan, Pada Tahun 2018 jumlah tempat tidur di Rumah Sakit (RS) umum mencapai 281.082 dan di RS Khusus mencapai 29.628 totalnya 310.710 tempat tidur. Walaupun rasionya masih dibawah 10 persen namun, dari 2.813 RS yang ada di Indonesia berdasarkan data *Covid19.kemkes.go.id* hanya 100 RS yang menjadi rujukan *Covid-19*, sehingga rasionya bisa saja lebih dari 10 persen karena tidak semua RS bisa digunakan untuk merawat pasien *Covid-19*.

Berdasarkan proyeksi penduduk Tahun 2020 hasil dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 269,6 juta jiwa. Sudah 14 minggu sejak kasus *Covid-19* pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret lalu, seharusnya sudah dilakukan 14 tes per 1.000 penduduk. Sehingga Indonesia seharusnya sudah melakukan sebanyak 3,7 juta tes, namun berdasarkan data kawal*Covid19.id* Indonesia baru melakukan 329.831 tes.

Sebenarnya data jumlah tes kemungkinan masih *underestimate* karena jika dilihat data jumlah tes per

provinsi baru 8 provinsi yang tersedia datanya padahal kasus positif sudah menyebar di 34 provinsi. Bahkan provinsi dengan kasus positif terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur, tidak tersedia data jumlah yang dites di laman resminya infoCovid19.jatimprov.go.id. Oleh karena itu, keterbukaan data kepada publik yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Belum ada data yang resmi dipublikasikan pemerintah mengenai tingkat penularan *Covid-19* di setiap provinsi di Indonesia. Namun, ada *startup* analisis *big data*, Bonza, yang baru-baru ini membantu pemerintah menampilkan tingkat penularan *Covid-19* menurut provinsi di Indonesia. Berdasarkan data thebonza.com $R(t)$ atau angka reproduksi efektif yang memberi gambaran rata-rata penularan yang terjadi per satu kasus positif di Indonesia pada tanggal 4 juni 2020 baru 16 provinsi yang tingkat penularannya dibawah 1.

Dikarenakan angka $R(t)$ berubah dari hari ke hari, jika dilihat dari awal kasus positif *Covid-19* ditemukan di setiap provinsi sampai 4 Juni 2020 belum ada provinsi yang selama 14 hari berturut-turut tingkat penularannya dibawah 1. Kalaupun ada provinsi yang sudah berhasil 14 hari berturut-turut di bawah 1, Provinsi Aceh, masih ada kemungkinan 90 persen angka $R(t)$ yang sesungguhnya berada diatas 1 dikarenakan jumlah tes yang sudah dilakukan masih sangat kurang.

Berdasarkan kriteria-kriteria dari Bappenas tersebut, bagi penulis pribadi, Indonesia belum siap untuk melonggarkan PSBB dan memasuki normal baru. Namun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

menyatakan, tim pakar melalui berbagai kriteria seperti epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi WHO, merekomendasikan 102 kabupaten kota di Indonesia yang dinyatakan zona hijau dan masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan produktif dan aman *Covid-19*.

Jika pemerintah Indonesia tidak bisa melanjutkan PSBB demi perekonomian yang harus terus berjalan setidaknya pemerintah bisa mengikuti saran BNPB yang mengizinkan pelanggaran PSBB hanya untuk 102 kabupaten saja. Pulau Jawa saja berdasarkan data *Covid19.go.id* kasus positif *Covid-19* mencapai 63,4 persen kasus positif di Indonesia sehingga di Pulau Jawa hanya Tegal saja yang direkomendasikan BNPB untuk dilakukan pelanggaran PSBB.

IPM Dimasa Pandemi *Covid-19*

Ani Saebani

Statistisi BPS Kabupaten Cianjur

Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia, termasuk Indonesia seakan menghancurkan tatanan kehidupan termasuk bidang pendidikan. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tantangan berat untuk bangkit, ketika terganggunya kegiatan belajar mengajar. Ekonomi yang merosot juga menjadi faktor naiknya jumlah penduduk miskin. Hal ini akan berpengaruh pada kesulitan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Pembangunan kualitas manusia harus menjadi program pembangunan utama untuk menuju Indonesia maju. Sumber daya manusia unggul modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjauhkan dari kemiskinan. Maka hakikat pembangunan fisik seperti infrastruktur perlu memperhatikan keberlanjutan supaya dapat diimbangi dengan kemajuan kualitas penduduk atau masyarakat setempat.

Kualitas manusia atau penduduk diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, wilayah maupun negara. IPM sering kali menjadi isu politik untuk melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan dari pemerintahan baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Kabupaten Cianjur secara geografis tidak kalah strategisnya dengan kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, pembangunan yang berhubungan dengan mutu penduduk kurang tersentuh dengan baik dan tepat. Tercermin kualitas hidup manusia di Kabupaten Cianjur yang diukur dengan IPM hanya rangking ke-27 di Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Kabupaten Cianjur pada tahun 2019 sebesar 65,38 atau mengalami pertumbuhan 1,18 persen dari IPM tahun 2018 sebesar 64,62. Perlu akselerasi dan strategi yang tepat untuk lebih cepat dalam meningkatkan ketiga dimensi yang membangun IPM tersebut.

IPM sendiri pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan metode perhitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi perhitungan IPM yang baru pada tahun 2015 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan serta pendapatan yang layak. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah

tahun yang diharapkan dapat tercapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup. Ini dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dicapai oleh anak pada usia tertentu (7 tahun) di masa mendatang.

Sedangkan standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan ini ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (PPP: *purchasing power parity*). Berbeda dengan indikator yang membangun dari dua dimensi dari IPM, standar hidup diakui sebagai indikator input, bukan sebagai indikator dampak. Namun, karena keterbatasan data maka pengeluaran per kapita yang disesuaikan digunakan dalam perhitungan IPM.

Keberadaan data IPM suatu daerah atau nasional diperlukan baik oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan atau di akses oleh masyarakat luas. IPM juga bagi pemerintah sebagai gambaran dalam mengambil kebijakan dan keputusan pembangunan yang lebih baik dan terarah. Selain itu juga IPM merupakan salah satu dari 4 (empat) variabel untuk

menentukan besar kecilnya nilai dana alokasi umum (DAU) bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan data BPS, peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur disebabkan adanya perbaikan dan keberhasilan dalam meningkatkan standar hidup layak. Pada tahun 2018, standar hidup yang tercermin dari pengeluaran per kapita sebesar Rp. 7,874 juta, ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp. 8,290 juta. Perbaikan standar hidup tercermin dari pengeluaran perkapita yang terus meningkat, sehingga tingkat pengeluaran konsumsi penduduk perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Program pembangunan pada pemberdayaan penduduk ekonomi lemah perlu digalakan supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh semua penduduk, bukan hanya segelintir orang yang menikmati pembangunan. Dengan adanya pembangunan inklusif diharapkan dapat menyentuh penduduk ekonomi lemah, seperti buruh pertanian, petani gureum, nelayan, UMKM, pedagang kecil dan usaha mikro lainnya.

Sentra industri pengolahan seperti pabrik menumbuhkan sentra ekonomi baru juga mengurangi pengangguran. Dengan adanya pabrik memberikan pengaruh pada pengeluaran penduduk sekitar sehingga menaikkan pendapatan penduduk.

Adanya kenaikan standar upah layak bagi kaum buruh juga akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan penduduk. Penciptaan lapangan kerja, seperti program padat karya penting

dilakukan pemerintah daerah supaya penduduk yang masih nganggur dapat penghasilan.

Program perbaikan kehidupan para petani supaya dapat meningkatkan pendapatannya dengan memberikan berbagai subsidi. Ataupun perbaiki infrastruktur seperti perbaikan irigasi, embung, bendungan supaya dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Tak kalah penting dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah yaitu, langkah strategis dalam perbaikan dimensi IPM untuk ke depan supaya dapat menggeser atau naik kelas adalah dimensi pengetahuan/pendidikan. Indikator yang membentuk dimensi pengetahuan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) maupun harapan lama sekolah (HLS) tumbuh masih stagnan.

Perlu kerja keras dari pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur untuk memperbaiki tingkat pendidikan penduduknya. Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk memajukan daerah tercermin dengan tingkat pendidikan penduduk yang baik. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja sehingga kualitas manusia pun akan meningkat.

Kemajuan dimensi pendidikan dari indikator rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Cianjur sebesar 6,93 pada tahun 2018 meningkat hanya 0,04 poin menjadi 6,97 pada tahun 2019. Indikator RLS sebesar 6,97 memperlihatkan penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Cianjur rata-rata telah bersekolah formal selama 6,97 tahun, atau hanya telah menyelesaikan kelas VII (SMP kelas 1). RLS Kabupaten Cianjur jauh tertinggal

dibandingkan rata-rata RLS Jawa Barat sebesar 8,37 atau SMP kelas VIII.

Perbaikan indikator RLS perlu menjadi kebijakan penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Pemerataan serta digalakkannya program paket B serta paket C harus menjadi prioritas dan dijalankan sebaik mungkin. Dengan perbaikan tingkat pendidikan bagi yang tidak mempunyai ijazah SLTP maupun SLTA akan meningkatkan dimensi pendidikan bagi peningkatan IPM.

Selain itu, indikator harapan lama sekolah (HLS) pun perlu adanya peningkatan yang terarah serta cepat. Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 mempunyai HLS sebesar 11,90 atau meningkat hanya 0,08 poin menjadi 11,98 pada tahun 2019. Ini memperlihatkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang menamatkan pendidikan sampai kelas 11,98 atau tingkat pendidikan SLTA kelas dua.

Perlu peningkatan pelayanan terhadap akses pendidikan bagi semua penduduk, sehingga dapat meningkatkan dimensi pendidikan dalam membentuk IPM. Dimasa pandemi *Covid-19* perlu strategi khusus agar anak-anak usia sekolah semua bisa bersekolah. Dimasa sulit ini perlu kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta maupun orang tua untuk lebih konsen terhadap keberlangsungan pendidikan usia sekolah. Semua anak-anak usia sekolah untuk bisa melanjutkan minimal sampai tingkat SMA/ sederajat di masa pandemi dengan biaya yang terjangkau untuk semua kalangan.

Kesenjangan Pendidikan Nasional Masa Pandemi *Covid-19* menuju *New Normal*

Asriana Ariyanti
Statistisi BPS Kota Bogor

Pandemi *Covid-19* yang melanda dunia membawa dampak yang sangat luar biasa dalam seluruh aspek kehidupan. Banyak negara gagap menghadapi pandemi yang memiliki sebaran sangat luas ini, termasuk Indonesia. Semenjak diumumkan kebijakan *School from Home* (SFH) karena situasi sekolah yang dianggap berbahaya untuk anak-anak masa pandemi, banyak kebijakan dan jadwal yang disesuaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Masa darurat ini mengharuskan guru dan siswa belajar dari rumah. Sekilas tampak sederhana karena hanya memindahkan lokasi penyelenggaraan pendidikan dari sekolah ke rumah. Aktivitas belajar akan berlangsung seperti biasa dengan kurikulum yang sedang berjalan. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Sistem belajar jarak jauh tersebut membutuhkan banyak hal yang harus dipersiapkan.

Instruksi Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud), Nadiem Makarim, tentang tidak wajibnya guru mengejar penyelesaian semua materi yang terdapat dalam kurikulum karena wabah *Covid-19* serta melibatkan siswa dalam pembelajaran hidup, kesehatan dan empati diterjemahkan secara berbeda di tingkat sekolah. Nadiem mengimbau agar guru membekali siswa dengan kemampuan hidup yang sarat dengan nilai-nilai karakter.

Hal ini bertujuan agar sistem belajar di rumah tidak menjadi beban guru, orang tua dan tentu saja siswa sebagai sosok yang paling penting dalam hal ini.

Sistem Belajar Dari Rumah: Tidak Mudah dan Tidak Murah

Pesan yang disampaikan Nadiem terdengar sangat indah dan bermakna, tetapi guru-guru yang secara mendadak harus mengubah sistem belajar di sekolah menjadi belajar di rumah mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan itu terkait dengan materi, cara pembelajaran dan biaya.

Materi pembelajaran *Online* yang tidak fokus pada kurikulum tetapi pada karakter adalah hal baru bagi guru dan siswa. Materi ini belum matang disusun oleh Kemendikbud sehingga guru harus berimprovisasi masing-masing. Standar pendidikan dan penilaian sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan latar belakang guru. Tanpa arahan dan pedoman yang diberikan, maka materi akan bersifat sangat subjektif.

Cara pembelajaran *Online* juga memerlukan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi untuk guru dan siswa agar dapat berkomunikasi dengan baik. Guru dapat menyediakan bahan ajar dan menyampaikannya dengan baik dan mudah dipahami siswa tanpa harus bertatap muka langsung. Tanpa persiapan yang matang, hal ini menjadi masalah cukup serius dalam menyampaikan pesan-pesan pendidikan dalam masa pandemi ini. Kemampuan siswa menggunakan teknologi informasi juga sangat penting.

Hal lain yang sangat penting diperhatikan dalam sistem pembelajaran dari rumah adalah biaya. Untuk melaksanakan kebijakan SFH maka harus ada biaya yang dikeluarkan oleh guru dan siswa dalam hal pembelian alat komunikasi serta pulsa untuk kuota akses internet. Kepemilikan alat komunikasi dan komputer di rumah tangga menengah ke atas tentu sangat berbeda mereka dengan tingkat ekonomi kurang mampu. Demikian juga dengan kemampuan pembelian pulsa dan kuota sebagai syarat utama berlangsungnya sistem SFH.

Pemetaan Penguasaan TIK di Bidang Pendidikan

Sistem SFH menuntut kemampuan guru dan siswa untuk berkomunikasi melalui media *Online*. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi syarat penting untuk memperlancar SFH. Jika dilihat dari perkembangan TIK Indonesia maka total jumlah pengguna internet di Indonesia selama 2018 adalah 40 orang per 100 penduduk dengan jumlah rumah tangga sebanyak 66,22 persen yang memiliki akses internet yang sangat meningkat tajam dibandingkan kondisi 2015 yang hanya 22 orang per 100 penduduk dan 38,40 persen rumah tangga mengakses internet (BPS, 2018).

International Telecommunication Union (ITU) selalu melakukan pengukuran penguasaan TIK secara kuantitatif di seluruh dunia melalui *ICT Development Index* untuk mengetahui perkembangan TIK di seluruh negara di dunia. Tahun 2016, negara dengan *ICT Development Index* tertinggi adalah Islandia (*ICT Index* 8,98) dan Korea Selatan (*ICT Index* 8,85), sedangkan Indonesia berada di peringkat

111 dunia dengan nilai 4,33, di atas Kamboja, Timor Leste dan Myanmar. ITU tidak menghitung untuk periode 2017 dan 2018 sehingga BPS menghitung dengan metode yang sama dan diperoleh peningkatan nilai pada level 4,96 dan 5,07.

Penguasaan TIK penduduk Indonesia masih jauh di bawah negara-negara lain di dunia ini tentu menjadi suatu kondisi yang harus diperhatikan oleh Kemendikbud dalam penerapan sistem belajar *Online* selama pandemi *Covid-19* yang belum dipastikan kapan akan berakhir. Di antara 33 provinsi di Indonesia maka ada 16 provinsi memiliki indeks TIK di atas nilai nasional. Lima provinsi dengan Indeks TIK tertinggi di Indonesia adalah DKI Jakarta, DIY, Bali, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Banten. Provinsi dengan Indeks TIK terendah dengan nilai di bawah 4 adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Selain faktor ekonomi, kemampuan TIK untuk siswa juga tergantung pada sistem pembelajaran TIK yang sudah mereka terima di sekolah. Menurut BPS, pada 2018 pada seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga SMA sederajat hanya 10,09 persen sekolah di Indonesia yang mengajarkan ketrampilan komputer di sekolah secara khusus. Sekolah swasta lebih banyak mengajarkan ketrampilan TIK dibanding sekolah negeri dengan persentase 5,66 dan 18,65 persen. Siswa SD negeri adalah siswa yang paling jarang diajarkan ketrampilan TIK karena hanya 2,69 persen dan SD swasta 10,74 persen.

Jumlah guru-guru yang secara formal sedang atau sudah dibekali dengan ketrampilan TIK juga masih sangat terbatas. Pada seluruh jenjang pendidikan dari SD hingga

SMA sederajat hanya 10,10 persen guru yang memiliki bekal kemampuan bidang TIK. Guru SD hanya 6,9 persen yang pernah mengikuti pelatihan TIK jauh lebih kecil dibanding jenjang SMP (11,33 persen) dan SMA (14,43).

Kesenjangan Pendidikan Nasional

Selain kemampuan TIK yang masih cukup rendah, SFH selama pandemi *Covid-19* juga berpotensi melebarkan *gap* yang ada dalam dunia pendidikan nasional. Pengkategorian negeri dan swasta yang jelas memiliki konsekuensi perbedaan biaya pendidikan tentu sudah sangat dimaklumi oleh masyarakat.

SFH mengungkap kondisi lain yang menyebabkan kesenjangan dalam dunia pendidikan, yaitu kondisi ekonomi siswa dan daerah geografisnya. Kondisi ekonomi ini berkaitan dengan kemampuan siswa mengeluarkan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh sedangkan kondisi geografis ini berkaitan dengan infrastruktur yang tersedia.

Disparitas antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu tampak sangat nyata dalam SFH yang dilakukan oleh pemerintah selama pandemi. Bagi siswa dari keluarga mampu, *laptop*, komputer, *handphone*, pulsa dan kuota bukanlah isu penting. Orang tua dapat menyediakan semuanya demi kelangsungan sistem pembelajaran yang ada. Orang tua dari keluarga mampu memilih untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian alat komunikasi serta pulsa dan kuota dibandingkan risiko bahaya jika anak-anak harus belajar di sekolah.

Masalah disparitas ini dirasakan oleh siswa dari keluarga tidak mampu. Sistem SFH yang membutuhkan alat komunikasi dan media belajar lain yang membutuhkan biaya ekstra tentu tidak mudah dipenuhi saat kondisi krisis seperti ini. Orang tua dari kelompok tidak mampu akan memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pembelian makanan dan obat-obatan dibandingkan membeli pulsa dan kuota. Siswa kelompok ini rawan tidak dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan. Mereka menganggap SFH ini adalah 'hadiah' libur panjang sekolah tanpa konsekuensi apa pun karena penilaian kelulusan dan kenaikan kelas sudah diputuskan dengan sangat mudah.

Selain masalah ekonomi, masalah geografis juga menyebabkan disparitas pendidikan semakin lebar. Infrastruktur yang berbeda antar wilayah, ketersediaan dan kecepatan akses internet antar wilayah yang sangat berbeda juga menjadi hambatan bagi siswa dengan SFH. Bagi siswa di daerah pelosok, akses internet adalah mimpi yang belum terpenuhi, Banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk akses internet bahkan daerah-daerah tersebut masih merupakan daerah blank spot. Kebijakan SFH tentu membuat mereka berhenti mendapatkan pendidikan untuk sementara waktu tanpa adanya alternatif lain, kecuali beberapa guru inspiratif yang terus berkeliling mengajar karena tidak mungkin mengajar secara *Online*. Hal ini adalah suatu pengecualian istimewa yang semoga akan mendapatkan penghargaan khusus dari Kemendikbud.

Proporsi guru-guru yang memiliki kualifikasi di bidang TIK untuk semua jenjang di Indonesia hanya

berkisar 10,10 persen. Guru-guru di daerah perdesaan juga lebih sedikit yang sudah dibekali ketrampilan TIK. Menurut data BPS, pada 2018 guru di perdesaan hanya 5,05 persen yang mendapatkan pelatihan TIK sedangkan di perkotaan 11,61 persen. Guru-guru SD di perdesaan hanya 3,80 persen yang pernah mendapatkan pelatihan ketrampilan TIK (BPS, 2018). Hal ini tentu dapat menjadi catatan penting bagi Kemendikbud dalam program pelatihan ketrampilan TIK di masa mendatang.

Mendikbud menyatakan bahwa selain belajar *Online*, siswa juga dapat belajar dari TVRI. Hal ini dapat dijadikan alternatif tetapi belum menjadi alternatif yang memadai. Siaran TVRI saat ini tetap masih belum merata dan ketersediaan listrik di daerah-daerah pelosok juga masih menjadi hambatan besar.

Dunia Pendidikan Nasional Menuju *New Normal*

Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan tetap dimulai Juli nanti, walaupun untuk pemberlakuan pembukaan sekolah lagi masih menjadi wacana yang terus dibahas. Beberapa wacana tentang pembukaan sekolah kembali dengan protokol *new normal* menjadi alternatif yang dikemukakan oleh para ahli untuk daerah-daerah zona hijau yang relatif aman. Akan tetapi hal ini juga masih diperdebatkan karena ahli-ahli bidang kesehatan dan juga sebagian besar orang tua menyatakan tidak setuju. Mereka menganggap kondisi ini masih sangat berbahaya bagi anak-anak untuk bersekolah kembali.

Untuk siswa di daerah perkotaan yang berasal dari keluarga mampu, bersekolah dari rumah tentu menjadi pilihan utama. Mereka dapat menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan dengan mudah. Bagaimana dengan siswa dari kelompok tidak mampu atau siswa di daerah terpencil? Apakah mereka harus berhenti mendapatkan haknya untuk belajar karena sekolah mereka ditutup dan mereka pun tidak dapat membeli akses yang dibutuhkan untuk SFH?

Pemerintah tentu harus sangat berhati-hati dan bijak dalam memutuskan kebijakan yang paling sesuai untuk semua kalangan. Kebijakan yang diambil harus bebas dari diskriminasi ekonomi dan geografis walaupun harus tetap menjadikan alasan keselamatan siswa dan guru sebagai prioritas utama.

Jika SFH masih harus diterapkan, maka perlu adanya fasilitas pengadaan media komunikasi serta biaya pembelian kuota bagi siswa dari kelompok kurang mampu agar mereka tetap dapat terus belajar dengan baik. Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengirimkan bahan-bahan ajar menggunakan kurir atau jasa pos dengan tetap melakukan pengawasan dan bimbingan secara komprehensif oleh guru.

Alternatif lain adalah membuka sekolah secara bertahap dan bergilir bagi siswa yang memang memerlukan bimbingan dan belajar secara langsung di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan standar yang sudah diberikan oleh WHO selama masa pandemi ini. Siswa dan guru dapat diatur bergiliran jadwal masuk sekolah agar tidak terjadi kerumunan, menyediakan

fasilitas cuci tangan sebanyak mungkin, pengadaan masker, face shield dan hand sanitizer. Selain itu, dapat dijalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi khusus seperti bus sekolah bagi siswa yang harus ke sekolah agar mereka terhindar dari risiko tertular virus di kendaraan umum, terutama bagi siswa yang orang tuanya tidak dapat menyediakan fasilitas antar jemput.

Menutup sekolah tanpa memberikan alternatif lain akan memutus hak siswa kurang mampu dan siswa daerah terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Kegagalan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat akan memperlebar kesenjangan pendidikan dasar masyarakat. Dampak kebijakan yang diambil saat ini akan sangat berdampak pada hasil pendidikan di masa depan. Keselamatan jiwa itu utama, tapi memutus hak rakyat miskin dan terpinggirkan untuk memperoleh pendidikan saat ini akan membunuh mereka di masa depannya.

JKN, Jaring Pengaman Bukan 'Sofa' yang Nyaman

Asriana Ariyanti
Statistisi BPS Kota Bogor

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan terobosan besar di bidang kesehatan yang dirasakan langsung oleh semua kalangan masyarakat. Program ini memberikan akses kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama masyarakat kategori tidak mampu, sesuai dengan amanah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur kembali melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

JKN ini merupakan praktik beradab yang juga diamanatkan untuk dilakukan di seluruh dunia oleh *The World Health Organization* (WHO). WHO mendefinisikan *Universal Health Coverage* (UHC) sebagai suatu program untuk memberikan akses sebagai kunci intervensi kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi kesehatan untuk semua orang dengan biaya yang terjangkau, sehingga mencapai pemerataan akses kesehatan. JKN di Indonesia yang diluncurkan 1 Januari 2014 ini memberikan konsekuensi bahwa semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali secara *mandatory* wajib mengikuti program JKN baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun peserta mandiri. Total peserta yang terdaftar sebagai peserta BPJS, selaku

pelaksana JKN di Indonesia, adalah 224 juta jiwa atau sekitar 85 persen penduduk Indonesia pada akhir 2019.

Cakupan JKN Indonesia Tercepat Sedunia

Jika dilihat dari jumlah cakupan keanggotaan JKN yang sangat besar ini tentu merupakan pencapaian luar biasa bagi sebuah program nasional yang sejak awal diresmikan sudah mengundang pro kontra di kalangan masyarakat. Indonesia baru menerapkan 7 tahun JKN dan sudah mencakup 85 persen penduduk. Hal ini dapat dilihat perbandingannya dengan penerapan UHC di berbagai negara. Di Jerman membutuhkan waktu 127 tahun untuk mencakup 85 persen populasi dan Costa Rica perlu 48 tahun mencapai 87 persen. Selain itu Belgia memerlukan waktu 118 tahun, Luxemburg 72 tahun, Austria 79 tahun dan Jepang 36 tahun untuk mencapai cakupan 100 persen populasi penduduknya.

Ukuran kesuksesan suatu program ini tentu tidak dapat diukur hanya dari besarnya cakupan pesertanya saja, tetapi juga kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan perhitungan sementara, selama tahun 2019, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui JKN mencapai 279,5 juta layanan, yang terdiri dari 182.9 juta layanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), 85.6 juta layanan rawat jalan RS, dan 11 juta layanan rawat inap RS. Secara rata-rata, jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 765.753 layanan setiap hari. Fakta ini menunjukkan antusias masyarakat yang sangat tinggi untuk memanfaatkan akses kesehatan yang terbuka luas bagi semua kelompok masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat kelompok kurang mampu sering tidak

mampu mengakses layanan kesehatan, baik layanan kesehatan pemerintah maupun swasta, maka dengan KIS mereka memiliki akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kelompok masyarakat kurang mampu merupakan peserta PBI yang iurannya dibayarkan melalui APBN dan APBD.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi 132,6 juta orang, yang terdiri dari 96,5 juta jiwa ditanggung pemerintah pusat dan 36 juta dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jumlah 132,6 juta tersebut adalah peserta dengan kategori Penerima Bantuan Iuran dengan iuran yang setara kelas III BPJS Kesehatan yang iurannya sebesar Rp 42.000. Hal ini sejalan dengan *best practice* sistem jaminan sosial di dunia dimana negara menanggung sampai dengan 40 persen penduduknya yang berada pada lapisan terbawah. Sementara itu, total peserta BPJS Kesehatan per April 2020 adalah sebesar 222,9 juta jiwa. Untuk diketahui, peserta BPJS Kesehatan terdiri dari dua bagian besar yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI.

Mengapa BPJS Defisit?

Salah satu faktor yang menjadi isu utama pelaksanaan JKN adalah defisitnya anggaran BPJS. Mengapa defisit? Ada beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab utama defisitnya BPJS sebagai badan yang menyelenggarakan JKN KIS. Jumlah klaim yang jauh melampaui besarnya iuran anggota menjadi penyebab utama defisitnya BPJS Kesehatan. Rendahnya kepatuhan peserta, baik perorangan maupun perusahaan dalam

membayar iuran menjadi faktor rendahnya penerimaan dan besarnya iuran BPJS yang *underpriced*.

Jumlah klaim yang lebih besar nilainya dibanding jumlah iuran diterima disebabkan oleh banyaknya peserta mandiri yang menunggak iuran. Pada akhir 2019 terjadi peserta BPJS mandiri yang menunggak iuran 45,5 persen. Banyak peserta mandiri yang mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal dan tidak membayar iuran lagi setelah sembuh. Sejak 2016 hingga 2019 tunggakan peserta mandiri ini mencapai Rp 22,7 triliun.

Overclaimed peserta mandiri adalah penyebab defisit utama defisitnya BPJS. Pada 2018 jumlah iuran peserta mandiri Rp 8,9 triliun tetapi total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Ini berarti terjadi *overclaimed* sebesar 313 persen. Pada 2019 total iuran peserta mandiri Rp 10,5 triliun sedangkan klaimnya mencapai Rp 31,4 triliun. Kondisi ini menyebabkan *overclaimed* sebesar 299 persen selama 2019. *Overclaimed* ini belum dapat dihitung pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 yang tentu akan menghasilkan angka yang *unpredictable*.

Selain klaim yang lebih besar dari nilai iuran yang dikumpulkan, defisit juga terjadi karena iuran peserta BPJS yang masih *under market price*. Menurut Direktur BPJS, Fahmi Idris, hanya iuran kelas I sebesar Rp 80.000 per orang per bulan yang sudah cukup ideal untuk tarif pelayanan dasar peserta. Sementara itu, untuk kelas II yang iurannya sebesar Rp 51.000 masih memerlukan subsidi sebesar Rp 12.000 per orang per bulan karena tarif wajar pelayanan di kisaran biaya Rp 63.000. Untuk peserta

kelas III iurannya saat ini Rp 25.500 sehingga masih diperlukan subsidi sebesar Rp 27.500 dari APBN karena tarif wajar pelayanan seharusnya pada level Rp 53.000. Selain itu, untuk peserta PBI, tarif wajar seharusnya pada level Rp 36.000 sedangkan sekarang pemerintah hanya bisa membayar Rp 23.000 per orang per bulan, sehingga memerlukan subsidi dari peserta mandiri sebesar Rp 13.000. Itulah, mengapa gelontoran dana subsidi yang berasal dari APBN masih belum mampu menutup defisit operasional BPJS. Berdasarkan data laporan bulanan BPJS, pada akhir 2019 defisit ini diprediksikan akan mencapai Rp 28 triliun.

Tanpa adanya penyesuaian iuran BPJS, maka defisit BPJS yang berimbas pada defisit JKN akan semakin besar. Untuk menutupi defisit, tentu tidak dapat sepenuhnya dilakukan pemerintah dengan mengucurkan subsidi terus-menerus dengan jumlah yang fantastis. Penghitungan aktuarial untuk menetapkan tarif iuran BPJS tentu disesuaikan dengan kemampuan membayar masyarakat (*ability to pay*) masyarakat. Untuk menetapkan harga pasar dalam penentuan tarif iuran BPJS adalah seperti makan buah simalakama, akan ada *trade off* yang harus diambil oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi ketidakmampuan masyarakat dalam membayar kenaikan iuran, maka disarankan untuk berpindah kelas peserta dari kelas I dan II ke kelas III. Jika masyarakat masih tidak mampu membayar iuran di Kelas III maka dapat mengurus keterangan tidak mampu/miskin dan mengajukan menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Pada masa pandemi *Covid-19*, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran untuk

mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS. Jika sebelumnya mereka yang tidak aktif harus membayar tunggakan sebesar 24 bulan, maka pada masa pandemi ini mereka hanya membayar pelunasan iuran 6 bulan untuk dapat aktif kembali. Kelonggaran pelunasan ini akan berlaku hingga 2021.

Jaring Pengaman Bukan Sofa yang Nyaman

JKN juga tidak hanya bertujuan untuk memberikan hak pengobatan pada masyarakat yang sakit, tapi lebih ditujukan pada usaha promotif dan preventif, pendataan kondisi masyarakat melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat melalui kader-kader kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia.

Berdasarkan riset yang diselenggarakan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia, pada 2016 JKN berhasil meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia hingga 2,9 tahun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) yang dipakai sebagai salah satu ukuran pencapaian kesehatan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selalu mengalami peningkatan. Menurut BPS, UHH penduduk Indonesia 2010 adalah 69,81 tahun, 2014 UHH mencapai 70,59 tahun dan pada 2019 UHH Indonesia adalah 71,34 tahun. Peningkatan UHH ini masih relatif rendah dibanding negara tetangga terdekat, Singapura yang memiliki UHH

82,2 tahun dan Malaysia 74,9 tahun. Indonesia masih memiliki UHH setara dengan Bangladesh, dan berada di atas Filipina, India, Kazahstan, Myanmar dan Pakistan. (*United Nations "World Population Prospect", 2017*)

Kritik terhadap pelayanan BPJS terus diberikan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja BPJS. Masyarakat, terutama peserta mandiri, memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap pelayanan BPJS. Mereka cenderung tidak puas dengan pelayanan BPJS karena dibandingkan dengan pelayanan asuransi kesehatan swasta yang ada. Perbandingan ini tentu bukan *apple to apple* menilik besarnya premi asuransi kesehatan swasta yang tentu jauh lebih mahal dibandingkan iuran BPJS. Tetapi ini bukanlah suatu justifikasi bagi BPJS untuk tidak meningkatkan kualitas pelayanannya.

Masyarakat berekspektasi bahwa BPJS akan memberikan fasilitas kesehatan seperti saat mereka menjadi peserta asuransi kesehatan swasta. Mereka bebas antrean, tanpa sistem rujukan yang rumit, administrasi yang sederhana dan fasilitas kamar rawat inap yang lebih privat. Kenyataannya, BPJS memerlukan sistem administrasi dan rujukan yang lebih panjang dan ketersediaan kamar rawat inap yang terbatas di beberapa Rumah Sakit Swasta.

JKN yang dioperasikan oleh BPJS dari awal diluncurkan adalah salah satu program suatu jaring pengaman yang disediakan negara untuk menjamin kesehatan seluruh kalangan masyarakat. JKN mengutamakan pelayanan kesehatan dasar yang dapat diatasi oleh Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan

(Faskes) pertama sebelum masyarakat yang sakit dirujuk ke Rumah Sakit yang lebih tinggi levelnya. Seiring waktu, Faskes ini bukan saja Puskesmas tapi dapat juga klinik swasta maupun dokter keluarga. Hal ini tentu sangat mempermudah masyarakat untuk mengakses hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya.

Peserta BPJS semua kelas harus melalui proses yang sama untuk menggunakan fasilitas kesehatan. Sistem rujukan dan antrean yang tidak membedakan kelas dalam rawat jalan adalah prinsip yang diterapkan oleh BPJS. Sistem kelas hanya tampak saat peserta harus rawat inap. Jika mengacu pada tujuan awal bahwa JKN ini adalah jaring pengaman, maka ide *no class basic health services* perlu dijadikan alternatif. Hal ini diterapkan di banyak negara di dunia bahwa mereka menghilangkan sistem kelas dalam besaran iuran dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

JKN adalah upaya negara menyediakan *Universal Health Coverage (UHC)* bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. JKN adalah bentuk jaring penyelamat bukan suatu fasilitas kesehatan *luxury* yang ditawarkan pemerintah untuk masyarakat. Berharap 'sofa yang nyaman' saat menggunakan BPJS untuk memenuhi hak kesehatan kita adalah sesuatu yang kurang tepat. Jaring penyelamat tidak akan pernah memberikan kenyamanan pada masyarakat, tapi dapat menghindarkannya dari kondisi darurat yang menenggelamkan. Kebijakan *no class basic health services* adalah kebijakan berani pemerintah yang ditunggu masyarakat.

Bonus Demografi Mau Dibawa Kemana Negara Kita

Dindin Maeludin

Statistisi BPS Kabupaten Ciamis

Akhir-akhir ini kita sering mendengar yang namanya Bonus Demografi, baik itu dari media massa atau pun dari beberapa konten internet. Dikutip dari UNFPA Bonus Demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana populasi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun), bahkan lebih jauh UNFPA menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan layak dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi manakala suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik. Indonesia siap menghadapi bonus demografi hingga tahun 2036.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengadopsi konsep ini ke dalam kebijakan pembangunannya. Presiden Jokowi optimis bahwa bonus demografi yang akan dicapai bangsa ini bisa menjadi bonus lompatan kemajuan bangsa (disampaikan pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke 74 Tahun 2019 pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI). Dikatakan bonus demografi karena setiap negara hanya akan memperoleh masa emas tersebut hanya satu kali saja.

Dilihat dari data (BPS) proyeksi penduduk tahun 2015-2045 hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020, dimana angka tersebut terdiri atas 135,34 jiwa laki-laki dan 134,27 jiwa perempuan. Jika dilihat dari kelompok umur posisi terkecil ada di kelompok umur 0-4 tahun (66,07 juta jiwa) disusul pada usia tidak produktif yaitu usia 65+ tahun (18,2 juta jiwa) dan terbesar berada pada usia 15-64 tahun (185,34 juta jiwa). Inilah yang akan negara kita alami yaitu *“Bonus Demografi”*.

Pada masa ini (*dilihat dari data di atas*), usia produktif lebih banyak sehingga angka ketergantungan (*diharapkan*) akan semakin kecil. Karena tingginya penduduk usia produktif akan mampu secara optimal berkontribusi dalam pembangunan negara ini. Hal yang tidak kita harapkan adalah jangan sampai dari segi usia tergolong produktif namun dari segi kualitas rendah terutama dari segi karakter dan sikap, karena akan dikhawatirkan dengan kondisi demikian kita tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini terlebih dengan adanya revolusi industri 4.0.

Untuk memulainya adalah membentuk karakter dari keluarga kita sendiri, karena secara tidak langsung merupakan subjek sekaligus objek dimana pada saat ini anak-anak kita sudah memasuki masa keemasannya yang diharapkan dapat menjadi generasi untuk membangun Indonesia lebih maju dan bermartabat.

Namun bukan hal yang mudah untuk membentuk karakter anak-anak kita, meskipun dalam kesehariannya selalu berkumpul dengan keluarga dan tidak akan dihasilkan karakter secara instan atau melalui proses pendidikan secara formal. Menurut praktisi pendidikan Prof. Suyanto Ph.D, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama dalam lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari pernyataan di atas, dibutuhkan peranan penting dalam pembentukan karakter dimulai dari keluarga karena merupakan elemen terkecil namun berpengaruh sangat besar dalam masa depan anak dan bisa diibaratkan orang tua merupakan guru yang akan mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemudian dari masyarakat kita sebagai orang tua harus bisa memfilter anak-anak kita dari pergaulan yang akan menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Dari proses inilah diharapkan akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter. Bukan generasi yang mudah putus asa, Namun generasi yang kita harapkan adalah generasi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah dan penuh tanggung jawab dalam menjalani pilihan hidupnya.

Mari jadikan anak Indonesia menjadi generasi berkualitas yang berkarakter unggul penuh dengan nilai-nilai yang luhur, sesuai dengan apa yang dicita-cita para pemimpin dan pendahulu kita, sehingga negara Indonesia akan mampu bersaing bahkan tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi masuk dalam jajaran negara maju. Semoga

Tapera dan Rumah Layak Huni

Dindin Maeludin

Statistisi BPS Kabupaten Ciamis

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), diharapkan akan penyediaan perumahan bagi warga negara.

Rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi umat manusia. Namun pada kenyataannya sejumlah penduduk Indonesia masih belum memiliki rumah milik sendiri dan belum tinggal di rumah yang layak, bahkan telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan yang layak”.

Pembangunan perumahan dan permukiman memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya, dan memberikan efek *multiplier* terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2019 sekitar 20% rumah tangga di Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan 60% rumah tangga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Sejak tahun 2015 pemerintah telah merealisasikan

program pembangunan sejuta rumah setiap tahun untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah yang layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan menunjukkan bahwa warga negara yang tinggal di perkotaan dan perdesaan sebanyak 69,59 % yang memiliki dan membangun rumahnya sendiri, sementara dilihat dari cara membeli atau melalui pengembang sekitar 3,72%.

Dilihat dari data di atas diharapkan dengan adanya program Tapera, setiap warga negara akan terpenuhi dalam pemenuhan akan perumahan yang layak huni, bahkan lewat program ini pemerintah menyebutkan ingin memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pekerja yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang selama ini sulit untuk memilikinya.

Namun yang namanya kebijakan pasti ada nilai plus dan minusnya. Di satu sisi pemerintah menginginkan rakyatnya hidup bahagia dengan memiliki rumah tinggal sendiri dan layak untuk dihuni, tetapi di sisi lain bagi sebagian orang kebijakan ini cukup membebani karena akan semakin bertambahnya pengeluaran apalagi bagi warga yang tidak mempunyai status sebagai pekerja (peserta mandiri), meskipun pada akhirnya nanti tabungan tersebut akan kembali kepada peserta itu sendiri.

Pada akhirnya dibalik pro dan kontra mengenai Tapera ini, semoga ada manfaatnya bagi warga negara

yang memang sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.

<https://jabar.bps.go.id>

Mau Cari Data, tapi Takut Corona?

Vira Wahyuningrum

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Pak, sudah boleh berkunjung ke pelayanan? Min (Admin), kapan pelayanan data dibuka? Untuk permintaan data apakah harus datang langsung? Begitu kira-kira pertanyaan dari beberapa konsumen data di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Jawa Barat. Tak sedikit yang menanyakan hal ini melalui *live chat*, telepon, *email*, media sosial maupun secara langsung pada satpam kantor BPS.

Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait pandemi *Covid-19*, pelayanan publik dari instansi pemerintah juga terdampak. Untuk pencegahan penyebaran virus *Corona* atau *Covid-19* dilakukan penyesuaian pada sistem pelayanan. Mengikuti Surat Edaran dari Pemerintah Provinsi dan BPS RI, PST Jawa Barat mengalihkan sistem pelayanan data *offline*/datang langsung menjadi pelayanan *Online*.

Sejak 17 Maret 2020, layanan PST dialihkan secara *Online* melalui *live chat*, telepon, *email* dan beberapa aplikasi untuk konsultasi dan permohonan data. Layanan *Online* memang sudah tersedia sebelum adanya pandemi, namun konsumen data lebih familiar dengan kunjungan dan konsultasi atau tatap muka langsung ke PST. Konsumen data yang paling dominan di PST adalah pelajar dan mahasiswa. Mereka memanfaatkan data untuk menyelesaikan tugas sekolah/kuliah maupun pendukung skripsi dan tesis.

Pada kondisi normal sebelum pandemi *Covid-19*, kunjungan datang langsung ke PST memuncak pada bulan Maret-April. Berdasarkan statistik pengunjung PST yang dipublikasikan BPS Provinsi Jawa Barat, pada periode tersebut setiap tahunnya terjadi lonjakan pengunjung. Rata-rata pengunjung pada bulan puncak kunjungan mencapai 9-10 orang per hari. Tentunya tren pengunjung PST periode bulan yang sama di tahun ini mengalami perubahan yang signifikan. Tidak ada kunjungan konsumen datang langsung ke PST Jawa Barat sejak diberlakukannya PSBB.

Selama transisi peralihan ke layanan *Online* hingga kini, masih banyak konsumen data PST yang bertanya-tanya mengenai prosedur memperoleh data tanpa kunjungan secara langsung. Kebanyakan adalah mahasiswa yang sedang bergelut menyelesaikan skripsi dan tesis. Meskipun kegiatan perkuliahan pun dialihkan secara *Online*, kebutuhan akan data tetap berjalan. Utamanya untuk mendukung tugas perkuliahan.

Permintaan data maupun informasi dari PST BPS sebenarnya tidak harus melalui prosedur kunjungan langsung. Apalagi dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Pengunjung dan konsumen data lebih disarankan untuk menggunakan layanan *Online*.

Layanan *Online* PST yang paling utama adalah *website*. Konsumen data dapat mengakses laman <https://jabar.bps.go.id>. Untuk wilayah Jawa Barat, website ini dikelola oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Selain itu, website ini juga terkoneksi dengan link *website* 27 BPS

kabupaten/kota se-Jawa Barat. Melalui *website* ini konsumen data dapat mengakses data dan informasi serta aplikasi-aplikasi yang disediakan berkaitan dengan layanan data PST.

Konsumen yang mengakses *website* selama pengalihan layanan tercatat melonjak pada bulan Maret - April 2020. Pada Maret 2020, total pengunjung (*visitors*) mencapai 34,7 ribu dengan rata-rata pengunjung per hari lebih dari 1.100 pengunjung. Total kunjungan ini merupakan yang tertinggi sejak *website* ini beroperasi di tahun 2013. Adanya pandemi membuat konsumen data memilih memanfaatkan layanan *Online* dan mengakses data melalui *website*.

Konten dalam *website* dapat diakses dan diunduh (*download*) secara gratis oleh pengguna. Publikasi, rilis Berita Resmi Statistik dan tabel-tabel menurut subyek data tersedia di sini. Aksesnya cukup mudah dengan memilih menu-menu yang ditampilkan. Untuk konsumen/pengguna data yang belum tahu dan ingin bertanya mengenai ketersediaan data yang dibutuhkan, dapat memanfaatkan menu *live chat* di *website* ini.

Saat membuka laman *website*, di pojok kanan bawah tersedia menu *live chat*. Operator PST akan melayani pertanyaan melalui menu ini pada jam operasional. *Live chat* melalui *website* buka pada hari kerja pukul 08.30 hingga 15.30 WIB. Selain melalui *live chat* ini, konsumen juga dapat mengirimkan pertanyaan via *email* PST yang tercantum pada bagian bawah laman *website*.

Animo konsumen pada menu *live chat* ini juga cukup tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya, pengguna

layanan *live chat* kumulatif pada triwulan pertama 2020 meningkat hingga 8,84 persen. Pada triwulan kedua, jumlah pengguna layanan *live chat* maupun pengunjung *website* secara umum mengalami penurunan. Mengikuti trend tahun sebelumnya, pada triwulan 2 merupakan masa libur sekolah dan Hari Raya Idul Fitri sehingga mempengaruhi jumlah pengunjung yang mengakses *website*.

Mayoritas konsumen data menanyakan tentang data statistik yang dibutuhkan untuk penyusunan tugas perkuliahan, penelitian dan bahan evaluasi. Selain pertanyaan mengenai ketersediaan dan kebutuhan data, pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) *Online* 2020 juga menjadi faktor peningkatan pengguna layanan *live chat*. SP *Online* oleh BPS dilaksanakan pada 15 Februari - 31 Maret 2020 yang lalu dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Sebagian masyarakat memanfaatkan menu *live chat* pada *website* BPS untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan SP *Online*.

Sementara itu, jumlah permintaan data yang masuk melalui *email* PST pun mengalami peningkatan. Pada Maret 2020, banyaknya *email* permintaan data meningkat 40 persen dibandingkan bulan Februari 2020. Demikian pula pada April, kebutuhan permohonan data melalui *email* juga masih cukup tinggi seperti bulan sebelumnya.

Khusus layanan konsultasi statistik, konsumen PST dapat memanfaatkan aplikasi *meeting Online*. Untuk meminimalkan pertemuan secara langsung, PST menyediakan layanan konsultasi statistik secara *Online*

dengan agenda yang disepakati sebelumnya. Informasi mengenai syarat dan ketentuan secara lebih detail dapat dikomunikasikan dengan operator yang siap membantu konsumen data.

Untuk keperluan yang mendesak atau mengharuskan kunjungan datang langsung, layanan *offline* PST sudah dibuka kembali sejak pertengahan bulan Juni 2020. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Protokol kunjungan langsung ini dapat disimak pada *pop up website* BPS Jawa Barat.

Secara umum, pengunjung wajib mengikuti standar protokol kesehatan untuk megantisipasi penyebaran virus *Corona*. Protokol utamanya adalah pengunjung wajib menggunakan masker, menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan dan menjaga jarak antar pengunjung maupun petugas PST. Aturan tambahan yang harus dipatuhi adalah pengunjung tidak diperkenankan mengakses buku-buku atau publikasi tercetak di PST. Publikasi tersedia dalam *softcopy* yang dapat diakses melalui PC (*Personal Computer*) yang sudah diatur jaraknya sesuai protokol kesehatan.

Pada praktiknya, alur kunjungan tersebut dapat diikuti dengan baik. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan juga disediakan di tempat pelayanan. PST untuk kunjungan langsung dibuka pada hari kerja dengan penyesuaian jam pelayanan, yaitu dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Menurut data kunjungan langsung sejak awal Juni hingga minggu ketiga Juli 2020 ini, rata-rata kunjungan

datang langsung di PST hanya 1 orang per hari. Konsumen data masih lebih memilih layanan *Online* daripada datang langsung ke PST. Semoga konsumen data dapat memanfaatkan informasi dan layanan yang disediakan dengan baik. Saat ini situasi *new normal* masih dalam tahap peralihan. Aktivitas pelayanan publik juga sedang melakukan penyesuaian tatanan baru. Termasuk pelayanan di PST Jawa Barat, tetap berusaha mengedepankan pelayanan prima dengan moto “Melayani dengan Hati”.

7 Provinsi dengan Capaian Indeks Demokrasi Kategori Baik

Vira Wahyuningrum
Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Awal bulan kemerdekaan RI yang ke-75 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

IDI merupakan alat untuk menakar perkembangan demokrasi di Indonesia berupa indikator komposit yang mencakup aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Beberapa variabel dan indikator pendukung dalam pengukuran IDI dikelompokkan dalam 3 aspek tersebut.

Penghitungan IDI telah dilakukan sejak 2009 dan perumusannya dilakukan oleh BPS bersama lembaga negara yang lain yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

IDI nasional 2019 mencapai 74,92 (skala 0 sampai 100), mengalami peningkatan 2,53 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,39. Capaian indeks 2019 ini selisih 0,08 poin di bawah target IDI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sebesar 75,00.

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, setelah mengalami penurunan pada 2015 dan 2016, IDI nasional pada 2017-2019 menunjukkan tren meningkat. Secara

umum, sejak 2009 hingga 2019, IDI nasional berfluktuasi pada kategori “sedang” (indeks 60-80) dengan indeks tertinggi dicapai pada tahun 2019 dan terendah pada tahun 2012 sebesar 62,63.

Berdasarkan aspek penyusunnya, perkembangan indeks pada aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi lebih berfluktuasi dibandingkan aspek kebebasan sipil. Capaian indeks menurut aspek pembentuk IDI 2019 yaitu aspek kebebasan sipil sebesar 77,20, aspek hak-hak politik sebesar 70,71 dan aspek lembaga demokrasi 78,73. Perkembangan indeks pada tiap aspek ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program pembangunan politik dan demokrasi pada masa mendatang.

Meskipun capaian indeks pada aspek kebebasan sipil cenderung tinggi dan tidak fluktuatif, trennya menunjukkan penurunan dari kategori “baik” (indeks 80-100) pada 2009 sebesar 86,97 menjadi kategori “sedang” pada tahun 2019. Sedangkan pada aspek hak-hak politik yang pada IDI 2009 sebesar 54,60 dan masuk dalam indeks kategori “buruk” (indeks kurang dari 60) justru semakin menunjukkan perbaikan. Indeks pada aspek hak-hak politik ini menunjukkan tren meningkat dan masuk pada kategori “sedang” sejak 2014 hingga 2019.

Indeks pada aspek lembaga demokrasi paling fluktuatif dalam periode 10 tahun terakhir, namun masih tetap berada pada kategori “sedang” dalam rentang indeks 62,05 hingga 78,73. Tahun 2019 ini capaian indeks pada aspek lembaga demokrasi untuk pertama kalinya melampaui indeks pada aspek kebebasan sipil.

Selain di tingkat nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di level provinsi. Terdapat 22 provinsi dengan capaian IDI 2019 di atas indeks nasional. Sebanyak 7 dari 22 provinsi tersebut masuk dalam kategori “baik”. Sementara pada tahun sebelumnya, terdapat 21 provinsi dengan IDI di atas capaian indeks nasional dan 5 di antaranya berada dalam kategori “baik”. Hal ini menggambarkan peningkatan kualitas dan kuantitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Berikut ini adalah 7 provinsi dengan capaian IDI 2019 dalam kategori “baik”:

DKI Jakarta

Bertahan di posisi pertama, capaian IDI DKI Jakarta sebesar 88,29 dengan kenaikan indeks 3,21 poin dibandingkan IDI 2018. Aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan dengan indeks masing-masing sebesar 83,86 dan 91,89. Sementara aspek kebebasan sipil mengalami penurunan 4,08 poin dibandingkan indeks tahun sebelumnya menjadi sebesar 91,01.

Kalimantan Utara

Di posisi kedua, Kalimantan Utara dengan capaian IDI 2019 sebesar 83,45. Tahun sebelumnya IDI Kalimantan Utara berada di urutan keempat. Dibandingkan IDI 2018, terjadi peningkatan 2,38 poin yang didukung oleh kenaikan signifikan pada aspek lembaga demokrasi. Sebaliknya, pada 2 aspek lainnya menunjukkan

penurunan indeks. Capaian indeks menurut aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi di Kalimantan Utara masing-masing sebesar 96,60; 74,92 dan 80,46.

Kepulauan Riau

IDI Kepulauan Riau pada 2019 menempati urutan ketiga dengan indeks sebesar 81,64, mengalami kenaikan indeks sebesar 2,45 poin dibandingkan 2018. IDI Kepulauan Riau masuk dalam kategori “baik” setelah tahun sebelumnya berada dalam kategori “sedang”. Menurut komponen pembentuknya, seluruh aspek menunjukkan kenaikan indeks dengan capaian aspek kebebasan sipil sebesar 92,66, hak-hak politik sebesar 78,30 dan lembaga demokrasi sebesar 73,10.

Bali

IDI Bali mengalami penurunan 0,99 poin di tahun 2019 dari sebesar 82,37 menjadi 81,38. Tergeser oleh Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau ke posisi empat, dimana pada 2018 capaian IDI Bali berada di peringkat tertinggi kedua. Aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan indeks pada 2019 dengan capaian masing-masing sebesar 68,38 dan 90,42. Namun, sebaliknya pada aspek kebebasan sipil mengalami penurunan indeks 4,12 poin menjadi sebesar 90,60.

Kalimantan Tengah

Capaian IDI Kalimantan Tengah tahun 2019 sebesar 81,16 berada di posisi tertinggi kelima. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan kenaikan IDI tertinggi di Indonesia. Kenaikan IDI 2019 dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 9,89 poin dan menunjukkan lompatan dari kategori “sedang” ke kategori “baik”. Aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami penurunan, namun aspek hak-hak politik naik signifikan hingga 27,28 poin. Capaian indeks pada aspek kebebasan politik sebesar 86,31, hak-hak politik sebesar 78,24 dan lembaga demokrasi sebesar 79,32.

Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur dari wilayah timur Indonesia dengan capaian IDI 2019 sebesar 81,02 berada di posisi keenam. Meskipun mengalami penurunan IDI dan tergeser dari posisi ketiga di tahun sebelumnya, IDI Nusa Tenggara Timur masih termasuk dalam kategori “baik”. Serupa dengan Kalimantan Tengah, indeks pada aspek hak-hak politik mengalami kenaikan, sedangkan 2 aspek lainnya mengalami penurunan. Indeks pada aspek hak-hak politik pada 2019 sebesar 78,58, sedangkan kebebasan sipil dan lembaga demokrasi masing-masing sebesar 93,97 dan 68,62.

DI Yogyakarta

Posisi ketujuh pada urutan provinsi dengan IDI 2019 kategori “baik” ditempati DI Yogyakarta. IDI 2019 DI

Yogyakarta sebesar 80,67 dengan indeks aspek kebebasan sipil sebesar 92,90, hak-hak politik sebesar 72,51 dan lembaga demokrasi sebesar 78,25. Aspek kebebasan politik dan lembaga demokrasi mengalami kenaikan, sedangkan aspek hak-hak politik mengalami penurunan. IDI 2019 di DI Yogyakarta mengalami penurunan tipis sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, capaian IDI 2019 pada 26 provinsi lainnya berada dalam kategori “sedang” dan 1 provinsi masih berada pada kategori ‘buruk’. IDI Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 masih termasuk dalam kategori “buruk” dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ke depannya, capaian IDI diharapkan dapat ditingkatkan baik di level nasional maupun daerah/provinsi. Indeks yang telah dicapai pada tiap aspek dan indikator pembentuk IDI dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi upaya perbaikan kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia. Perkembangan demokrasi dan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan kerjasama dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat.

Jangan Berharap Indonesia Bisa Maju

Sarah Nurlaily

Statistisi BPS Kabupaten Bogor

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 disebutkan bahwa visi Indonesia adalah terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu *Satu*, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. *Dua*, Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. *Tiga*, Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. *Empat*, Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. *Lima*, Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. *Enam*, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. *Tujuh*, Memperkuat stabilitas polhukhanham dan transformasi pelayanan publik. Hal pertama yang diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah tersedianya data yang akurat supaya pembangunan yang dilakukan akan tepat sasaran. Pembangunan tanpa data akan menjadi sesuatu yang sia-sia.

Tak kenal maka tak sayang, pepatah yang sering terdengar di telinga kita. Sesuatu yang belum dikenal, akan terasa asing. Seperti halnya dengan data. Orang menyebut data sebagai angka-angka. Secara umum, data dapat didefinisikan sebagai nilai (*value*) yang

mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau peristiwa (Irmansyah: 2003). Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan data, jumlah anggota keluarga, jumlah siswa per kelas, harga sembako, sampai data yang sedang *happening* yaitu data jumlah orang yang terpapar virus *Covid 19*. Semua data menyajikan informasi agar kita mengetahui dan dapat menentukan langkah apa yang dapat dilakukan selanjutnya. Saat mengetahui data jumlah orang terpapar virus *Covid 19* yang *update* setiap hari dan dengan kecendrungan selalu meningkat, kita dapat lebih berhati-hati dan menjaga diri dengan memakai protokol Kesehatan dan menjaga jarak saat diluar rumah dan tidak pergi bila tidak ada kepentingan yang mendesak.

Salah satu Lembaga Pemerintah yang mengurus data adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik, disebutkan bahwa BPS adalah penyelenggara kegiatan statistik dasar baik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Berdasarkan basis data kependudukan dan pencatatan sipil dari Kementerian Dalam Negeri, BPS melaksanakan Sensus Penduduk. Pada awal tahun, tepatnya pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Mei 2020, Sensus Penduduk telah dilaksanakan secara *Online*. Penduduk dapat mengisi sendiri data kependudukan melalui www.sensus.bps.go.id. Kemudian BPS Kembali mengupdate data penduduk pada tanggal 1 sampai dengan 15 September secara *door to door*. Sensus Penduduk merupakan satu dari tiga sensus yang dilaksanakan oleh BPS yaitu Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi. Selain

sensus, BPS juga melaksanakan survei-survei yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP), dan masih banyak yang lainnya. Berbagai macam sensus dan survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan data. Berbagai macam tahapan sebelum dilakukannya pengumpulan data mulai dari menentukan arah tujuan dan maksud dari pengumpulan data, menyiapkan instrument, konsep definisi yang berstandar, metodologi penelitian, jumlah petugas, pelatihan petugas, direncanakan secara matang. Begitupun setelah data terkumpul, disusun sedemikian rupa agar menarik dan informatif bagi segenap konsumen data mulai dari pelajar, akademisi, *stakeholder*, dan pemerintah. Data sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan pembangunan. Data yang berkualitas menjadikan hasil pembangunan yang juga berkualitas. Begitu berharganya data, sampai data dapat dikatakan sebagai emas.

Manfaat data dapat dirasakan oleh kita semua. Jalan yang dibangun, sarana pendidikan (seperti sekolah, universitas), sarana kesehatan (seperti puskesmas, rumah sakit), sarana peribadatan, sarana ekonomi (seperti pasar, mall), sarana hiburan (taman, tempat rekreasi), sarana komunikasi (*tower*), semua berawal dari data. Kunci data berkualitas adalah partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Dari kita untuk kita.

Indonesia adalah rumah kita. Kita ingin rumah yang nyaman untuk dihuni. Mengingat betapa pentingnya ada, maka salah satu langkah sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan **Sadar Data. Sadar data karena**

cinta data. Baik penduduk maupun pelaku usaha, berikan data yang akurat dan terperinci pada situs maupun petugas yang berwenang. Saat melakukan pendataan, untuk mengurangi *cyber crime* dan pencurian data, petugas akan dilengkapi atribut, tanda pengenal, dan surat tugas. Di era yang serba digital ini, pemerintah juga memanfaatkan media *Online* untuk kegiatan besar berupa sosialisasi mengenai kegiatan apa yang akan dilaksanakan, situs yang dapat diakses, maupun atribut dari petugas akan mendata. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan data yang telah diberikan. Mari sama-sama bergotong royong menyediakan data yang akurat untuk Indonesia Maju. Kalau bukan kita siapa lagi.

“Statistik” Indonesia

Siti Anisah

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan

Ditengah hirup pikuk “corona”, ada satu momen penting yang luput dari masyarakat Indonesia. Yaitu Hari statistik yang jatuh setiap tanggal 26 September. Walaupun diperingati serentak hari statistik nasional oleh insan statistik secara *virtual*. Namun gemanya belum cukup memberi pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa statistik ini mempunyai peran penting untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Sejarah

Lahirnya statistik di Indonesia berawal dari upaya untuk memenuhi rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar setiap negara anggotanya menyelenggarakan sensus penduduk secara serentak. Pemerintah RI saat itu memberlakukan UU No 6 tahun 1960 tentang Sensus sebagai pengganti *Volkstelling Ordonanties* 1930. Kemudian dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Semesta Berencana, pada tanggal 26 September 1960 Pemerintah RI memberlakukan UU No 7 tahun 1960 tentang Statistik sebagai pengganti *Statistiek Ordonantie* 1934. UU tersebut secara rinci mengatur penyelenggaraan statistik dan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Pada Agustus 1996, Presiden RI kala itu, Soeharto, menetapkan tanggal diundangkannya UU No 7 tahun 1960

tentang Statistik tersebut sebagai "Hari Statistik" yang dilaksanakan secara nasional. Latar belakangnya karena kelahiran UU tersebut merupakan titik awal perjalanan BPS dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Dengan undang-undang tersebut, BPS mempunyai tugas penting mengadakan Sensus Penduduk dan sensus lainnya (Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi) setiap 10 tahun sekali. Serta melakukan pendataan secara survey berbagai kategori, baik yang periodiknya setiap bulan, setiap triwulan, setiap kuartal, setiap semester, setiap tahun ataupun insidental sesuai tema ataupun waktu pelaksanaannya

Arti Statistik.

Statistik identik dengan data. Menurut Prof. Dr. Sudjana, M.A., M.Sc, statistik adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan kesimpulan berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan. Walaupun terkadang orang awam fahamnya statistik itu hanya angka-angka tanpa makna.

Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari statistik dan pemanfaatannya. Seperti dalam pertandingan sepakbola, sering diperlihatkan statistik pertandingan antara dua tim yang bertanding sebagai bahan analisa. Atau yang paling sederhana kita membandingkan harga sayur di toko satu dengan toko lain untuk mencari harga termurah, ini juga statistik.

Fungsi dan Peran BPS

Di sisi lain, BPS sebagai lembaga statistik di Indonesia bisa disebut juga sebagai pabrik data. Hal ini secara tersirat BPS sebagai sumber kekayaan zaman *now*. Seperti yang disampaikan presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa data adalah jenis kekayaan baru, data adalah *new oil*, bahkan lebih berharga daripada minyak. Dan kata beliau pula data yang valid adalah kunci dari pembangunan (Jokowi, 24 Januari 2020). Dan perlu dipahami, data yang dihasilkan BPS tidak diperoleh secara instan. Ada kaidah yang perlu dijaga dan ada proses yang dijalankan. Dimulai dari penyusunan konsep dan metodologi, pendataan di lapangan sampai kesimpulan yang menghasilkan informasi.

Walaupun masyarakat awam masih sering mendefinisikan pendataan BPS itu melulu untuk data dasar calon penerima bantuan. Namun realnya, data-data BPS manfaatnya sangat luas. Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah jelas data digunakan sebagai bahan rencana dan evaluasi pembangunan di berbagai bidang. Bagi *stakeholder* selain pemerintah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Sebagai contoh bagi mahasiswa tugas akhir, data BPS sering dijadikan sumber data dalam penelitian para mahasiswa. Seperti melakukan peramalan (*forecasting*) harga saham, peramalan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 10 tahun ke depan, perkiraan jumlah penduduk 10 tahun kedepan dan lainnya. Selain itu data BPS bisa digunakan untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan sebuah fenomena dari tahun ke tahun (*time series*), seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan

ekonomi dan lain sebagainya. Contoh *stakeholder* lainnya misal para pebisnis, data BPS bisa dijadikan sebagai bahan analisis pasar dalam rencana bisnis.

MODA PENDATAAN

Pendataan di BPS dilakukan dengan langsung (data primer) dan tidak langsung (data sekunder). Dan selama ini pendataan dilakukan dengan moda pendataan menggunakan kertas (*paper*). Namun seiring dengan kemajuan teknologi, beberapa tahun terakhir moda pendataan perlahan mengalami pergeseran menuju moda pendataan *paperless*. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal menuju BPS berkelas dunia.

Contohnya ada beberapa pendataan jenis survei sudah beralih ke moda pendataan CAPI (*Computer Assistant Personal Interviewing*). Sebutlah Survei KSA (Kerangka Sampel Area) dan SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi). Termasuk hajat besar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) September ini, diawali dengan Sensus Penduduk *Online* yang dilakukan dari tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. SP2020 merupakan sensus pertama yang dilakukan secara *Online* dengan moda pendataan CAWI (*Computer Assistant Web Interviewing*). Hasilnya BPS mencatat bahwa sebesar 51,36 juta atau 19,05 persen dari data penduduk Indonesia yang ada telah ikut serta berpartisipasi dalam SP *Online*.

Untuk menuju BPS berkelas dunia, memang banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi untuk menuju Indonesia maju, perbaikan internal BPS terus menerus BPS harus terus dilakukan dan sangat mungkin mencapai titik

keberhasilan. Disisi lain kesadaran masyarakat akan pentingnya data sangat penting ditumbuhkan, sehingga setiap proses oleh BPS dalam menghasilkan data yang komprehensif dan berkualitas akan lebih mudah terlaksana dengan baik. Jika itu terjadi, Indonesia maju dalam data hanya menunggu waktu untuk terwujud.

<https://jabar.bps.go.id>

Menguk Perilaku Masyarakat di Era *New Normal*

Siti Anisah

Statistisi BPS Kabupaten Kuningan

Penghujung 2019 kita semua dikejutkan dengan berita sebuah virus mematikan yang penyebarannya sangat cepat. Saat itu terjadi di Kota Wuhan, China. Namun tidak begitu lama menjangkiti hampir semua negara. Termasuk negara kita Indonesia. Sehingga dunia tepatnya WHO memutuskan bahwa wabah virus ini sebagai pandemi dunia. Belakangan kita mengenal wabah ini sebagai virus *corona* atau *Covid-19*.

Kasus pertama di Indonesia terkonfirmasi di akhir Februari 2020. Perlahan tapi pasti masyarakat yang terpapar *Covid-19* terus bertambah. Termasuk Korban yang wafat. Tentu menjadi perhatian serius banyak pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah, sehingga untuk menghentikan semakin menyebarkan *Covid-19*, dibuatlah berbagai kebijakan.

Karena titik penyebarannya melalui kerumunan dan kontak fisik. Maka kebijakan pembatasan fisik atau jaga jarak antar manusia menjadi anjuran yang terus dilakukan. Termasuk sosialisasi hidup bersih sangat gencar dilakukan. Yang kita kenal sekarang sebagai protokol kesehatan (menjaga jarak, memakai masker dan sering membersihkan tangan). Dan secara lebih luas kebijakan yang dilakukan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beserta peraturan turunannya. Atau

kebijakan sejenis yang secara prinsip agar penyebaran *Covid-19* bisa dihentikan.

Berjalannya waktu, wabah ini belum tampak kapan tuntasnya. Disisi lain aktivitas masyarakat khususnya sosial dan ekonomi tidak bisa dihentikan seutuhnya. Oleh karena itu dibuatlah kebijakan-kebijakan agar aktivitas bisa tetap berjalan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga penyebaran *Covid-19* bisa dicegah. Tentu protokol kesehatan ini sesuatu yang baru bagi masyarakat. Dan mau tidak mau di *era new normal* ini masyarakat harus patuh menjalaninya secara bertanggungjawab.

Pertanyaannya apakah masyarakat Indonesia patuh menjalankan protokol kesehatan ini? Karena sebuah kebiasaan baru tentunya masyarakat perlu adaptasi. Banyak penyesuaian yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak mudah, seluruh masyarakat harus terbiasa dan patuh menjalankannya. Karena keberhasilan mencegah penyebaran *Covid-19* sangat tergantung dari kepatuhan masyarakat menjalani protokol kesehatan ini.

Tingkat Kepatuhan dalam Pencegahan *Covid-19*

Dalam rangka memotret kepatuhan masyarakat menjalani protokol kesehatan, pada tanggal 7-14 September 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*. Survei ini melibatkan sebanyak 90.967 responden dengan persentase responden wanita sebanyak 55,23 persen dan responden laki-laki sebanyak 44,77 persen. Walaupun

tidak mewakili kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, analisis yang dihasilkan dari survei ini merupakan gambaran dari individu yang secara sukarela menjadi responden (orang yang berpartisipasi dalam survei) dalam survei ini.

Dari hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi *Covid-19*, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan responden dalam pencegahan *Covid-19* sudah baik. Hal ini terlihat dari data yang tercatat, yaitu sebanyak 91,98 persen responden memakai masker, 77,71 persen responden menggunakan *hand sanitizer*/disinfektan, sebanyak 75,38 persen mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, 81,85 persen menghindari jabat tangan, 76,69 persen menghindari kerumunan dan responden yang menjaga jarak minimal 1 meter sebanyak 73,54 persen. Dari segi jenis kelamin survei ini mencatat bahwa wanita lebih taat dengan protokol kesehatan ketimbang laki-laki. Tingkat kepatuhan ini berbanding lurus dengan persepsi responden atas efektivitas protokol kesehatan terhadap pencegahan terinfeksi *Covid-19*.

Alasan tidak Menerapkan Protokol Kesehatan

Disisi lain, masih dari sumber data yang sama, beragam alasan responden yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Pertama alasan yang tertinggi sebanyak 55 persen mengatakan karena tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Alasan selanjutnya mengatakan bahwa pekerjaannya menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan. Terus mengatakan bahwa harga masker, *faceshield*, *hand sanitizer*

atau APD lain cenderung mahal. Selanjutnya mengatakan alasannya yaitu karena tidak ada kejadian penderita *Covid-19* di lingkungan sekitar. Alasan lainnya lagi karena mengikuti orang lain yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Serta beberapa responden mengatakan pula bahwa aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh (*role model*), dan alasan-alasan lainnya.

Didalam survei ini juga dianalisis terkait respon responden terhadap orang yang terinfeksi *Covid-19* di lingkungan sekitarnya. Hasilnya sebanyak 45 persen lebih memperketat protokol kesehatan yang dijalankan, sebagian kecil (7 persen) mengucilkan/stigma negatif, 22 persen memberikan dukungan, 24 persen tidak tahu karena tidak ada kasus *Covid-19* di lingkungan sekitar dan sebanyak 2 persen tidak melakukan apa-apa.

Dari hasil survei yang sama, BPS mencatat juga terkait perbandingan frekuensi keluar rumah saat ini dibanding dengan sebelum Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)/*new normal* (dibandingkan dengan masa sebelum 1 Agustus 2020). Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 24,63 persen mengatakan lebih sering keluar rumah dibandingkan sebelum *new normal*. Dari yang lebih sering keluar rumah, sebanyak 20,08 persennya dikarenakan kepentingan pekerjaan, 1,47 persen untuk kebutuhan sosial dan sebanyak 3,07 persen untuk *leisure* atau dalam kata lain bersenang-senang. Persentase responden wanita yang lebih sering keluar rumah untuk kepentingan *leisure* lebih tinggi dibandingkan responden pria. Munculnya keinginan *leisure* karena kebiasaan baru untuk dirumah saja, membuat keinginan untuk *leisure* menumpuk. Sehingga saat diberi kelonggaran (*new normal*),

dimanfaatkan untuk mewujudkan keinginan *leisure*. Dilihat dari segi usia, semakin tinggi usia semakin jarang frekuensi keluar rumah dibandingkan sebelum *new normal*. Hal ini kemungkinan dikarenakan semakin tinggi usia semakin rentan terkena *Covid-19*, terutama usia lanjut.

Secara persepsi, 17 dari 100 responden menyatakan bahwa sangat tidak mungkin dan tidak mungkin terinfeksi/tertular *Covid-19*, selebihnya menyatakan mungkin tertular *Covid-19*. Dari yang menyatakan sangat tidak mungkin dan mungkin, responden wanita lebih banyak mengatakannya. Sedangkan dari segi usia didominasi oleh kelompok umur 17-30 tahun.

Disisi lain dari survei yang sama pula, BPS mencatat bahwa 3 media teratas yang paling berpengaruh untuk responden survei memperoleh informasi mengenai protokol kesehatan dan pentingnya mencegah penyebaran *Covid-19* antara lain media sosial (34,05 persen), TV (23,72 persen) dan *whatsapp* (12,30 persen). Media lainnya adalah media *Online*, poster/baliho, instruksi pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Perubahan Pengeluaran dan Status Bekerja

Era *new Normal*, terutama di awal-awal masa pandemi *Covid-19* membuat tatanan pengeluaran rumah tangga mengalami perubahan yang signifikan. Kebiasaan di rumah saja membuat kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat. Hal ini dikarenakan sangat minimnya aktivitas di luar rumah, yang membuat fokus hidup pun berubah. Hal ini terlihat dari hasil survei yang sama, BPS mencatat bahwa lebih dari setengah responden mengaku

pengeluarannya bertambah (52,84 persen). Sebanyak 14,91 persen mengaku pengeluaran tetap dan sisanya mengaku pengeluaran menurun.

Dampak *Covid-19* yang paling terasa dalam kehidupan adalah bidang ekonomi. Banyak kegiatan perekonomian berhenti di awal masa pandemi *Covid-19*. Namun di era *new normal* perlahan banyak yang bangkit kembali. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 59,89 persen responden tetap bekerja, 31,65 persen tidak bekerja, 5,68 persen bekerja tetapi sedang dirumahkan dan sisanya sebanyak 2,78 persen terkena PHK. Persentase ini dibuat tanpa menyertai ASN didalamnya. Untuk yang bekerja sebagian besar melakukan *work From Home* (WFH) dengan diselingi masuk kantor. Dan tercatat pula sebanyak 15,02 persen jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan WFH.

Begitulah gambaran perilaku masyarakat yang terkuak di era *new normal*. Sekali lagi walaupun hasil survei ini memang tidak mewakili masyarakat secara luas. Tetapi setidaknya memberikan gambaran bahwa tidak seutuhnya protokol kesehatan difahami dan dijalankan dengan baik. Padahal kepatuhan dan kesuksesan menjalankan protokol kesehatan salah satu kunci untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Oleh karena itu kita harus terus waspada menghadapi pandemi *Covid-19*. Sehingga keinginan kita bersama, pandemi *Covid-19* ini berakhir cepat terlaksana. Aamiinn

Pahlawan Kesehatan

Singgah Satrio Prayogo

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

Pandemi *Covid-19* belum juga usai. Sejak pertama masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020, sudah tujuh bulan lamanya *Covid-19* masih hidup dan bereproduksi di Indonesia.

Jumlah kasus *Covid-19* terus meningkat setiap harinya. Tidak pandang umur, jenis kelamin, status sosial, kekayaan, semua berpeluang dapat terpapar virus ini.

Dilansir dari situs <https://Covid19.go.id/>, posisi tanggal 18 Oktober 2020, jumlah kasus *Covid-19* terkonfirmasi sebanyak 357.762 kasus se-Indonesia, dengan penambahan kasus sekitar tiga ribu sampai empat ribu per harinya.

Kasus aktif positif berjumlah 63.739 yaitu 17,8 persen dari terkonfirmasi, jumlah yang sembuh sebanyak 281.592, dan 12.431 yang meninggal dunia. DKI Jakarta masih menempati urutan pertama jumlah kasus terbanyak dibanding provinsi lain di Indonesia, yaitu sebanyak 93.356 kasus atau menyumbang 26,1%, kemudian Jawa timur sebanyak 48.690 kasus atau menyumbang 13,6%, dan Jawa Barat sebanyak 30.043 kasus atau menyumbang 8,4% dari total kasus di Indonesia.

Tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 24 Oktober, akan diperingati sebagai Hari Dokter Nasional.

Pada tahun ini, perayaan hari dokter merupakan yang sangat bermakna. Dokter, perawat, dan petugas

kesehatan lainnya sebagai garda terdepan dalam melawan *Covid-19*.

Para pahlawan kesehatan sudah banyak yang gugur melawan keganasan virus ini. Perlengkapan perang yang selalu dipakai seperti baju hazmat dan atribut lengkap bukanlah hal yang mudah. Perjuangan para tenaga kesehatan yang pantang mundur melawan *Covid-19* ini harus diapresiasi setinggi-tingginya. Keringat bercucuran, susah bernafas karena pemakaian masker yang berlapis-lapis, menahan berat sepatu, meninggalkan keluarga untuk bertugas, resiko tinggi untuk terpapar, tidak juga menyurutkan semangat untuk menolong korban *Covid*. Begitu harunya mereka saat mendengar ucapan terimakasih yang begitu tulus dari korban *Covid-19* yang berhasil sembuh.

Sudah berlangsung tujuh bulan lamanya, seharusnya yang menjadi garda terdepan adalah diri pribadi kita sendiri, bagaimana kita menjaga diri dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pola makan makanan sehat, pola mencuci tangan, memakai masker, dan *social distancing* harus terus dilakukan.

Semakin lama beban pemerintah dalam menanggulangi *Covid-19* ini kian bertambah, anggaran penanggulangan *Covid-19* sampai pada mengatasi pengangguran akibat sektor ekonomi yang terpuruk. *Covid-19* tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi berdampak pada masalah ketenagakerjaan dan ekonomi. Resesi ekonomi telah terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan 2 tahun 2020, perekonomian Indonesia

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32 persen dibanding dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Padahal pada tahun-tahun sebelum adanya *Covid-19* ini, perekonomian Indonesia selalu tumbuh sekitar 4 hingga 5 persen. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Indonesia.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan pergudangan sebesar 30,84 persen, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,02 persen. *Covid-19* telah membatasi ruang gerak manusia, pilihan untuk *stay at home*, *work from home*, dan *school at home* merupakan cara terbaik menjaga diri dan orang-orang sekitar. Disisi lain lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif adalah informasi dan komunikasi sebesar 10,88 persen. Kebutuhan akan internet baik untuk bekerja atau sekolah menjadikan penggunaan sarana informasi dan komunikasi meningkat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), razia masker, pembatasan jumlah pengunjung restoran, tempat wisata, merupakan beberapa langkah pemerintah dalam memerangi virus ini, dan harus kita dukung. Para pengusaha, pemerintah dari level terendah sampai level tertinggi (desa/kecamatan, kabupaten, provinsi, dan Nasional) harus berusaha menghambat penyebaran virus ini. Tidak hanya memikirkan jumlah produksi, jumlah barang yang terjual atau berjalannya kegiatan pemerintahan, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana virus ini bisa hilang. Ekonomi harus tumbuh tapi kesehatan tetap nomor satu. Manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Apa gunanya ekonomi tumbuh

bila tidak bisa dinikmati. Sektor ekonomi sudah mulai berjalan, harus didukung oleh protokol kesehatan yang ketat agar menghambat penyebaran *Covid-19* dan pandemi bisa segera berakhir. Kita semua harus menyatakan perang terhadap *Covid-19* ini, jangan kalah, dan pantang menyerah.

<https://jabar.bps.go.id>

Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia

Heri Susanto

Statistisi BPS Kota Banjar

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Salah satu data strategis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan adalah data kependudukan. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik sebagai Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik telah menyelenggarakan Sensus Penduduk (SP) 2020. Sensus Penduduk 2020 menjadi sensus penduduk pertama Indonesia yang memanfaatkan data administrasi kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tujuan Sensus Penduduk 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan

karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Tentunya tujuan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dan menjadi langkah awal untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

Melihat pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, ada dua tahapan yang telah dilaksanakan. Tahapan yang pertama adalah Sensus Penduduk *Online*. Sensus Penduduk *Online* telah dilaksanakan tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Pada Sensus Penduduk *Online*, masyarakat secara mandiri mengisi data melalui laman “sensus.bps.go.id”. Total 51,36 juta penduduk Indonesia telah berpartisipasi pada Sensus Penduduk *Online*. Di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 9,2 juta Penduduk Provinsi Jawa Barat atau 18,58% dari total Penduduk provinsi Jawa Barat telah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk *Online*.

Tahapan kedua yang telah dilaksanakan adalah Sensus Penduduk September. Sensus Penduduk September dilaksanakan tanggal 1 September sampai dengan 15 September 2020. Walaupun ditengah pandemi *Covid-19*, Sensus Penduduk September tetap dilaksanakan. Tentunya pelaksanaan Sensus Penduduk September dengan menerapkan protokol kesehatan. Sensus Penduduk September mencatat seluruh penduduk yang berdomisili di suatu daerah. Adapun mekanisme pendataan Sensus Penduduk September adalah dengan cara melakukan pemeriksaan dan verifikasi daftar penduduk. Daftar penduduk yang digunakan adalah data administrasi kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Penggunaan data

administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil sebagai basis data dasar yang kemudian dilengkapi pada pelaksanaan SP2020 adalah sebagai upaya penting dalam pewujudan Satu Data Kependudukan Indonesia.

Lalu apa *output* yang dihasilkan dari sensus penduduk September 2020? *Output* yang dihasilkan adalah data penduduk menurut jenis kelamin, data penduduk menurut kepemilikan NIK, dan data penduduk menurut domisili. Dari *output* yang dihasilkan tersebut, tentunya ada manfaat yang sangat besar untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Manfaat yang pertama adalah tersedianya data penduduk menurut status domisilinya. Menurut status domisili, akan ada data domisili penduduk secara *defacto* maupun secara *dejure*. Idealnya kondisi penduduk secara *defacto* sama dengan *dejure*. Tetapi kenyataannya, banyak penduduk dengan alamat domisili secara *defacto* berbeda dengan *dejure*. Manfaat yang kedua adalah tersedianya data penduduk yang belum memiliki NIK. Dengan adanya data tersebut tentunya pemerintah dapat membuat perencanaan untuk penyelesaian masalah penduduk yang belum memiliki NIK tersebut.

Pada tahapan Sensus Penduduk September, ditemukan tiga kondisi keberadaan penduduk. Yang pertama, penduduk dengan alamat KTP sama dengan alamat domisili. Kondisi yang pertama ini adalah kondisi yang ideal, karena keberadaan penduduk secara *defacto* sama dengan *dejure*. Kondisi yang kedua, penduduk dengan alamat KTP tidak sama dengan alamat domisili, keberadaannya tidak ditemukan oleh BPS di lapangan, tetapi tercantum dalam daftar penduduk. Kondisi yang

ketiga hampir sama dengan kondisi kedua, alamat KTP tidak sama dengan alamat domisili, keberadaanya ditemukan oleh BPS di lapangan, tetapi tidak tercantum dalam daftar penduduk. Kondisi keberadaan penduduk yang kedua dan yang ketiga menunjukkan bahwa keberadaan penduduk secara *defacto* tidak sama dengan *dejure*. Kondisi ini banyak sekali ditemukan di daerah perkotaan yang menjadi tujuan urbananisasi.

Adanya pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 merupakan upaya menuju terciptanya Satu Data Kependudukan Indonesia. Data kependudukan yang *valid* dan akurat sangat diperlukan untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan, agar segala kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran. Semoga.

Ancaman "Lost Generation" di Tengah Pandemi

Anik Triani

Statistisi BPS Provinsi Jawa Barat

ANCAMAN terjadinya "lost generation" kini menghantui dunia pendidikan akibat wabah *Covid-19* yang masih melanda. Akankah ancaman ini menjadi kenyataan?

Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia belum dirancang untuk menghadapi kejadian pandemi. Terlebih pandemi yang berkepanjangan dengan ketidakpastian seperti *Covid-19* saat ini. Mencoba mencari solusi permasalahan tersebut, pemerintah menerapkan sistem pembelajaran daring atau *Online* yang disebut sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). PJJ sebagai metode pembelajaran utama kini dilakukan dengan cara yang beragam dan sporadis. Namun seiring waktu, disadari upaya tersebut tidak memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik ketimbang pembelajaran di kelas.

Capaian pembelajaran yang diperoleh siswa dalam proses belajar daring sangat bervariasi dan memiliki kesenjangan kualitas yang signifikan. Bagaimana tidak? Untuk siswa yang mampu dan berada di kota, perangkat *laptop* atau komputer dan telepon seluler serta koneksi internet sudah menjadi fasilitas yang biasa digunakan. Namun bagi siswa tidak mampu dan berada di pelosok atau pedesaan,

fasilitas tersebut merupakan barang mewah yang sulit didapat. Fakta tersebut tergambar dari data Susenas Tahun 2018 dimana rumah tangga yang memiliki perangkat telepon selular sebanyak 89,86 persen, sedangkan ke pemilikan komputer hanya 20,05 persen. Adapun rumah tangga dengan akses internet di Indonesia baru sebesar 66,22 persen. Artinya belum seluruh rumah memiliki perangkat dan koneksi internet yang menjadi syarat utama dalam pembelajaran daring.

Kualitas pengajaran daring yang dilakukan sekolahpun beragam. Aplikasi pengajaran daring semisal *zoom*, *google meet* dan lainnya adalah hal yang baru bagi guru dan siswa. Peran orang tua juga turut menentukan dalam proses tersebut. Pemahaman bagaimana menggunakan aplikasi tersebut sangat dibutuhkan. Untuk itu faktor pendidikan orang tua sangat berperan. Ironinya dengan tuntutan sedemikian rupa, karakteristik pendidikan utamanya kepala keluarga di Indonesia masih minim. Tercatat pendidikan kepala keluarga rumah tangga tidak miskin dan rumah tangga miskin maksimal adalah lulusan SD, masing-masing sebesar 49.41 persen dan 74.43 persen (Publikasi Penghitungan dan Analisis Makro 2018, BPS). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan seorang kepala rumah tangga mayoritas masih minim, padahal peran orang tua sebagai pendamping sekaligus fasilitator dalam proses pembelajaran daring sangat menentukan.

Daya dukung ekonomi orang tua tidak kalah pentingnya. Pengeluaran ekstra untuk kuota internet membengkak di luar kebiasaan sebelumnya. Padahal banyak orang tua yang terkena PHK, pendapatan menurun dan sebagainya. Fenomena ini terlihat dari jumlah pengangguran pada bulan Februari 2020 sebanyak 6,88 juta orang (Laporan Data Sosial Ekonomi Oktober 2020, BPS) dan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Penduduk miskin Maret 2020 meningkat sebesar 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang (Laporan Data Sosial Ekonomi Oktober 2020, BPS). Tentunya hal ini dapat menurunkan dukungan dan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran daring.

Beragamnya faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring dapat memperburuk kesenjangan capaian pembelajaran siswa. Di satu sisi ada kelompok siswa yang mengalami pembelajaran daring berkualitas rata-rata atau cukup bagus, namun di sisi lainnya ada kelompok yang mendapatkan pembelajaran daring berkualitas rendah dan berpeluang macet pembelajarannya. Dan yang paling terdampak adalah siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran daring sama sekali. Dikarenakan berbagai kesulitan akses maupun daya dukung orang tua. Mereka berpotensi kehilangan pengetahuan secara serius. Kelompok ini rentan putus sekolah.

Bahu membahu berbagai pihak yaitu pemerintah, guru dan orang tua diperlukan guna

mencegah ancaman *lost generation* ini. Sekolah bersama Komite Sekolah dapat membentuk kelompok belajar bagi siswa yang tinggal berdekatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Siswa yang tidak memiliki perangkat, maka pihak sekolah dan komite dapat memberikan bantuan dana atau peminjaman alat. Pemerintah juga telah mengucurkan bantuan kuota belajar gratis bagi siswa melalui sekolah masing-masing. Selain itu pemerintah juga perlu fokus untuk kelompok siswa yang paling terdampak yaitu kelompok siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran daring sama sekali. Semoga dengan antisipasi dini yang dilakukan bersama, Indonesia dapat menyelamatkan generasi muda dari ancaman *lost generation* ini.

Tingkat Pengangguran Jawa Barat di Tengah Pandemi *Covid-19*

Heri Susanto

Statistisi BPS Kota Banjar

Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Pandemi *Covid-19* kemudian melanda dunia pada tahun 2020, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Di Indonesia kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak diumumkan secara resmi oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020 sebagai pandemi, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami dampak pandemi, menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Pandemi *Covid-19* telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khusus terkait penerapan PSBB dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan, seperti aktivitas pendidikan di sekolah, pekerjaan di perusahaan, kegiatan di ruang umum, hingga keagamaan di rumah ibadah. Namun, sejak Juni 2020 secara perlahan-lahan semua aktivitas dibuka kembali.

Pandemi *Covid-19*, tidak hanya memunculkan masalah kesehatan, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak, termasuk pada aspek perekonomian. Pembatasan berbagai aktivitas sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Perekonomian mulai menurun sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pelaku usaha, pembatasan aktivitas

yang berujung pada terhentinya aktivitas produksi sangat berpengaruh terhadap arus kas perusahaan dan berimbas pada langkah dirumahnya sebagian besar karyawan dan bahkan pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai upaya meminimalisasi biaya operasional perusahaan. Tentunya keadaan perekonomian yang seperti ini sangat berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa penduduk usia kerja (penduduk dengan usia 15 tahun keatas) adalah sebesar 37,51 juta orang. Ada peningkatan dibandingkan dengan penduduk usia kerja pada Agustus 2019 yang hanya sebesar 36,92 juta orang. Dari jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2020, yang termasuk angkatan kerja sebesar 24,21 juta orang, naik 0,22 juta orang dibandingkan Agustus 2019. Tren peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan jumlah Angkatan kerja adalah sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun.

Peningkatan jumlah Angkatan kerja seharusnya diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Pada Agustus 2020, dari 24,21 juta orang Angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat, hanya 21,68 juta orang yang bekerja. Sisanya sebesar 2,53 juta orang adalah pengangguran. Jika dibandingkan dengan Agustus 2019 yang hanya sebesar 1,93 juta orang, jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,60 juta orang. Kalau kita bandingkan antara jumlah

pengangguran terhadap terhadap jumlah angkatan kerja atau lebih dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada Agustus 2020 TPT di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 10,46 persen. Angka TPT sebesar 10,46 persen mengandung makna bahwa, dari 100 orang penduduk yang termasuk angkatan kerja, 10 orang diantaranya adalah pengangguran (penganggur terbuka). TPT Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen dari nilai TPT Agustus 2019 yang hanya sebesar 8,04 persen.

Melihat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan angka TPT Agustus 2020 tertinggi yaitu mencapai 14,29 persen, sedangkan Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten dengan angka TPT Agustus 2020 terendah yang mencapai 5,08 persen. Jika dibandingkan dengan angka TPT pada Agustus 2019, TPT Kabupaten Bogor mengalami peningkatan 5,18 persen dan TPT Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan 0,66 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat pengangguran lebih banyak didaerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Pada Agustus 2020, TPT untuk daerah perkotaan sebesar 11,07 persen, sedangkan untuk daerah pedesaan adalah sebesar 8,47 persen. Menurut jenis kelamin, TPT Agustus 2020 untuk laki-laki adalah sebesar 10,91 persen, sedangkan perempuan sebesar 9,67 persen. TPT laki-laki lebih tinggi 1,27 persen dibandingkan TPT perempuan. Hal ini berbeda dengan TPT Agustus 2019, TPT laki-laki lebih rendah 0,29 persen dibandingkan TPT Perempuan. Pada TPT Agustus 2019,

laki-laki sebesar 7,94 persen, sedangkan perempuan sebesar 8,23 persen.

Adanya peningkatan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, juga tidak terlepas dari adanya pandemi *Covid-19*. Selain menimbulkan krisis Kesehatan, pandemi *Covid-19* juga menimbulkan krisis ketenagakerjaan. Dari jumlah 37,51 juta orang penduduk usia kerja, terdapat 6,36 juta orang atau 16,96 persen yang terdampak *Covid-19*. Dari total 6,36 juta orang tersebut, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar terkena dampaknya yaitu sebesar 4,23 juta orang. Sedangkan menurut daerah tempat tinggal, penduduk yang berada di daerah perkotaan lebih besar terkena dampak *Covid-19* yaitu sebesar 5,28 juta orang. Untuk jumlah pengangguran karena *Covid-19* adalah sebanyak 0,70 juta orang dari total pengangguran sebanyak 2,53 juta orang.

Pandemi *Covid-19* sampai saat ini masih belum berakhir. Adanya rencana pemberian vaksin diharapkan dapat menjadi salah satu jalan pemulihan perekonomian Indonesia. Walaupun demikian, diperlukan strategi dan kebijakan lain yang tepat untuk dapat menanggulangi peningkatan jumlah pengangguran serta mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional.

Dua Sisi Dampak Revisi Cuti Bersama

Heri Susanto

Statistisi BPS Kota Banjar

Pemerintah kembali melakukan revisi cuti bersama. Pada revisi keempat ini, pemerintah mengurangi jumlah hari cuti bersama sebanyak tiga hari. Adapun penyebab pengurangan jumlah cuti adalah masih tingginya kasus *Covid-19* dan pencegahan kemungkinan timbulnya klaster baru *Covid-19*.

Pemerintah semula menambah hari cuti bersama akhir tahun untuk mengembalikan gairah ekonomi, khususnya pariwisata di Indonesia. Sejak bulan juni tahun 2020 yaitu sejak dimulainya adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), sektor pariwisata mulai menggeliat. Para pelaku pariwisata kembali membuka destinasi wisatanya setelah beberapa bulan sempat terhenti.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian negara, khususnya dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Sektor pariwisata menciptakan permintaan konsumsi maupun investasi, yang pada akhirnya akan menimbulkan kegiatan ekonomi berupa produksi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi yang muncul dari sektor pariwisata diantaranya adalah industri transportasi, industri restoran, industri perhotelan, industri komunikasi, industri kerajinan, dan lain-lain.

Pada masa pandemi *Covid-19*, industri perhotelan menjadi salah satu sektor usaha yang mengalami dampak cukup berat. Hal ini terlihat dari tingkat hunian kamar

hotel yang menurun drastis. Namun sejak dimulainya adaptasi kebiasaan baru, tingkat hunian kamar hotel mulai menunjukkan peningkatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat hunian kamar hotel (Tingkat Penghunian Kamar) di Jawa Barat, sejak bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 menunjukkan tren meningkat. Pada bulan Juni 2020, tingkat hunian kamar hotel hanya mencapai 19,13 persen. Tingkat hunian kamar hotel terus mengalami kenaikan, dan pada Bulan Oktober 2020 tingkat hunian kamar di Jawa Barat mencapai 37,02 persen. Adanya libur nasional dan cuti bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu penyebab meningkatnya tingkat hunian kamar pada bulan Oktober 2020.

Tren peningkatan tingkat hunian kamar hotel terjadi pada hotel bintang maupun non bintang. Menurut data BPS, tingkat hunian kamar hotel bintang pada bulan Oktober 2020 sebesar 43,57 persen, naik 6,14 poin dibandingkan bulan September 2020 yang mencapai 37,43 persen. Tingkat hunian kamar hotel tertinggi menurut kelas hotel bintang tercatat pada hotel bintang 5 sebesar 58,13 persen, sedangkan terendah terjadi pada hotel bintang 1 sebesar 27,86 persen. Tingkat hunian kamar hotel non bintang pada bulan Oktober 2020 sebesar 20,39 persen, naik 0,41 poin dibandingkan bulan September 2020 yang tercatat 19,98 persen. Tingkat hunian kamar tertinggi untuk hotel non bintang terjadi pada hotel dengan kelompok kamar 10 sampai dengan 24 kamar yaitu sebesar 22,58 persen. Sedangkan yang terendah sebesar 10,67 persen terjadi pada hotel dengan kelompok kamar kurang dari 10 kamar.

Untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di Jawa Barat pada bulan Oktober 2020 tercatat selama 1,42 hari. Rata-rata lama menginap ini lebih singkat dibandingkan bulan September 2020 yang tercatat selama 1,65 hari. Kalau dibandingkan, rata-rata lama menginap tamu asing di jasa akomodasi tercatat selama 2,70 hari sedangkan tamu Indonesia tercatat selama 1,41 hari.

Pemangkasan hari libur yang dilakukan pemerintah tentunya dapat berdampak negatif pada sektor pariwisata khususnya industri perhotelan. Tidak hanya Jawa Barat sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata, daerah lain pun tentunya akan mengalami dampak dari pemangkasan hari libur tersebut. Masyarakat tentunya harus melakukan penjadwalan ulang dan bahkan mungkin akan membatalkan rencana perjalanan wisatanya ke suatu daerah.

Di sisi lain, ada dampak positif keputusan pemangkasan hari libur yang dilakukan oleh pemerintah. Selain dampak kesehatan, yaitu mencegah meluasnya penularan virus *Covid-19* dan terbentuknya kluster baru *Covid-19*, pelaku usaha diluar sektor pariwisata menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Menurut pelaku usaha diluar sektor pariwisata, libur yang terlalu lama dianggap tidak baik bagi perusahaan tertentu dikarenakan mesin produksi harus tetap beroperasi selama 24 jam. Perusahaan terkadang harus menanggung beban lebih besar, karena harus membayar biaya lembur kepada pegawainya disaat libur panjang.

Dengan adanya pemangkasan hari libur, kegiatan ekonomi diluar sektor pariwisata diharapkan tetap berjalan. Hal ini tentunya, menjadi salah satu jalan menjaga tren positif mulai pulihnya kegiatan ekonomi seperti yang terjadi pada triwulan III tahun 2020. Seperti diketahui bahwa walaupun Ekonomi Jawa Barat triwulan III 2020 terhadap triwulan III 2019 (*year on year*) mengalami kontraksi sebesar 4,08 persen, namun secara triwulanan mengalami pertumbuhan sebesar 3,37 persen.

Adanya pertumbuhan sebesar 3,37 persen tersebut tentu harus membuat kita semakin optimis, perekonomian nasional dapat kembali pulih. Kebijakan pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi *Covid-19* harus didukung oleh seluruh komponen bangsa. Semoga pandemi *Covid-19* segera berlalu, dan ekonomi Indonesia kembali bangkit.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. PHH Mustafa No 43
Bandung – Jawa Barat 40124
Telp : 022 7272595 – 7201696
Email : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5745-79-9 (PDF)



9 786025 745799